



RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2045

Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

Pemerintah Provinsi Jambi

Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2045

**Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah**

Pemerintah Provinsi Jambi
2019

Sitasi:

Pemerintah Provinsi Jambi. 2019. Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2045; Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Jambi, Indonesia.

Penjelasan:

Dokumen ini merupakan naskah Rencana Induk (*master plan*) dan Peta Jalan (*road map*) Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang merupakan penguatan dari berbagai ide, gagasan, dan kesepakatan parapihak di Provinsi Jambi. Proses penyusunannya dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan parapihak, mengintegrasikan berbagai rencana pembangunan, dan berbasiskan data dan informasi yang memadai. Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan dokumen ini juga mengalami beberapa kendala yang harus diatasi seperti ketersediaan data, kelengkapan, dan kesahihan data. Analisis maupun kerincian data yang digunakan untuk menyusun dokumen ini disesuaikan dengan skala penggunaannya yaitu pada tingkat provinsi.

Oleh karena adanya beberapa keterbatasan yang mungkin ditemui selayaknya dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dijadikan sebagai dokumen dinamis yang dapat terus disempurnakan, baik melalui perbaikan data, diskusi, maupun pengembangan *pilot project*. Selain itu, dengan perkembangan dan tuntutan isu ke depan yang cepat dibutuhkan perbaikan dan pembaharuan dari waktu ke waktu.

Tim Penyusun:

Penyusunan dokumen ini melibatkan parapihak yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jambi yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, penyusunan dokumen ini juga melibatkan unsur NGO/CSO, organisasi pengusaha (GAPKI, GAPKINDO, dan APHI), serta unsur masyarakat lain. Adapun fasilitasi kegiatan dan pengembangan metodologi penyusunan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau dilakukan oleh World Agroforestry (ICRAF), Bogor Indonesia, yang didukung oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH).

Tim Teknis ICRAF:

Sonya Dewi, Feri Johana, Andree Ekadinata, Tania Benita, M Thoha Zulkarnain, Arga Pandiwijaya, Alfa Nugraha, Adrian Dwi Putra, Aenunaim, Asri Joni, Mohamad Nugraha, Harry Tri Atmojo Aksomo, Sidiq Pambudi, Subekti Rahayu, Hendratmo, Beria Leimona, Suyanto, M Sofiyuddin, Ni'matul Khasanah, Isnurdiansyah, Laksemi Ni Putu Sekar, Ferdiyan Dhio Teguh, Sylvanita Fitriana

Tim Teknis Pemprov Jambi:

Donny Iskandar, Muhammad Alfiansyah, Syamsul Bahri, Soni Pratomo, Muhammad Ridho, Poppy Hafianti, Latifah Chandra, Yani Sriningsih, Hasanuddin, Hendra Admaja, Edy Sukarno, Sepdinal, Asiah, Fitriisa Nora, Chun Chun Efriani, Masteti

Tata Letak:

Riky M Hilmansyah

Dipublikasikan Tahun:

2019



Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu tersusunnya dokumen
pembangunan ekonomi hijau ini

Kata Pengantar

Gubernur Jambi

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya, kita diberi kesempatan untuk dapat berkarya bagi kesejahteraan Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi memiliki luas 5.343.572 hektar dan terdiri atas sembilan kabupaten dan dua kota. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Jambi tercatat sejumlah 3,5 juta jiwa. Provinsi Jambi memiliki keunggulan secara geografis karena berdekatan dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, *Singapura Growth Triangle* (IMS-GT). Selain itu, sumber daya alam Jambi terbentang luas dari dataran rendah hingga dataran tinggi, daratan maupun lautan. Provinsi Jambi sangat kaya akan hasil alam seperti padi, karet, kelapa sawit, kayu manis, kopi, pinang, ikan, ternak, minyak, dan batu bara. Melimpahnya sumber daya ini dapat menjadi modal utama untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Jambi.

Secara historis, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Namun, sejak tahun 2014, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan muncul sebagai penyumbang PDRB tertinggi dengan kontribusi yang terus meningkat hingga mencapai 29,41%. Potensi bahan baku tersebar di kota maupun kabupaten Provinsi Jambi dengan tiga wilayah perkembangan kawasan budidaya khususnya pertanian yang terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Komoditas-komoditas unggul Provinsi Jambi memiliki karakteristik yang menjadi potensi bagi perekonomian wilayah dan masyarakat Jambi.

Di sisi lain, berbagai permasalahan turut menyertai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, mulai dari degradasi tutupan lahan, kebakaran hutan dan lahan, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang belum memadai, hingga konflik kepemilikan lahan. Melalui visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*), pemerintah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta peningkatan konektivitas dan rantai nilai yang berkelanjutan. Rangkaian strategi dan peta jalan ini disusun berdasarkan kajian parapihak di Provinsi Jambi dan dituangkan dalam Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan Provinsi Jambi sebagai bentuk realisasi visi *Green Growth* Provinsi Jambi.

Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah ikut terlibat mendukung penyusunan Rencana Induk ini. Kami yakin dokumen ini akan bermanfaat sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, masyarakat, mitra pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi yang akan terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi melalui Pertumbuhan Ekonomi Hijau berupaya untuk mendukung pencapaian Nawa Cita, *Nationally Determined Contributions* (NDC), *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals*.

Jambi, November 2019
Gubernur Provinsi Jambi



Dr. H. Fachrori Umar, M. Hum

Daftar Isi

Kata Pengantar Gubernur Jambi	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Singkatan.....	x
Ringkasan Eksekutif	xi
Bab 1. Jambi menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau	2
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia	3
1.2 Perundangan dan Peraturan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau	4
1.3 Potensi Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	6
1.4 Inisiatif dan Komitmen Provinsi Jambi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau	8
Bab 2. Ikhtisar Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi	12
2.1 Kondisi Alam dan Sosio-Ekonomi Jambi	12
2.2 Dinamika Penggunaan Lahan dan Fungsi Ekosistem	14
2.3 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	17
2.4 Ekonomi Regional dan Sektor Perekonomian Strategis	18
2.5 Komoditas Perkebunan Strategis	19
Bab 3. Adil dan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan.....	24
3.1 Peluang dan Tantangan	24
3.2 Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau	29
3.3 Ruang Lingkup	29
Bab 4. Pendekatan Bentang Lahan dalam Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	32
4.1 Kerangka Teknis dan Perangkat Perencanaan	32
4.2 Alur Kerja.....	34
4.3 Pendekatan Zona Pembangunan	35
Bab 5. Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau	42
5.1 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau	43
5.2 Proyeksi Dampak.....	46

5.3 Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau.....	49
5.4 Peta Intervensi.....	71
Bab 6. Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	84
6.1 Lini Masa dan Alternatif Pembiayaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	84
6.2 Program-Program Tematik	102
Bab 7. Tata Kelola Pertumbuhan Ekonomi Hijau.....	124
7.1 Pengarusutamaan	124
7.2 Strategi Komunikasi dan Kemitraan	125
7.3 Pendanaan dan Penganggaran.....	126
7.4 Pemantauan dan Evaluasi.....	129
7.5 Mitigasi Risiko.....	131
7.6 Keterbatasan.....	131
Bab 8. Simpulan dan Penutup	136
Daftar Pustaka	140
Lampiran.....	141

Daftar Gambar

Gambar 1-1.	Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi.....	9
Gambar 2-1.	Perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dengan provinsi lain di Indonesia	13
Gambar 2-2.	Dinamika perubahan tutupan lahan hutan alam periode 1990-2018	17
Gambar 2-3.	Laju emisi gas rumah kaca dari sektor lahan tahun 1990-2018.....	17
Gambar 2-4.	Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi dan provinsi lainnya di Pulau Sumatera periode 2001-2017	18
Gambar 2-5.	PDRB Provinsi Jambi berdasarkan sektor ekonomi periode 2001-2017	18
Gambar 2-6.	Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2001-2017	19
Gambar 2-7.	Nilai LQ dan perubahannya di Provinsi Jambi tahun 2010-2014.....	21
Gambar 4-1.	Prinsip utama dalam penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau	32
Gambar 4-2.	Kerangka analisis dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau.....	33
Gambar 4-3.	Alur kerja penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau.....	35
Gambar 4-4.	Zonasi wilayah Provinsi Jambi.....	36
Gambar 4-5.	Proses membangun inklusivitas dengan parapihak di tingkat lokal	37
Gambar 5-1.	Perbandingan hasil proyeksi emisi gas rumah kaca pada skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP).....	46
Gambar 5-2.	Perbandingan hasil proyeksi Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP).....	47
Gambar 5-3.	Perbandingan hasil proyeksi nilai intensitas emisi pada skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP).....	47
Gambar 5-4.	Peta intervensi - berbasis sumber daya alam terbarukan	72
Gambar 6-1.	Pemetaan isu strategis dan strategi Provinsi Jambi.....	102
Gambar 6-2.	Volatilitas harga karet.....	103
Gambar 6-3.	Diagram model bisnis kemitraan dengan petani.....	108
Gambar 6-4.	Produksi hasil hutan kayu di Provinsi Jambi.....	111
Gambar 6-5.	Tata ruang area kerja PT Wirakarya Sakti.....	113
Gambar 6-6.	Rantai nilai kelapa dalam di Provinsi Jambi	119
Gambar 7-1.	Skema pendanaan program di tingkat provinsi/kabupaten/kota	127

Daftar Tabel

Tabel 2-1.	Luas alih fungsi lahan tahun 1990-2018 (ha).....	14
Tabel 2-2.	Luas tutupan lahan berdasarkan kelas tutupan lahan	15
Tabel 2-3.	Luas area dan produksi komoditas perkebunan kunci tahun 2016.....	19
Tabel 5-1.	Capaian dambaan pada tingkat strategi	46
Tabel 5-2.	Indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi beserta perbandingan dampak <i>ex-ante</i> pada BAU dan GGP	48
Tabel 5-3.	Rincian intervensi, capaian dambaan, indikator dan kebijakan pemungkin pada Strategi 1	49
Tabel 5-4.	Rincian intervensi, capaian dambaan, indikator dan kebijakan pemungkin pada Strategi 2.....	60
Tabel 5-5.	Rincian intervensi, capaian dambaan, indikator dan kebijakan pemungkin pada Strategi 3.....	68
Tabel 5-6.	Intervensi aksi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi	75
Tabel 6-1.	Lini masa dan alternatif pembiayaan kegiatan pada strategi 1	85
Tabel 6-2.	Lini masa dan alternatif pembiayaan kegiatan pada strategi 2.....	92
Tabel 6-3.	Lini masa dan alternatif pembiayaan kegiatan pada strategi 3.....	97
Tabel 6-4.	Perhitungan penghasilan dari berbagai model pengelolaan	109
Tabel 6-5.	Aktivitas intervensi yang dilakukan berdasarkan obyektif dan indikator	110
Tabel 6-6.	Area kerja Wirakarya Sakti	113
Tabel 6-7.	Pola pengelolaan kemitraan oleh PT WKS.....	115
Tabel 6-8.	Pembagian peran dalam intervensi program	120
Tabel 6-9.	Perkiraan kebutuhan bahan baku dan produksi.....	121
Tabel 6-10.	Perkiraan nilai investasi.....	121
Tabel 6-11.	IRR dan BC Ratio kelapa dalam.....	121
Tabel 7-1.	Capaian dan indikator keberhasilan	130
Tabel 7-2.	Identifikasi mitigasi berdasarkan potensi risiko.....	132

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APL	Area Pengelolaan Lain
ATR	Agraria dan Tata Ruang
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	Business As Usual
Bekraf	Badan Ekonomi Kreatif
BOT	Build Operate Transfer
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BRG	Badan Restorasi Gambut
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CH₄	Gas Metan
CO₂eq	Karbon dioksida equivalen
CPO	Crude Palm Oil
CSR	Coorporate Sosial Responsibility
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
DID	Dana Insentif Daerah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DMPA	Desa Makmur Peduli Api

DPSIR	Driving Force, Pressures, State, Impacts, Responses
DTK	Dana Transfer Khusus
FGD	Focus Group Discussion
FLEGT	Forest Law Enforcement, Governance and Trade
FLORAS	Forest Landscape Opportunity Restoration Assessment
FSC	Forest Stewardship Council
GAP	Good Agricultural Practice
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GAPKINDO	Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
GGP	Green Growth Plan
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
GRK	Gas Rumah Kaca
ha	hektar
HCS	High Carbon Stock
HCV	High Conservation Value
HD	Hutan Desa
HKM	Hutan Kemasyarakatan
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPK	Hutan Produksi Konversi
HTI	Hutan Tanaman Industri
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IKK	Indikator Kinerja Kunci
IKM	Industri Kecil dan Menengah
IKU	Indikator Kinerja Utama
Inpres	Instruksi Presiden

INSTANT	Information System for Sustainable Land Management
ISPO	Indonesia Sustainable Palm Oil
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Keppres	Keputusan Presiden
KND	Kontribusi Nasional yang Diniatkan
KPBU	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LQ	Location Qoutient
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUMENS	Land Use Planning for Multiple Environmental Services
M&E	Monitoring and Evaluation
Monev	Monitoring dan Evaluasi
NGO	Non-governmental organization
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PETI	Pertambangan Emas Tanpa Izin
PINA	Pinjaman Investasi Non-anggaran Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
QCDSME	Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale, Environment
REDD+	Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Renstra	Rencana Strategis
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAD	Stock Investment Driven
SDGs	Sustainable Development Goals
SWOT	Strength Weakness Opportunity Threat
TKDD	Transferke Daerah dan Dana Desa
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TORA	Tanah Obyek Reforma Agraria
UPBB	Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar
UU	Undang-undang

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Komitmen untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan telah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jambi melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau. Inisiatif Provinsi Jambi dalam pembangunan ekonomi hijau ditunjukkan dalam upaya pengembangan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi hutan dan lahan gambut. Saat ini, perekonomian Provinsi Jambi bertumpu pada kekayaan sumber daya alamnya melalui kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor berbasis sumber daya alam tersebut menyumbang sekitar 29% dari PDRB Provinsi Jambi tahun 2017. Pemanfaatan sumber daya alam telah menopang kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin yang relatif rendah dibandingkan Pulau Sumatera dan IPM yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun demikian, perekonomian yang bergantung pada sumber daya alam bukannya tanpa risiko. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut telah menjadi penyebab utama degradasi fungsi lingkungan melalui pembukaan lahan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam. Penerapan pendekatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kehutanan sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan pemulihan hutan maupun lahan terdegradasi. Pertumbuhan Ekonomi Hijau berusaha menyinergikan peran dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan pengelolaan lahan yang menyejahterakan masyarakat. Dokumen Rencana Induk Ekonomi Hijau ini mencakup pendekatan, strategi, dan peta jalan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi periode 2019-2045.

Peluang

Provinsi Jambi memiliki modal dan keunggulan wilayah yang dapat dioptimalkan dalam rangka mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Perekonomian berbasis sumber daya alam di Provinsi Jambi didukung dengan kondisi lahannya yang memiliki kesesuaian tinggi untuk ditanami komoditas bernilai ekspor, seperti karet, hutan tanaman industri, padi, kelapa, kayu manis, kopi, dan pinang. Secara umum, modal dasar pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau yang telah dimiliki oleh Provinsi Jambi antara lain: (i) Dukungan kebijakan pemerintah daerah dan kemitraan berbagai pihak untuk pembangunan yang berkelanjutan; (ii) Komoditas unggulan perkebunan sebagai salah satu sektor perekonomian strategis; dan (iii) lokasi strategis untuk pemasaran dan distribusi komoditas.

Tantangan

Risiko utama dari perekonomian berbasis sumber daya alam adalah tekanan terhadap lingkungan yang berpotensi mengakibatkan degradasi lingkungan. Beberapa dampak nyata yang teramati, antara lain DAS Batanghari yang kritis akibat tingginya sedimentasi; kekeringan dan banjir yang kerap terjadi di sebagian kawasan; serta kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tahunan di Provinsi Jambi. Laporan World Bank Tahun 2016 mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan menunjukkan bahwa Provinsi Jambi mengalami kerugian ekonomi sebesar 11,8 triliun rupiah dari kebakaran yang terjadi pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi. Jika dirangkum, terdapat lima tantangan dalam penerapan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi

Jambi, yaitu: (i) Pengelolaan kawasan budidaya dan lindung yang tidak berimbang; (ii) Masifnya bencana alam, termasuk kebakaran lahan dan hutan yang dipengaruhi oleh intervensi manusia terhadap alam; (iii) Tumpang tindih area perizinan dan konflik penguasaan lahan; (iv) Restorasi lahan, terutama bekas tambang, tidak berjalan dengan baik; (v) Belum lengkapnya rencana induk perkebunan, termasuk alokasi lahan produktif, untuk komoditas strategis.

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi diadaptasi dari lima visi yang ditetapkan secara nasional, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
2. Pertumbuhan inklusif dan merata
3. Ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
4. Ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan
5. Pengurangan emisi gas rumah kaca

Ruang Lingkup Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Sektor berbasis lahan yaitu kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan menjadi fokus utama dalam penyusunan dokumen rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau. Komoditas yang akan didorong adalah tujuh komoditas unggulan yaitu karet, kopi, kelapa sawit, kayu manis, kelapa, pinang, dan padi.

Pendekatan

Pendekatan yang diambil dalam menyusun Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi adalah pendekatan lanskap. Pendekatan ini menjembatani kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan melalui upaya menyeimbangkan berbagai permintaan dengan berbagai tipe penggunaan lahan yang kompetitif. Dalam penyusunan dokumen dan

analisis, terdapat tiga prinsip utama yaitu: (i) inklusivitas, (ii) integrasi dan sinkronisasi, dan (iii) berlandaskan data yang sah. Analisis yang digunakan menerapkan pendekatan kesisteman, baik pada identifikasi permasalahan maupun perumusan strategi penyelesaian. Selain itu, Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau juga menggunakan pendekatan analisis antar sektor dan ekonomi wilayah yaitu melalui analisis input output dan pemodelan dinamika. Pemodelan dinamika penggunaan lahan dilakukan berdasarkan data kebutuhan lahan. Pendekatan pemodelan dinamika penggunaan lahan menghasilkan keluaran berbagai skenario kebijakan, alokasi lahan, ekspansi pertanian dan perkebunan, perubahan produktivitas, dan harga komoditas.

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi tersusun atas tiga strategi sebagai berikut:

1. Tata guna, pemulihan, dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan
2. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan (*livelihood capitals*) serta pemanfaatan jasa lingkungan
3. Konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang ditopang oleh sektor ekonomi berbasis lahan membutuhkan perencanaan pemanfaatan lahan yang baik sehingga dapat menghindari dampak lingkungan yang merugikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Strategi 1 membahas perencanaan tata guna lahan yang mampu menyeimbangkan antara alokasi dan pemulihan serta upaya peningkatan produktivitas lahan yang berkelanjutan. Kebutuhan akan lahan untuk fungsi budidaya perlu diseimbangkan dengan kebutuhan akan perlindungan ekologis bentang lahan. Hal ini dapat dicapai melalui alokasi pembangunan sumber daya alam terbarukan

pada lokasi yang memiliki tingkat kesesuaian biofisik, sosial, dan ekonomi yang tepat. Upaya ini juga diikuti dengan pemulihan kembali fungsi bentang lahan atau restorasi untuk lahan yang telah mengalami degradasi. Alokasi yang tepat dan peningkatan kualitas lahan mengkondisikan lahan sehingga siap untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan bagi lahan-lahan yang akan dikembangkan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Upaya ini dilakukan melalui penerapan teknologi dan teknik budidaya yang tepat agar jumlah produksi per unit lahan dapat mencapai tingkat yang optimal tanpa perlu ekstensifikasi lahan.

Strategi 2 mencakup peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi hijau melalui akses terhadap modal penghidupan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Lima modal penghidupan tersebut antara lain, modal alam, modal sosial, modal finansial, modal fisik, dan modal sumber daya manusia. Strategi ini juga membahas mengenai pentingnya pembentukan dan implementasi mekanisme insentif, disinsentif, dan pendanaan inovatif jasa lingkungan. Mekanisme jasa lingkungan menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan investasi finansial dan non-finansial untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan dan menjaga kualitas lingkungan, serta menyediakan jasa lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Strategi 3 menitikberatkan pada keterhubungan baik secara fisik melalui pengembangan infrastruktur penghubung maupun rantai nilai dan hilirisasi industri untuk komoditas-komoditas strategis. Peningkatan keterkaitan antara pusat ekonomi satu dan lainnya dapat memacu pemerataan pembangunan serta memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini memperlihatkan pentingnya optimalisasi infrastruktur penghubung. Di sisi lain, peningkatan nilai tambah juga perlu dilakukan melalui peningkatan skala ekonomi yang dapat dipicu oleh pengembangan industri hilir. Pengembangan skala ekonomi dapat mengoptimalkan rantai produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan harga bahan baku.

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau menjabarkan tiga strategi menjadi 37 intervensi. Masing-masing intervensi memiliki capaian dambaan, indikator yang disarankan, serta kebijakan pemungkin. Selanjutnya, setiap intervensi juga dirinci menjadi kegiatan-kegiatan beserta indikasi waktu pelaksanaan yang terbagi menjadi tiga periode dalam rentang tahun 2019-2045. Setiap kegiatan juga dipetakan berdasarkan opsi pembiayaan yang terdiri dari: DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, Hibah Daerah, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Obligasi, dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Selain itu, bagian ini juga membahas mengenai program-program tematik, sebagai berikut: (i) pengembangan industri hilir komoditas karet; (ii) pengembangan industri kayu; dan (iii) penguatan komoditas kelapa dalam. Penyusunan program-program tematik ini menjadi dasar bagi pembuatan rencana usaha (*business plan*) yang dapat memberikan opsi investasi bagi pihak swasta di Provinsi Jambi.

Proyeksi Dampak Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Berdasarkan lima visi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi, dilakukan penyusunan enam belas indikator makro yang dianalisis dengan dua skenario yaitu bisnis seperti biasa (*business as usual*) dan pertumbuhan hijau. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 0,86 Ton CO₂eq/juta rupiah pada tahun 2045. Nilai emisi ini lebih rendah dibandingkan skenario BAU yang mencapai 1,31 Ton CO₂eq/juta rupiah. Skenario pertumbuhan ekonomi hijau memproyeksikan penurunan deforestasi sebesar 96,93%. Rencana pertumbuhan ekonomi hijau juga diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, ditunjukkan dengan nilai DIFA sebesar 10,23 yang lebih tinggi dari skenario BAU sebesar 7,95. Selain indikator-indikator peningkatan kualitas lingkungan, indikator ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan. Penerapan skenario pertumbuhan ekonomi hijau dapat meningkatkan PDRB lebih

baik dibandingkan dengan skenario BAU, dengan selisih sekitar 13,6%. Indikator ekonomi lain seperti serapan tenaga kerja, upah gaji, dan keuntungan usaha juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

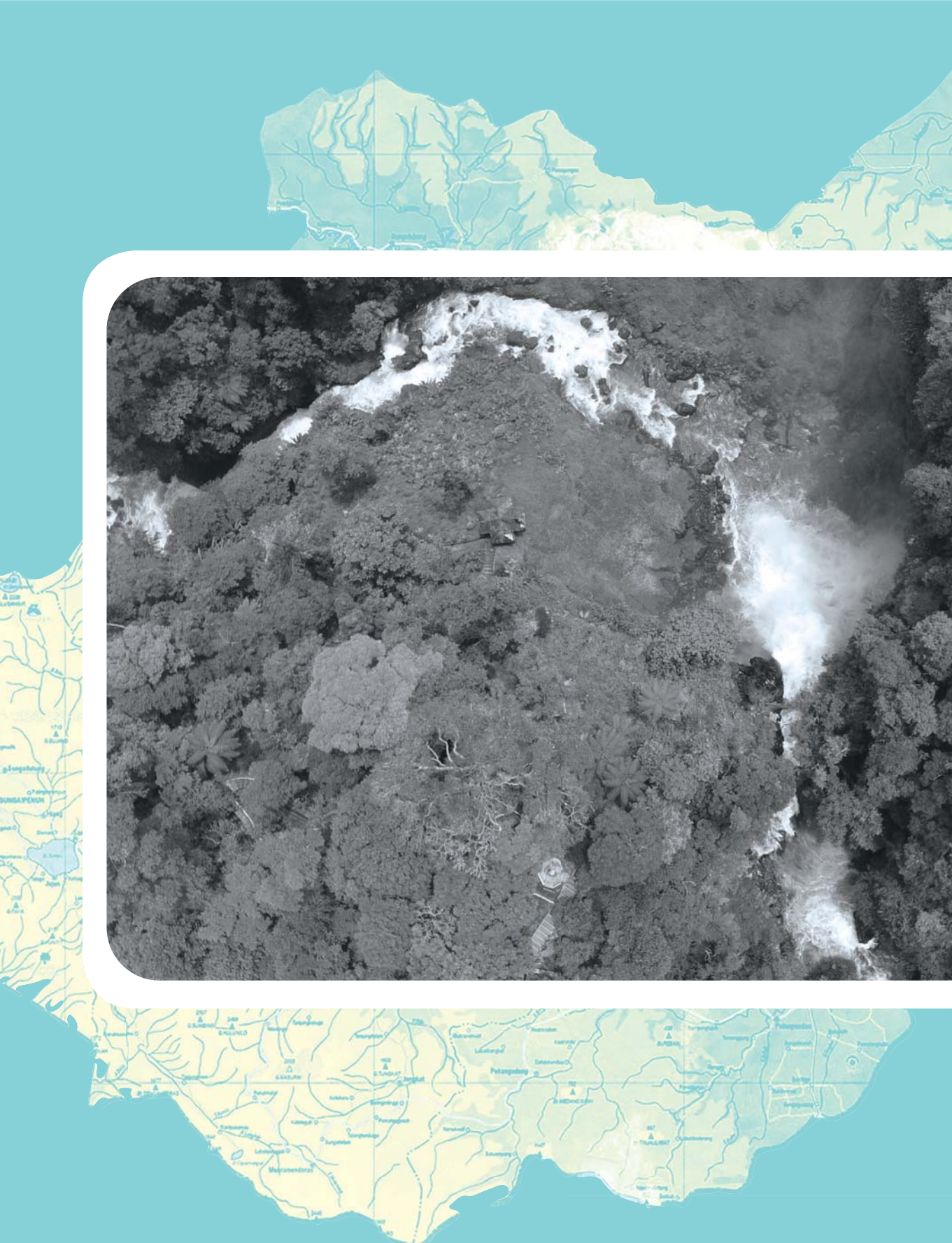
Tata Kelola Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Tata kelola pertumbuhan ekonomi hijau tidak terlepas dari upaya artikulasi gagasan pertumbuhan ekonomi hijau agar terintegrasi dengan program-program pemangku kepentingan di tingkat lokal. Upaya pengarusutamaan ini dilakukan melalui proses internalisasi indikator rencana pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam indikator kinerja pembangunan daerah. Tahapan pengarusutamaan secara instrumental antara lain: (1) memastikan pertumbuhan hijau sebagai indikator dalam pelaksanaan program pembangunan daerah; (2) mengalokasikan sebagian kegiatan dalam pertumbuhan ekonomi hijau untuk dibiayai dengan anggaran daerah; (3) melakukan pengawasan dan evaluasi ketercapaian yang terukur dan berjangka. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan prioritas jangka panjang sehingga selayaknya dapat dituangkan secara eksplisit ke dalam regulasi daerah dan diarusutamakan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah. Upaya ini memastikan keberlanjutan implementasi pertumbuhan ekonomi hijau pada periode pemerintahan yang berbeda.

Tahapan yang beriringan dengan upaya artikulasi gagasan adalah melalui komunikasi dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Rencana pertumbuhan ekonomi hijau memiliki sensitivitas terhadap kondisi lokal wilayah sehingga lebih mudah untuk dikomunikasikan sebagai narasi kedaerahan yang selaras dengan

kebijakan pemerintah maupun kondisi lingkungan dan masyarakat. Setelah terbangun pemahaman melalui komunikasi, kemitraan dapat terbangun antarpihak. Konteks kemitraan yang dimaksud yaitu adanya kesamaan komitmen dan kerjasama antarpihak. Sasaran kemitraan strategis sudah cukup terpetakan dengan jelas dalam dokumen ini melalui identifikasi multi-pihak yang terkait dengan pembangunan ekonomi hijau. Pelibatan multi-pihak dalam tata kelola pertumbuhan ekonomi hijau menjadi dasar pendanaan ekonomi hijau yang berasal dari berbagai sumber pendanaan baik dana pemerintah, swasta, maupun lembaga *non-profit*.

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan tata kelola pertumbuhan ekonomi hijau. Perangkat evaluasi pada rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau perlu disiapkan dengan menekankan pentingnya *outcome* dalam pelaporan. Dalam penilaian kinerja pertumbuhan ekonomi hijau, disusun indikator makro yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak di Provinsi Jambi. Penyusunan ini juga diikuti dengan perbaikan mekanisme pengumpulan data melalui upaya memprioritaskan data disagregat, fokus pada indikator, dan standarisasi dalam indikator penilaian. Pada akhirnya, keberjalanan pemantauan dan evaluasi akan berhasil apabila diimbangi dengan peningkatan budaya organisasi yang kritis dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan. Beberapa keterbatasan dalam penerapan rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat diidentifikasi antara lain, kendala analisis dan pengolahan data, proses fasilitasi dan kemitraan yang terhambat, dan belum adanya rencana implementasi yang lahir dari penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau.





01

Jambi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

.....

'Sepucuk Jambi Sembilan Lurah' dengan makna *satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan rakyat dan wilayah Jambi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia* melambangkan kekayaan alam dan kebesaran Provinsi Jambi, dari sialang lantak besi sampai durian batakuk Rajo dan Tanjung Jabung. Pemerintah Provinsi Jambi dengan mengusung visi 'Jambi Tuntas 2021' yaitu *Tertib Unggul Nyaman Adil dan Sejahtera* menjadikan Pembangunan Hijau suatu kebutuhan yang mendesak untuk diimplementasikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Bab 1

Jambi menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau



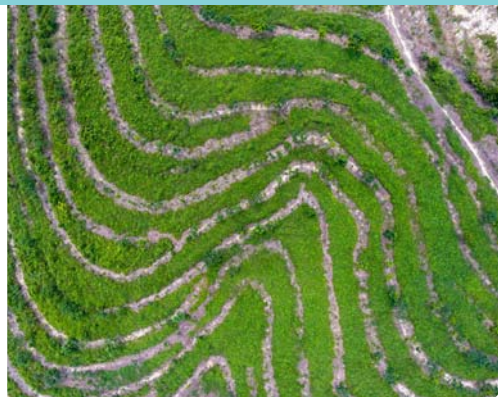
‘Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’ dengan makna satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan rakyat dan wilayah Jambi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melambangkan kekayaan alam dan kebesaran Provinsi Jambi, dari sialang lantak besi sampai durian batakuk Rajo dan Tanjung Jabung. Pemerintah Provinsi Jambi dengan mengusung visi ‘Jambi Tuntas 2021’ yaitu Tertib Unggul Nyaman Adil dan Sejahtera menjadikan Pembangunan Hijau sebagai suatu kebutuhan yang mendesak untuk diimplementasikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi merupakan fondasi bagi perancangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau di Jambi yang selaras dengan komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), serta program dan target Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nasional. Secara umum, dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi bertujuan untuk mendorong Provinsi Jambi dalam mencapai target pembangunan hijau yang berkelanjutan dari sumber daya terbarukan berbasis lahan serta turunannya. Secara nasional, Rencana

Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat mendukung pencapaian *nationally determined contributions* (NDC) dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi disusun dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah dalam mencapai tujuan bersama secara inklusif, integratif, dan berbasis informasi. Dengan bertambahnya kesadartahuan dan tekad para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi maupun kabupaten rencana induk dan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau diharapkan dapat diarusutamakan secara konsisten ke dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah melalui proses keterlibatan multipihak dalam bidang kebijakan dan proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi disusun berdasarkan skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dituangkan secara spasial dalam Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Jambi. Adapun dokumen peta jalan tersebut mencakup



materi terkait kebijakan pendukung, strategi, intervensi, dan program. Selain itu, dokumen peta jalan juga dilengkapi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang terkait dengan indikator SDGs sebagai dasar pemantauan dan evaluasi.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*) di Indonesia diluncurkan pada tahun 2013 oleh Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berlandaskan pada perencanaan nasional yang menghargai dan melestarikan modal alam, meningkatkan ketahanan, serta membangun ekonomi lokal serta inklusif dan adil. Target nasional Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
2. Pertumbuhan yang inklusif dan merata
3. Ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan
4. Ekosistem sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa ekosistem

5. Penurunan emisi gas rumah kaca

Lima tujuan nasional tersebut dilengkapi dengan indikator-indikator makro usulan pada masing-masing tujuan. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2014-2019, dan Rancangan RPJMN 2020-2024. Dalam RPJPN tahun 2005-2025, salah satu misi pembangunan Indonesia yaitu 'Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari' yang dilaksanakan melalui:

1. Memperbaiki pengelolaan, pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan
2. Keberadaan dan kegunaan sumber daya alam lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan

Pertumbuhan ekonomi hijau dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sekaligus memastikan bahwa aset lingkungan dapat terus menghasilkan produk maupun jasa lingkungan sebagai sandaran bagi kesejahteraan manusia.

Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan paradigma yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, dengan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2010). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan akar dan tujuan dari pertumbuhan ekonomi hijau. Pembangunan berkelanjutan sendiri telah berkembang sejak tahun 1980 sebagai langkah awal mengatasi kondisi lingkungan bumi yang terjadi. Saat ini terdapat 17 *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)* yang berusaha dicapai oleh negara-negara di dunia melalui komitmen global.

Mengikuti perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan, konsep pertumbuhan ekonomi hijau atau *Green Growth* pertama kali dikemukakan pada tahun 2005 sebagai suatu instrumen untuk mengenalkan model pembangunan berkelanjutan yang baru dan rendah emisi. Pertumbuhan ekonomi hijau kemudian tumbuh menjadi suatu cara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep pertumbuhan ekonomi hijau mendemonstrasikan bahwa perlindungan terhadap lingkungan tidak berarti mengorbankan kesejahteraan manusia.

3. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan

Komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca telah dijabarkan dalam RPJMN 2014-2019. Dalam rencana pembangunan ini, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2019 di lima sektor prioritas yaitu, kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah yang rentan. Dalam rancangan RPJMN

2020-2024 juga tercatat bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada perencanaan pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development*).

1.2 Perundangan dan Peraturan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Dokumen peraturan dan perencanaan pembangunan memberikan dasar kebijakan dalam pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Secara konstitusional, kebijakan dan peraturan di Indonesia sudah memadai untuk memayungi pelaksanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di berbagai daerah yang

meliputi, berbagai peraturan mengenai lingkungan hidup, perencanaan ruang, perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan berkelanjutan, penurunan gas rumah kaca, serta kajian lingkungan hidup strategis.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan konsep pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2009. Peraturan ini telah membawa kemajuan dalam penetapan standar kualitas perencanaan lingkungan, kewajiban untuk melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam seluruh dokumen perencanaan, serta pendanaan inovatif pembangunan hijau. Munculnya UU ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan atensi lebih terhadap aspek lingkungan maupun proses pembangunan hijau melalui kebijakan dan program yang berbasis instrumen ekonomi lingkungan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang (UU PR)

Integrasi tata ruang sangat relevan dalam penyelenggaraan program ekonomi hijau. Integrasi tata ruang bertujuan untuk menyelaraskan tata ruang dengan alokasi dan peruntukan ruang. Dasar hukum penataan ruang sudah cukup akomodatif dalam memberikan amanat mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam penataan ruang. UU PR mencantumkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan tiga hal yaitu: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan

memperhatikan sumber daya manusia, dan (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)

Peraturan perundangan ini merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan, baik pusat maupun daerah, yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek. Walaupun tidak banyak membahas aspek keberlanjutan lingkungan secara eksplisit, amanat untuk memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan lingkungan terdapat dalam salah satu prinsip yang tercantum pada Pasal 2 yaitu 'menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan lingkungan'. Unsur berkelanjutan yang diadopsi oleh peraturan perundangan ini dimaknai bahwa perencanaan merupakan tahapan-tahapan yang bergabung menjadi suatu siklus yang utuh.

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai peraturan turunan dari UU SPPN, peraturan ini cukup banyak mengadopsi dan mengamankan pembangunan yang berkelanjutan secara lebih komprehensif. Peraturan ini mengamankan bahwa rencana pembangunan nasional perlu diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdapat pada dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Sebagai konsekuensi dari komitmen ini, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB).

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Peraturan Presiden ini berfokus pada skenario-skenario mitigasi GRK pada sektor-sektor pembangunan. Peraturan ini memandatkan daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). RAD GRK akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota. Baik RAD TPB maupun RAD GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah walaupun dalam praktiknya masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas yang mempersulit adanya integrasi.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis

Selain berkewajiban untuk menyusun RAD TPB dan RAD GRK, pemerintah juga harus melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan peraturan pelaksana dari PP ini yaitu Permen LHK No. 69 tahun 2017, KLHS harus terintegrasi dengan penyusunan kedua dokumen perencanaan tersebut.

1.3 Potensi Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Penyelenggaraan pembangunan 'hijau' nyatanya tidak mudah, meskipun telah didukung oleh cukup banyak peraturan dan kebijakan. Adanya *gap* antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang mengakibatkan penilaian tingkat keberlanjutan dan indikator 'hijau' suatu program pembangunan sulit dilakukan. Pedoman sinkronisasi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang sudah disusun dan ditegaskan namun pada kenyataannya penyelarasan masih sebatas kutipan di dalam dokumen. Hal ini menjadi problematik dalam mewujudkan perencanaan yang hijau karena hubungan antara program dan alokasi ruang haruslah sejalan untuk memastikan keberlanjutan. Sebagai contoh, tuntutan pertumbuhan ekonomi memberikan tekanan pada lahan sehingga terjadi eksploitasi pada lahan-lahan yang kaya akan sumber daya alam meskipun program pemerintah daerah sudah mengamanatkan pembangunan yang berkelanjutan. Fenomena ini kerap terjadi karena tidak adanya ketegasan dalam pengaturan ruang





yang seharusnya selaras dengan program pembangunan. Persoalan ini mungkin terjadi sebaliknya dimana penataan ruang sudah cukup memfasilitasi pembangunan hijau namun program pembangunan pemerintah tidak sejalan, sehingga berimplikasi kembali pada tata ruang.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau diharapkan dapat menjembatani strategi rencana pembangunan dan penataan ruang, serta yang paling utama adalah menyinergikan antara tujuan pembangunan dan keberlanjutan sumber daya alam dalam kerangka pencapaian

Kotak 1-2. Apa itu pendekatan lanskap?

Pendekatan lanskap atau *landscape approach* hingga saat ini merupakan pendekatan yang paling ideal untuk menjembatani kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan dengan menyeimbangkan berbagai permintaan dengan berbagai tipe penggunaan lahan yang kompetitif.

Sumber: Sayer et al. (2013), <https://www.globallandscapesforum.org/about/what-is-the-landscape-approach/>

SDGs. Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah *pendekatan lanskap* yang menghasilkan kajian keruangan bersifat eksplisit (*spatially explicit*). Sumber daya lahan menjadi fokus dalam analisis pertumbuhan ekonomi hijau karena posisinya yang strategis dalam pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Analisis yang berangkat dari aspek lahan menghasilkan strategi dan kegiatan yang lebih mudah untuk dipetakan secara keruangan. Penilaian terhadap pelaksanaan rencana yang 'hijau' menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan dua aspek tersebut. Adanya rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau dapat menjadi titik temu antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan dampak lingkungan rendah dan melibatkan multi-pihak.

1.4 Inisiatif dan Komitmen Provinsi Jambi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau

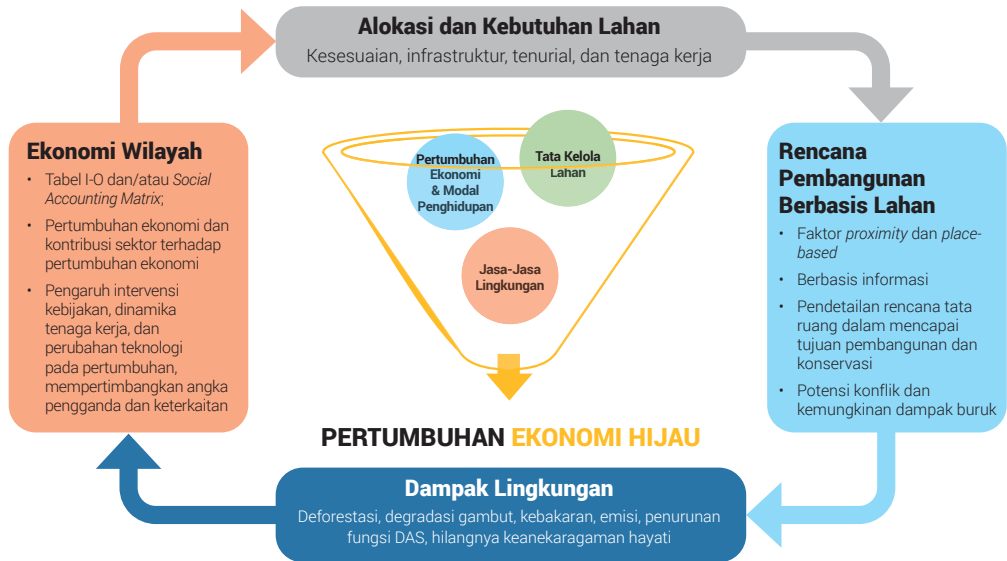
Pemerintah Provinsi Jambi telah memperlihatkan komitmen dan inisiatif dengan mengambil peranan dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Inisiatif tersebut mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi, dan masyarakat sipil. Jambi telah menghadapi momentum yang tepat untuk memulai transformasi menuju pertumbuhan ekonomi hijau melalui dukungan politis, jaringan kerja, dan sumber daya alam yang melimpah.

Penyusunan rencana makro dan peta jalan Pertumbuhan Hijau Jambi melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan, mempertimbangkan semua aspek serta didukung oleh data dan analisa yang sahih. Rencana dan peta jalan tersebut harus mampu mengakomodasi permintaan global terhadap produk-produk bernilai ekonomi tinggi, sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi hijau yang sehat dan menjamin kesetaraan kehidupan bagi seluruh kelompok masyarakat.

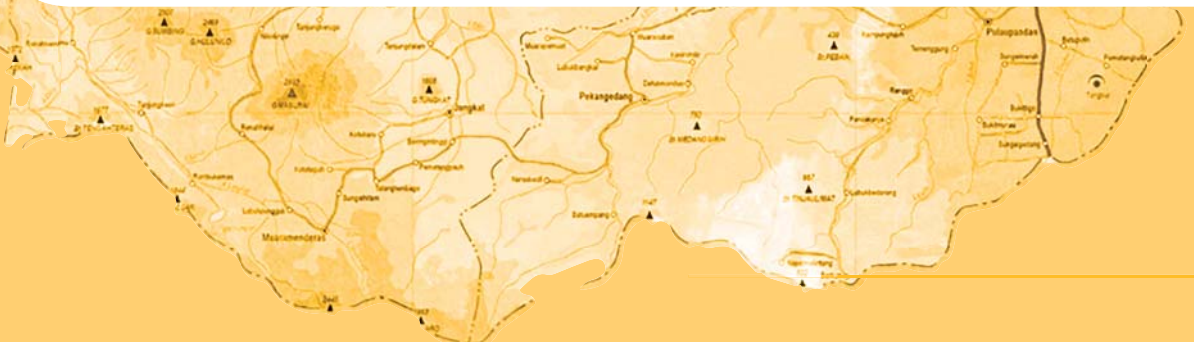
Melalui perencanaan yang baik, Jambi bukan hanya akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau namun juga bisa menjadi teladan bagi provinsi lain sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth Plan/GGP*) Jambi

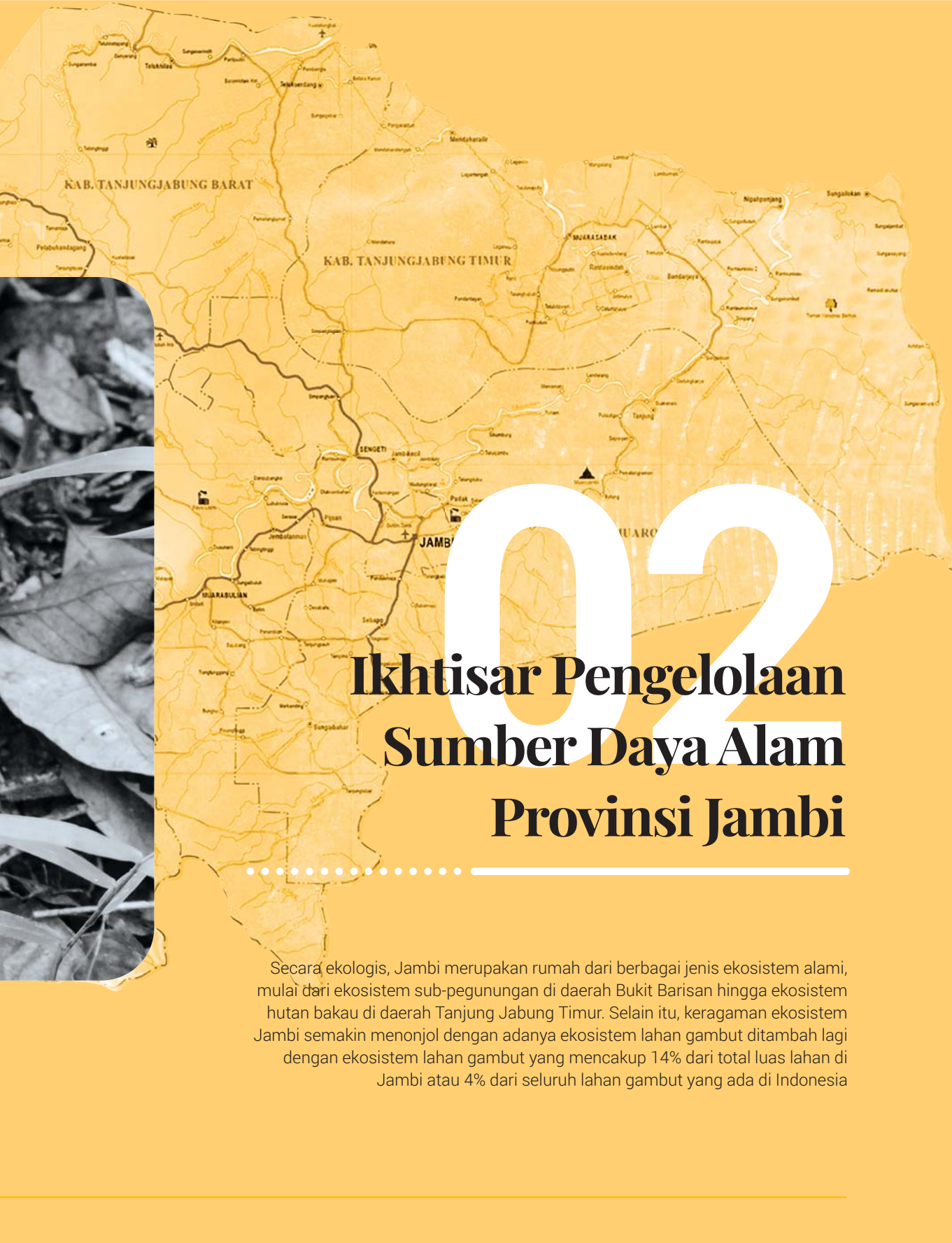
dilakukan melalui kajian iteratif terhadap beberapa skenario pembangunan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan lahan dari berbagai pemangku kepentingan, tatanan sosial, kebijakan alokasi lahan, kesesuaian lahan, manfaat ekonomi (skala regional, usaha, petani) maupun aspek lingkungan. Kajian yang komprehensif tersebut menghasilkan rencana tata guna lahan secara spasial, opsi praktik silvikultur yang ramah lingkungan untuk komoditas unggulan, peningkatan nilai produk maupun perbaikan pasar. Pada akhirnya, skenario pembangunan hijau ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan dampak lingkungan yang minimal (Gambar 1-1).





Gambar 1-1. Proses perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi





02

Ikhtisar Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi

Secara ekologis, Jambi merupakan rumah dari berbagai jenis ekosistem alami, mulai dari ekosistem sub-pegunungan di daerah Bukit Barisan hingga ekosistem hutan bakau di daerah Tanjung Jabung Timur. Selain itu, keragaman ekosistem Jambi semakin menonjol dengan adanya ekosistem lahan gambut ditambah lagi dengan ekosistem lahan gambut yang mencakup 14% dari total luas lahan di Jambi atau 4% dari seluruh lahan gambut yang ada di Indonesia

Bab 2

Ikhtisar Pengelolaan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi

2.1 Kondisi Alam dan Sosio-Ekonomi Jambi

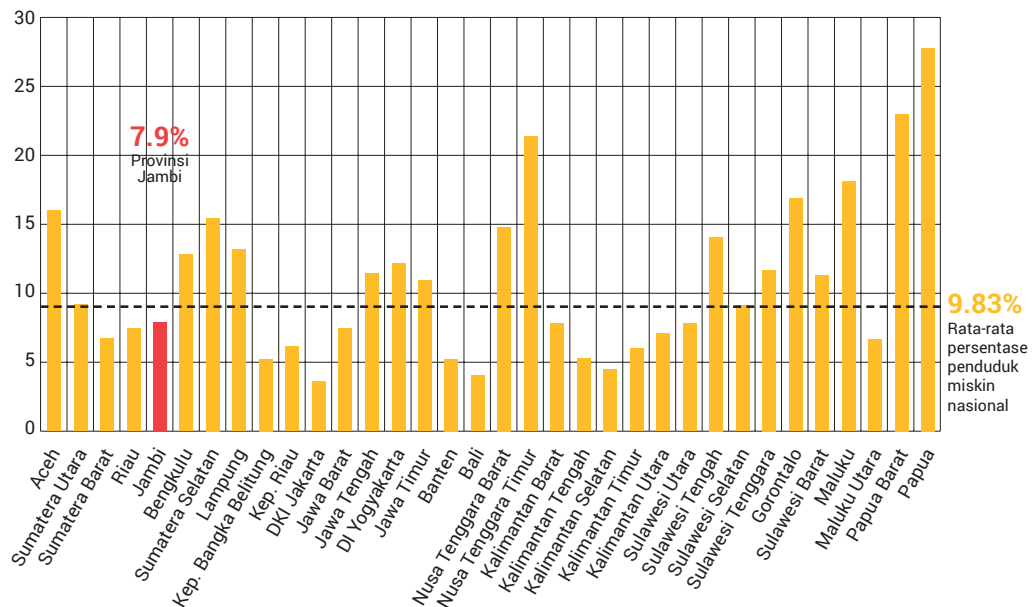
Provinsi Jambi seluas 5,3 juta hektar terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dan memiliki modal dasar pembangunan berupa sumber daya alam terbarukan yang menjanjikan, antara lain: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sekitar 29% dari PDRB Jambi di tahun 2017; (2) penggunaan lahan terluas di tahun 2016 adalah perkebunan kelapa sawit (>1 juta hektar); (3) produksi beras di Jambi selama beberapa tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional; (4) industri-industri yang mengolah bahan mentah hasil pertanian tumbuh dengan subur di Provinsi Jambi. Jambi, industri pengolah getah karet menyumbangkan lebih dari 70% PDRB sektor industri di tahun 2015; (5) komoditas bernilai ekspor dan penyokong ekonomi daerah, antara lain karet, hutan tanaman industri, padi, kelapa, kayu manis, kopi, dan pinang (*Arenga* sp.) memiliki kesesuaian lahan yang memadai pada berbagai lokasi di Jambi.

Secara ekologis, Jambi merupakan rumah dari berbagai jenis ekosistem alami, mulai dari ekosistem sub-pegunungan di daerah Bukit Barisan hingga ekosistem hutan bakau



di daerah Tanjung Jabung Timur. Hal ini masih ditambah lagi dengan ekosistem lahan gambut yang mencakup 14% dari total luas lahan di Jambi atau 4% dari seluruh lahan gambut yang ada di Indonesia (Peta FEG Nasional, 2017).

Dilihat dari indikator sosial-ekonomi, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi, yaitu 7,9% (BPS, 2018), berada cukup jauh dibawah persentase nasional yang mencapai 9,8% (Gambar 2-1). Bila



Gambar 2-1. Perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi dengan provinsi lain di Indonesia

dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Sumatera, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi berada di urutan tiga terbaik, setelah Sumatera Barat dan Riau. Dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM 69,9 pada tahun 2017; BPS, 2018) yang relatif tinggi, Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pembangunan berbasis sumber daya alam mampu menopang perbaikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kendatipun demikian, seluruh kemajuan yang dicapai oleh Provinsi Jambi bukanlah tanpa dampak negatif. Degradasi fungsi lingkungan di provinsi ini cukup tinggi dengan adanya kegiatan-kegiatan pembangunan alih guna lahan ekosistem alami yang mengakibatkan turunnya kuantitas dan kualitas jasa lingkungan. DAS Batanghari, DAS terbesar di Jambi, saat ini merupakan salah satu DAS paling kritis di Indonesia. Tingkat sedimentasi yang tinggi dan debit aliran sungai yang berfluktuasi menyebabkan berbagai bencana

lingkungan. Salah satunya adalah bahaya kekeringan dan banjir. Kondisi ini diperarah dengan insiden kebakaran hutan dan lahan yang beruntun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mencapai 115 ribu hektar (SiPongi, 2018).

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau perlu dilakukan melalui pemahaman menyeluruh tentang aktivitas pembangunan di Jambi beserta konsekuensinya terhadap fungsi lingkungan. Tentunya dengan maksud agar proses perencanaan dapat merumuskan strategi, intervensi, dan aktivitas pembangunan hijau yang tepat sasaran, efektif, dan memiliki dampak yang luas. Bab *Ikhtisar Sumber Daya Alam Provinsi Jambi* ini menguraikan dinamika pengelolaan sumber daya terbarukan serta berbagai konsekuensinya terhadap fungsi ekologis dan kualitas jasa lingkungan Jambi dalam 30 tahun terakhir.

2.2 Dinamika Penggunaan Lahan dan Fungsi Ekosistem

Keberhasilan aktivitas pembangunan di suatu wilayah yang ditopang oleh sumber daya alam terbarukan dapat diamati melalui analisis dinamika penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan di Provinsi Jambi sebagian besar dipicu oleh pembukaan lahan perkebunan seperti komoditas kelapa sawit dan karet. Ekspansi lahan perkebunan menunjukkan luasan paling besar dibandingkan perubahan lahan lainnya (Tabel 2-1). Deforestasi, atau perubahan alih fungsi hutan primer ke penggunaan lahan lain, menempati urutan kedua sebagai lahan yang paling banyak mengalami perubahan fungsi. Meskipun demikian, ekspansi lahan perkebunan dan deforestasi menunjukkan tren penurunan dari periode 2010-2015 ke periode 2015-2018. Sebaliknya, pada dua periode yang sama, degradasi dan ekspansi lahan pertanian menunjukkan peningkatan.

Perubahan lahan yang terjadi dapat diamati berdasarkan luasan masing-masing fungsi pada tahun 1990-2018. Kelas tutupan lahan diklasifikasikan menjadi 26 kelompok untuk mengetahui perubahan dan pergeseran tren yang terjadi selama 28 tahun terakhir (Tabel 2-2 dan Gambar 2-2). Selama periode tersebut, hutan primer merupakan kawasan yang paling banyak berubah tutupan lahannya menjadi hutan rawa sekunder dan hutan sekunder

kerapatan tinggi. Meskipun termasuk ke dalam kategori tutupan lahan terluas, luas area hutan primer terus mengalami penurunan secara konstan dari tahun ke tahun. Tipe tutupan lahan yang mengalami penyusutan terbesar dari tahun 1990 hingga tahun 2018 yaitu hutan sekunder kerapatan tinggi. Sebaliknya kelapa sawit mengalami penambahan luas paling signifikan mencapai 1,1 juta hektar sejak tahun 1990. Sama halnya dengan kelapa sawit, luas lahan karet juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, total penambahan luas lahan karet hanya setengahnya dari kenaikan luas kebun sawit. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan mengalami tekanan alih fungsi lahan paling besar. Lahan hutan cenderung dikonversi menjadi perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Dapat disimpulkan bahwa hutan mengalami tekanan alih fungsi lahan paling besar dan kecenderungan lahan dikonversi menjadi perkebunan terutama kelapa sawit dan karet.

Berdasarkan hasil analisis dinamika tutupan lahan, laju deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1990-2000 (Gambar 2-3). Sebagian besar lahan yang mengalami deforestasi atau sekitar 33% beralih fungsi menjadi perkebunan karet. Di samping itu, alih fungsi juga terjadi pada hutan primer yang sebagian besar beralih menjadi hutan rawa sekunder pada periode yang sama.

Pada periode 2000-2005, luas lahan yang mengalami deforestasi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Alih fungsi

Tabel 2-1. Luas alih fungsi lahan tahun 1990-2018 (ha)

	1990-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2018	Jumlah
Deforestasi	508.506	155.107	367.410	214.762	143.894	1.389.679
Degradasi	154.482	25.967	82.975	29.794	48.925	342.143
Ekspansi lahan perkebunan	639.836	321.828	464.087	491.664	459.563	2.376.978
Ekspansi lahan pertanian	146.651	52.349	22.385	31.473	46.470	299.328
Ekspansi agroforestri	268.014	163.244	221.517	221.663	155.980	1.030.418

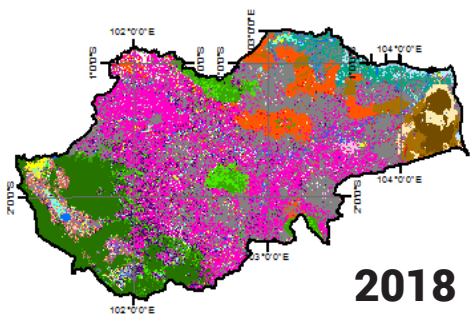
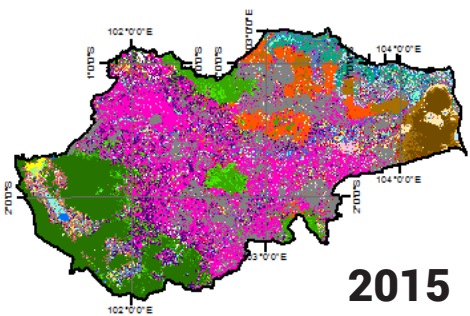
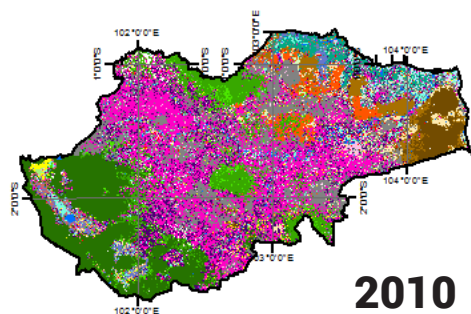
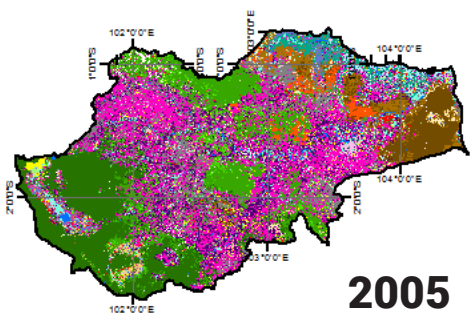
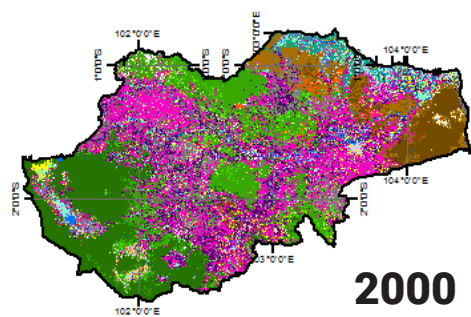
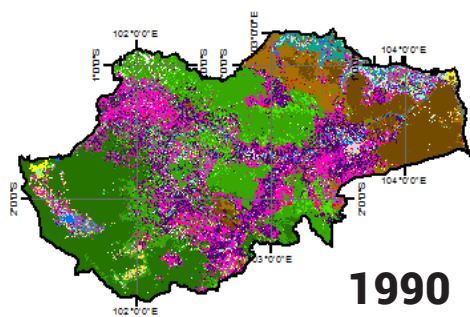
hutan primer menjadi hutan sekunder juga menurun cukup signifikan. Sama dengan periode sebelumnya, alih fungsi lahan masih dipicu oleh ekspansi perkebunan karet.

Pada periode 2005-2010, muncul tren alih fungsi lahan yang dipicu oleh kelapa sawit. Terjadi peningkatan luas lahan kelapa sawit yang cukup signifikan dari periode sebelumnya yaitu mencapai 85.938 ha. Pada periode selanjutnya (2010-2015), karet kembali muncul sebagai pemicu utama alih fungsi lahan, diikuti oleh kelapa sawit dan tanaman kayu industri. Walaupun alih fungsi lahan masih terjadi, laju degradasi lahan mengalami penurunan hingga 42%.

Sama seperti periode sebelumnya, laju degradasi lahan juga cenderung menurun sebesar 33% pada tahun 2015-2018. Pada periode ini luasan perkebunan karet justru menurun, sedangkan luas lahan semak belukar meningkat pesat menjadi 18.890 ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa cukup banyak lahan yang mulai ditinggalkan atau tidak difungsikan secara produktif. Meskipun secara historis luas deforestasi dan degradasi lahan setiap periode cenderung menurun, ekspansi perubahan lahan menjadi lahan perkebunan menunjukkan nilai yang relatif tinggi.

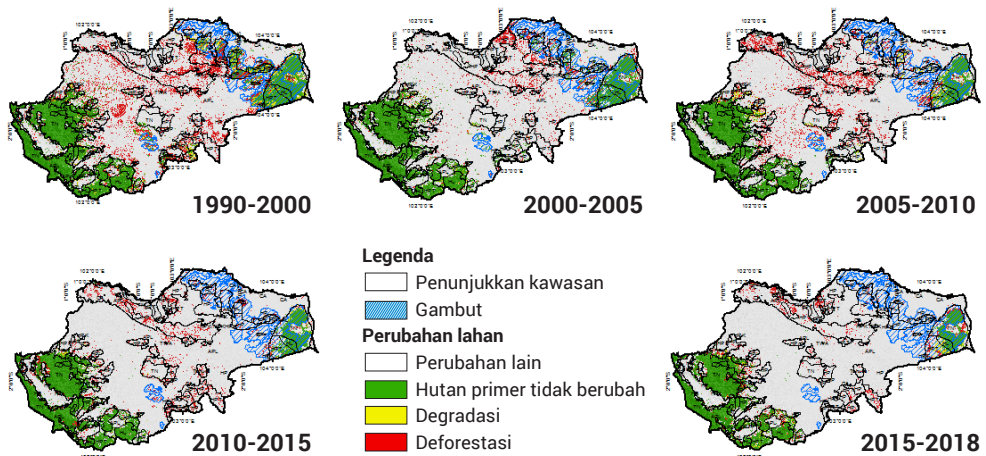
Tabel 2-2. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas tutupan lahan

No.	Kelas tutupan/penggunaan lahan	Luasan (Ha)					
		1990	2000	2005	2010	2015	2018
1	Hutan primer	958.510	810.478	768.965	711.218	656.749	606.759
2	Hutan sekunder kerapatan tinggi	975.363	742.492	661.292	427.929	278.989	173.974
3	Hutan sekunder kerapatan rendah	200.969	143.128	131.121	104.809	103.317	127.311
4	Hutan rawa primer	454.202	284.328	259.993	158.946	136.132	100.443
5	Hutan rawa sekunder	275.398	248.776	153.157	161.879	130.036	124.822
6	Hutan bakau primer	4.506	2.189	1.586	365	62	5
7	Hutan bakau sekunder	3.958	4.900	5.268	5.915	5.274	4.226
8	Tanaman kayu industri	0	32.134	81.426	132.828	229.304	290.387
9	Kebun campuran	36.912	51.150	24.550	29.462	62.468	69.483
10	Agroforestri kopi	31.967	49.498	61.852	80.166	56.451	51.332
11	Karet agroforestri	606.674	516.631	501.715	467.463	349.068	188.852
12	Karet	661.454	926.562	977.691	1.029.804	1.093.910	1.140.830
13	Kelapa sawit	184.022	414.971	542.303	798.367	1.037.059	1.313.681
14	Kayu manis agroforestri	16.862	24.773	28.199	40.492	75.735	80.189
15	Kayu manis	14.546	20.176	20.728	12.984	17.165	21.293
16	Kelapa agroforestri	68.100	80.963	97.258	112.788	119.133	127.957
17	Kelapa	27.322	43.676	43.891	46.435	50.249	43.085
18	Teh	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
19	Sawah	79.761	123.876	132.833	111.799	94.390	64.045
20	Tanaman semusim lain	48.296	117.147	89.761	55.343	48.682	45.217
21	Semak belukar	44.311	44.068	83.334	166.825	86.014	93.196
22	Rerumputan	5.250	21.309	18.892	36.253	27.328	2.326
23	Lahan terbuka	48.525	35.789	47.995	37.279	65.932	45.890
24	Pemukiman	27.006	34.887	40.089	44.551	50.434	58.501
25	Tambak	3	16	18	17	36	113
26	Tubuh air	58.476	58.476	58.476	58.476	58.476	58.476



Legenda

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ○ Tidak ada data | ● Kebun campur | ● Teh |
| ● Hutan lahan kering primer | ● Kopi agroforestri | ● Sawah |
| ● Hutan sekunder kerapatan tinggi | ● Karet agroforestri | ● Pertanian semusim lainnya |
| ● Hutan sekunder kerapatan rendah | ● Karet monokultur | ● Semak belukar |
| ● Hutan rawa primer | ● Kelapa sawit | ● Padang rumput |
| ● Hutan rawa sekunder | ● Kayumanis agroforestri | ● Lahan terbuka |
| ● Hutan mangrove primer | ● Kayumanis monokultur | ● Pemukiman |
| ● Hutan mangrove sekunder | ● Kelapa pinang agroforest | ● Tambak |
| ● Hutan tanaman | ● Kelapa dalam | ● Tubuh air |

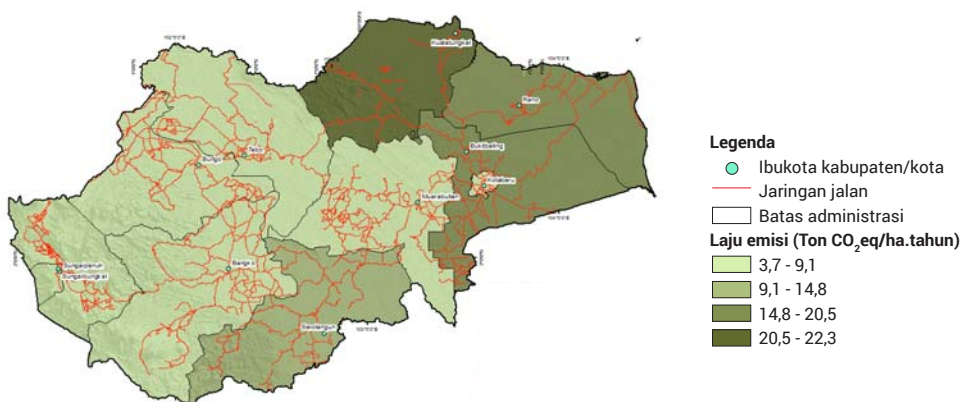


Gambar 2-2. Dinamika perubahan tutupan lahan hutan alam periode 1990-2018

2.3 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Alih fungsi lahan di Provinsi Jambi memberikan kontribusi terhadap produksi emisi gas rumah kaca. Untuk mengetahui besar dampak emisi yang dihasilkan, penghitungan dilakukan dengan metode *stock difference* dan dekomposisi dari gambut. Analisis difokuskan pada perubahan di sektor lahan yang terjadi pada tahun 1990-2018. Sebesar 76,1%, emisi bersumber dari tanah mineral sedangkan

sisanya berasal dari tanah gambut. Jika dilihat secara historis, emisi GRK paling tinggi nampak terjadi pada periode 1990-2000. Peta emisi dari sektor lahan selama jangka waktu 28 tahun (Gambar 2-4) menunjukkan bahwa kabupaten penghasil emisi terbesar secara kumulatif adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apabila dilihat hanya pada periode 2015-2018, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati urutan pertama penghasil emisi terbesar diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat.

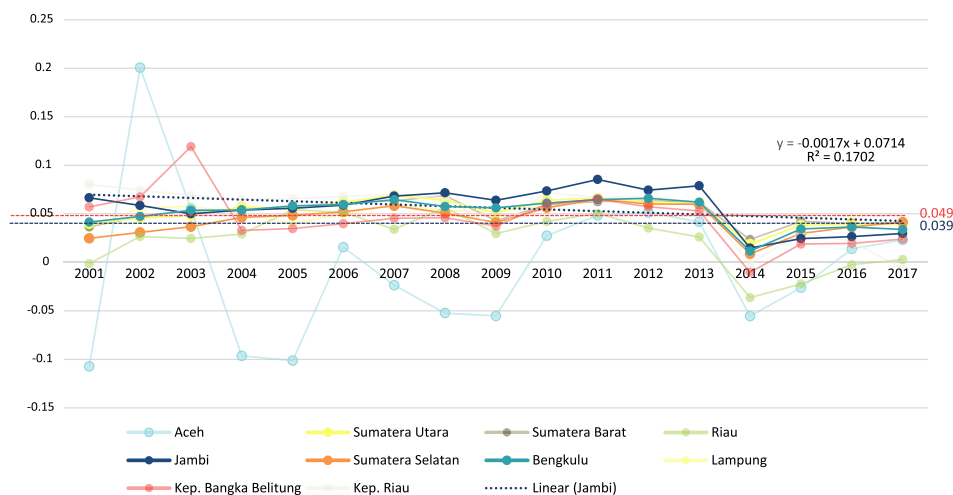


Gambar 2-3. Laju emisi gas rumah kaca dari sektor lahan tahun 1990-2018

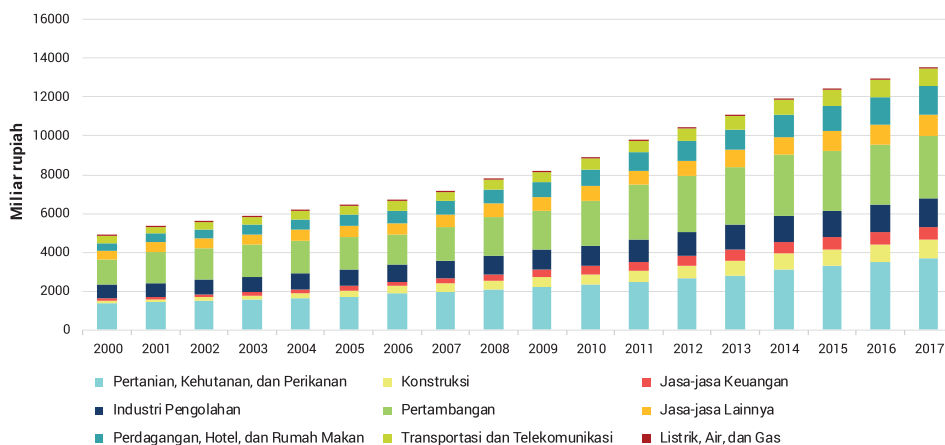
2.4 Ekonomi Regional dan Sektor Perekonomian Strategis

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Provinsi Jambi menempati peringkat kelima diantara seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Selama kurun waktu 2001-2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi

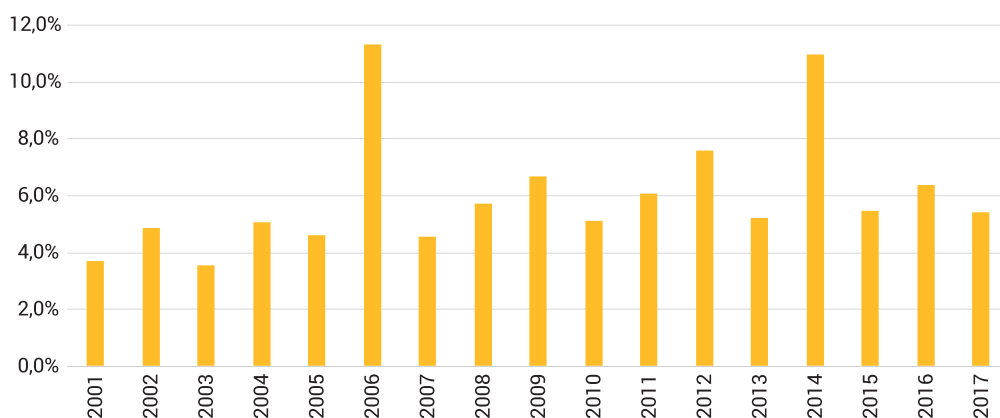
Provinsi Jambi yaitu 5,6%. Angka laju PDRB Provinsi Jambi berada di atas rata-rata Pulau Sumatera (3,9%) dan nasional (4,9%) seperti diilustrasikan pada Gambar 2-5. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tercatat sebagai yang tertinggi di Pulau Sumatera. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami stagnasi sampai tahun 2017 (2,9%).



Gambar 2-4. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi dan provinsi lainnya di Pulau Sumatera periode 2001-2017



Gambar 2-5. PDRB Provinsi Jambi berdasarkan sektor ekonomi periode 2001-2017



Gambar 2-6. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2001-2017

Berdasarkan data BPS tahun 2017, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Rata-rata kontribusi PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2001-2017 mencapai 27% (Gambar 2-6), diikuti oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan masing-masing sebesar 26% dan 12%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi lahan, memiliki laju pertumbuhan PDRB yang relatif fluktuatif dari waktu ke waktu (Gambar 2-7).

2.5 Komoditas Perkebunan Strategis

Luas perkebunan di Provinsi Jambi tercatat seluas 1.682.557 ha, dimana 1.348.305 ha (80,13%) merupakan perkebunan rakyat (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2016). Dari total luas perkebunan tersebut, sebagian besar merupakan perkebunan karet (49,34%), disusul oleh kelapa sawit (34,68%), kelapa dalam (8,79%), kayu manis (3,42%), kopi robusta (1,63%), dan pinang (1,53%) (Tabel 2-3).

Tabel 2-3. Luas area dan produksi komoditas perkebunan kunci tahun 2016

Komoditas	Luas area (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Lokasi
Karet	665.334	668.926	1,01	Merangin, Sarolangun, Batanghari
Kelapa sawit	476.413	1031.215	2,16	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Bungo
Kelapa dalam	118.543	104.528	0,88	Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur
Kayu manis	46.132	56.253	1,22	Kerinci, Merangin
Kopi robusta	24.575	13.434	0,55	Merangin
Kopi arabika	2.272	-	-	Kerinci
Pinang	20.694	12.594	0,61	Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat

RPJPD telah mencantumkan pengembangan industri hilir untuk komoditas agroindustri daerah, namun belum dilaksanakan secara optimal. Arah pembangunan lima tahunan keempat (2020-2025) salah satunya akan difokuskan pada penguatan sektor industri strategis melalui berbagai cara yaitu: (1) perluasan akses komoditas hasil industri pengolahan produk unggulan ke pasar regional, nasional, dan internasional; (2) pengembangan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada keunggulan daerah. Adapun dalam RPJMD terdapat dua sasaran yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas yaitu meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat serta meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan hutan. Dua komoditas perkebunan strategis yang sudah memiliki rencana induk yaitu Rencana Induk Karet tahun 2016 dan Rencana Induk Kopi tahun 2017.

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, dilakukan analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui spesialisasi komoditas di Provinsi Jambi terhadap produksi nasional (Kotak 2-1 dan Gambar 2-8). Hasil analisis menunjukkan komoditas yang merupakan sektor basis ($LQ > 1$) pada tahun 2014 adalah kayu manis, karet, dan pinang. Produksi kayu manis terbesar di Indonesia memang berasal dari Provinsi Jambi terutama Kabupaten Kerinci. Perubahan nilai LQ (ΔLQ) periode 2010-2014 pada komoditas kayu manis juga menunjukkan nilai yang positif.

Jika dilihat berdasarkan nilai LQ di berbagai kuadran, komoditas kayu manis merupakan satu-satunya komoditas yang berada di Kuadran I yaitu komoditas basis (*leading*) dan mengalami peningkatan tren produksi (*fast growing*). Pada Kuadran II terdapat beberapa komoditas dengan proporsi

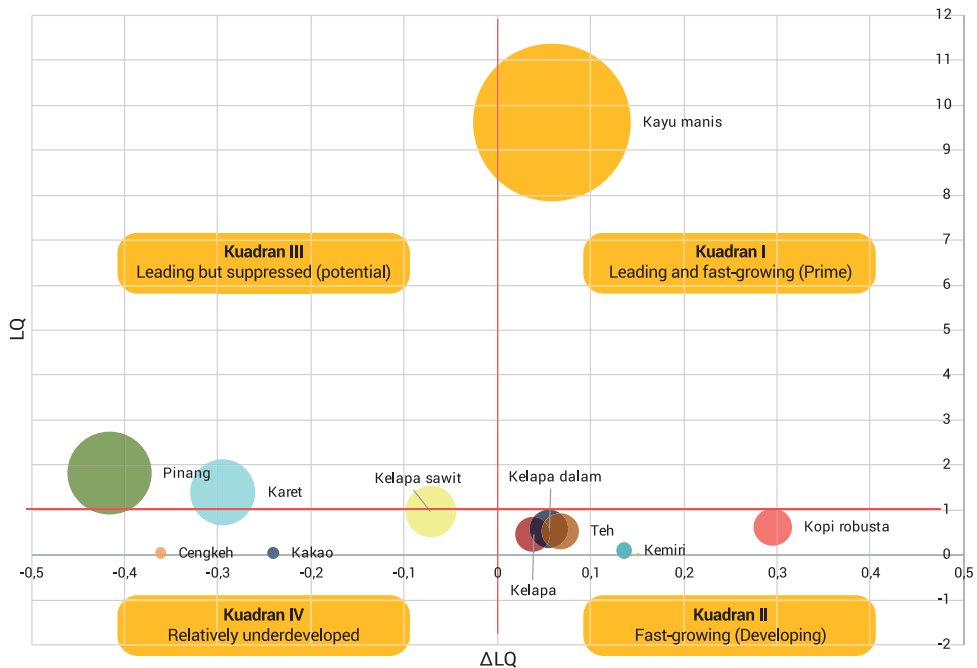
Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan model ekonomi pertanian sederhana untuk menerangkan arah dan pertumbuhan suatu sektor ekonomi yang menjadi pemicu pertumbuhan, menentukan sebaran komoditas, maupun melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya, dalam hal ini, potensi komoditas strategi sektor perkebunan.

Location Quotient (LQ) = (produksi komoditas perkebunan tertentu di Provinsi Jambi/total produksi sektor perkebunan Jambi)/(produksi komoditas perkebunan tertentu di tingkat nasional/total produksi sektor perkebunan nasional)

Nilai LQ yang diperoleh akan berada dalam kisaran lebih kecil atau sama dengan satu sampai lebih besar dari angka 1, atau $1 \geq LQ > 0$. Besaran nilai LQ menunjukkan besaran derajat spesialisasi atau konsentrasi dari komoditas tertentu di suatu wilayah (provinsi) relatif terhadap wilayah referensi (nasional). Artinya semakin besar nilai LQ di suatu wilayah semakin besar pula derajat konsentrasinya di wilayah tersebut.

Kotak 2-1. Location Quotient (LQ) dan perhitungannya

produksi terhadap nasional yang tidak terlalu besar namun menunjukkan pertumbuhan. Kopi robusta merupakan komoditas yang paling menonjol di kuadran ini. Kopi sendiri merupakan komoditas yang sedang diprioritaskan oleh Provinsi Jambi ditunjukkan dengan diterbitkannya Rencana Induk komoditas kopi. Produksi kopi di Provinsi Jambi termasuk yang paling lengkap karena mencakup jenis robusta, arabika, dan liberika. Beberapa jenis kopi telah memiliki sertifikasi

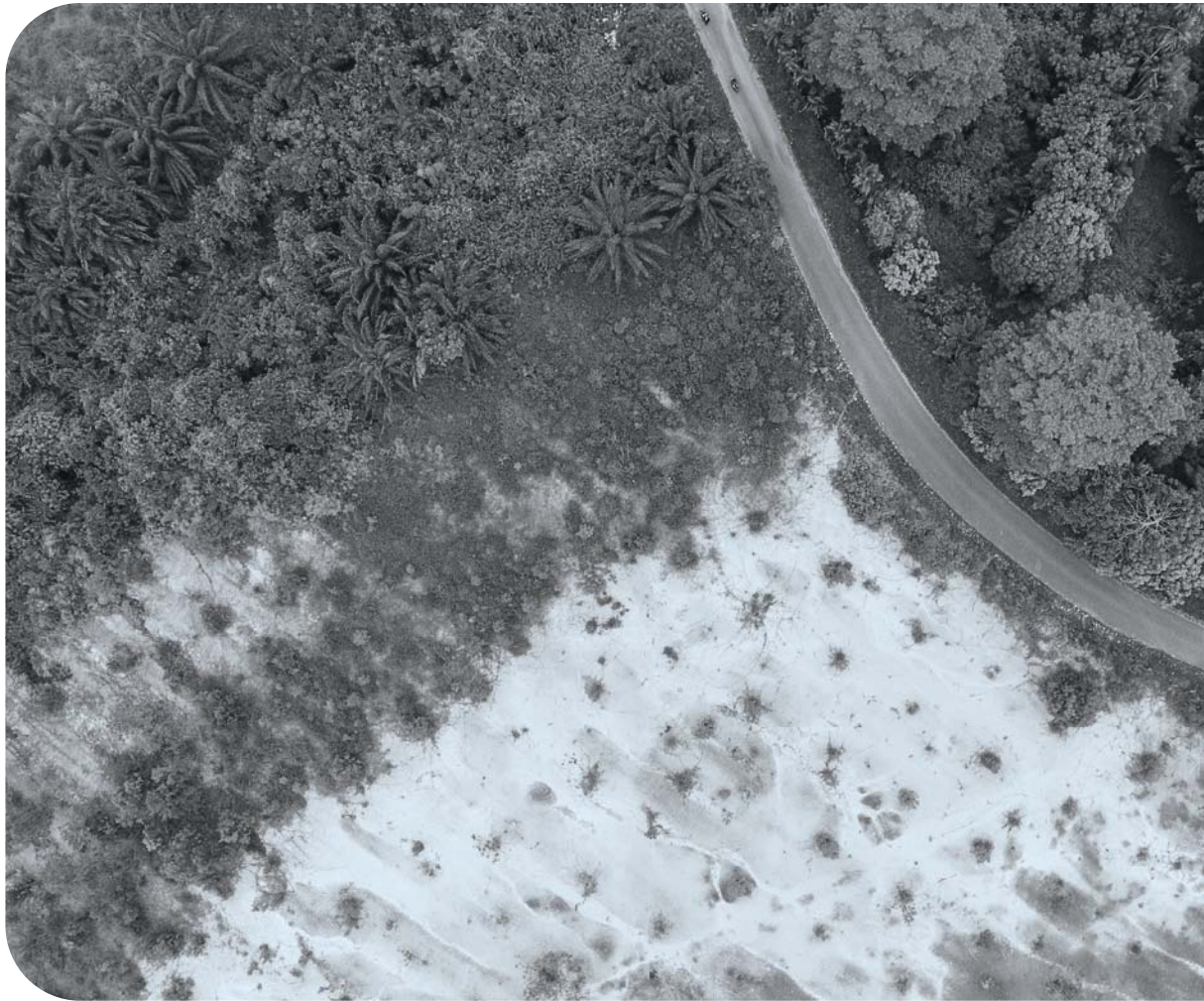


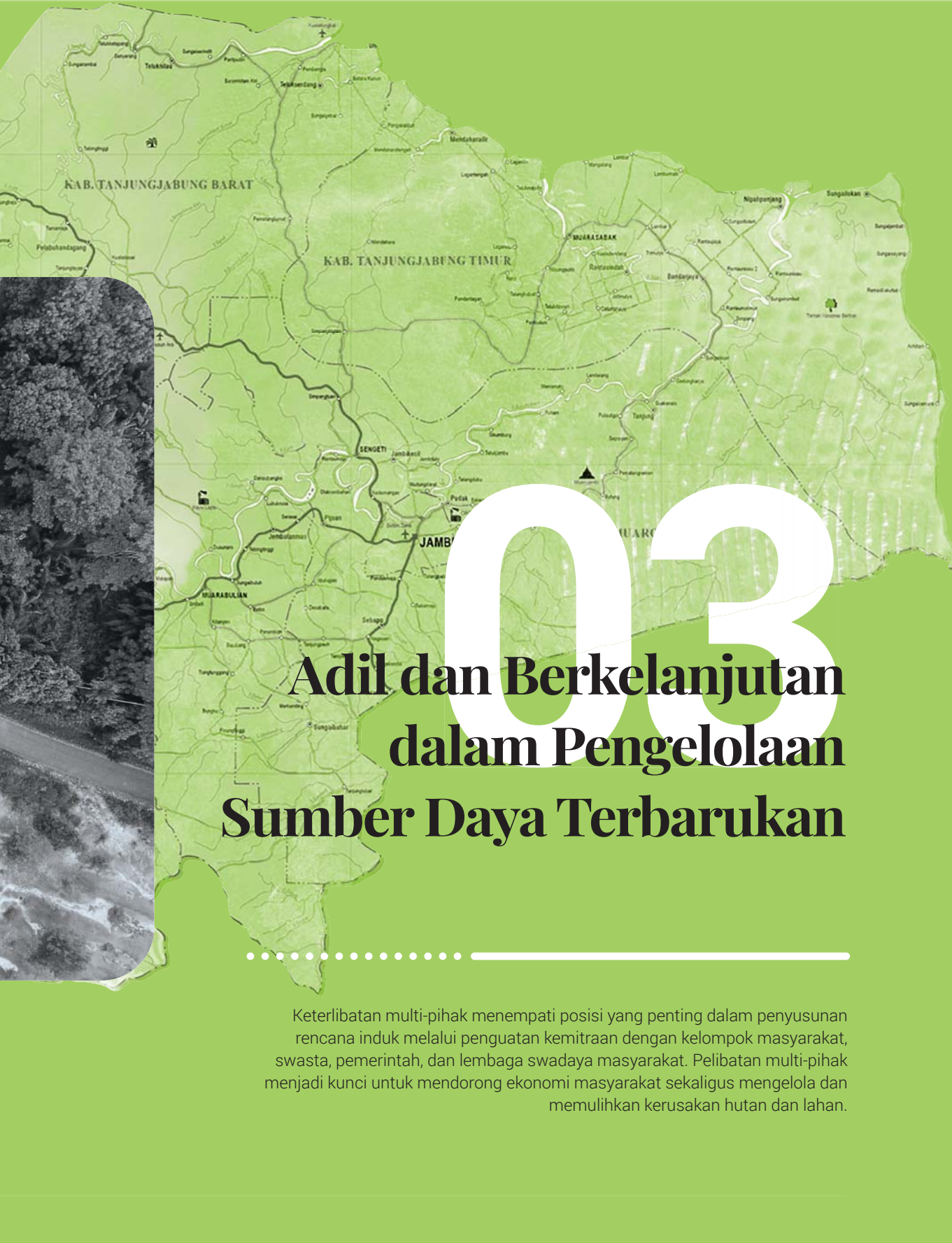
Gambar 2-7. Nilai LQ dan perubahannya di Provinsi Jambi tahun 2010-2014

indikasi geografis yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani kopi.

Komoditas-komoditas di Kuadran III seperti pinang dan karet membutuhkan perhatian khusus mengingat produksinya yang cukup tinggi namun pertumbuhannya bernilai negatif, padahal karet memiliki lahan perkebunan paling luas di Provinsi Jambi. Kelapa sawit menunjukkan posisi di antara kuadran III dan kuadran IV yang menandakan posisinya yang cukup memiliki nilai produksi di nasional meskipun masih di bawah angka 1. Pertumbuhan kelapa sawit juga negatif walaupun masih lebih

tinggi dibandingkan pinang dan karet. Rencana Induk Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2019 mencantumkan peremajaan kelapa sawit sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada. Kuadran IV menampilkan komoditas-komoditas yang bukan basis dan memiliki pertumbuhan rendah seperti cengkeh dan kakao. Komoditas-komoditas pada kuadran ini produksi relatifnya cukup kecil dan cenderung menurun sehingga dapat dikatakan perkembangannya terbatas (*underdeveloped*).





03

Adil dan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan

Keterlibatan multi-pihak menempati posisi yang penting dalam penyusunan rencana induk melalui penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat, swasta, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Pelibatan multi-pihak menjadi kunci untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus mengelola dan memulihkan kerusakan hutan dan lahan.

Bab 3

Adil dan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Terbarukan

3.1 Peluang dan Tantangan

1. Peluang

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dan kemitraan berbagai pihak untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Visi Jambi Tuntas 2021 telah menetapkan komitmen untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Komitmen ini juga ditunjang dengan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat/NGO. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan-peraturan daerah yang memungkinkan pengembangan ekonomi masyarakat secara strategis. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal yang menunjang pengembangan komoditas unggulan Provinsi Jambi untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya pembangunan industri hilir dari komoditas strategis yang ada di Provinsi Jambi. Perusahaan juga turut berkontribusi dalam pengembangan komoditas strategis.

Sebagai contoh, PT Kirana Megatara (PT Djambi Waras) menempatkan *Source Development* di masing-masing depo karet untuk memberikan asistensi teknis dan penerapan praktik pertanian yang baik dan benar (*good agricultural practice*) sehingga kualitas dan harga di petani lokal dapat meningkat. Inisiatif parapihak yang bekerja sama yaitu masyarakat, kelompok tani, NGO, LSM, dan perusahaan mulai bermunculan dalam pengembangan areal perhutanan



sosial di Provinsi Jambi. Beberapa dukungan yang diberikan oleh mitra pembangunan memberikan momentum yang baik untuk pengembangan komoditas strategis yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

2. | **Komoditas unggulan perkebunan sebagai salah satu sektor perekonomian strategis.**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,99% pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,64%, walaupun secara keseluruhan sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% (2018). Komoditas perkebunan di Provinsi Jambi merupakan salah satu sektor perekonomian strategis yang menyumbang 17,2% dari total PDRB provinsi atau setara dengan 26,3 triliun rupiah. Potensi ini juga menunjang lapangan pekerjaan bagi 649.959 kepala keluarga. Terdapat tujuh komoditas unggulan perkebunan yang tercantum di dalam dokumen Pembangunan Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2019 yaitu karet, kelapa

sawit, kelapa dalam, kopi, cassiavera, pinang, dan tebu. Secara umum, potensi bahan baku tersebar di kota maupun kabupaten Provinsi Jambi. Komoditas-komoditas ini memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing yang menjadi potensi bagi perekonomian wilayah dan masyarakat Jambi.

Karet merupakan komoditas dengan luas kebun terbesar di Provinsi Jambi yaitu 1.330.546 hektar pada tahun 2018. Produksi karet terus mengalami peningkatan dengan produktivitas rata-rata sebesar 1.7% per tahun selama periode 2010-2016. Beberapa perusahaan, salah satunya PT. Jambi Waras, sudah menerapkan sistem untuk meningkatkan daya kompetisi perusahaan dan harga di kalangan petani. Hal ini merupakan inovasi yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan petani. Selain karet, produk kelapa juga memiliki beberapa pabrik *Crude Coconut Oil* berbahan baku kopra (terdapat 4 perusahaan besar) yang beroperasi untuk keperluan ekspor. Produksi kelapa di Provinsi Jambi merupakan produksi perkebunan rakyat ketiga terbesar di Provinsi Jambi yaitu sebesar 104.528 ton per tahun pada tahun 2017. Produksi kelapa bulat dari Jambi memenuhi pasar domestik (Jakarta, Lampung, Batam) maupun ekspor (Thailand).

Komoditas unggulan berikutnya adalah kopi, mengingat Provinsi Jambi ditumbuhi oleh tiga jenis kopi sekaligus yaitu robusta, arabika, dan liberika. Bahkan salah satu jenis tanaman kopi, yaitu Liberika Tungkal Komposit atau Liberika Tungkal Jambi (Libtujam), merupakan varian yang berasal dari tanah gambut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Varietas ini ini tahan hama karat daun, serta dapat ditanam di dataran rendah, maupun lahan marginal seperti gambut. Jenis kopi robusta banyak ditanam di Merangin dan



Arabika di Kerinci. Kopi Libtujam Tanjabbar dan Arabika Kerinci sudah memiliki sertifikat indikasi geografis, sedangkan kopi Robusta Merangin masih dalam proses pengajuan indikasi geografis. Indikasi geografis juga dimiliki oleh komoditas kayu manis. Beberapa perkebunan kayu manis dikembangkan secara agroforestri dengan kopi.

3. | Lokasi strategis untuk pemasaran dan distribusi komoditas.

Provinsi Jambi memiliki lokasi yang cukup strategis karena memiliki wilayah administratif yang berbatasan langsung dengan laut. Potensi hasil laut dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur cukup strategis untuk dikembangkan. Selain hasil laut, lokasi yang berbatasan dengan laut memungkinkan pelabuhan distribusi untuk dikembangkan mengingat potensi komoditas Provinsi Jambi yang beragam dapat diuntungkan dengan keberadaan pelabuhan impor dan ekspor. Saat ini Provinsi Jambi memiliki pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak namun keterbatasan kapasitas dan lamanya waktu tunggu mengakibatkan pelabuhan ini masih belum dapat menunjang kebutuhan distribusi. Pemerintah provinsi bekerjasama dengan Pelindo II sedang membangun Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Jabung Timur sebagai kawasan strategis yang sudah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Jambi. Meskipun masih dalam proses, lokasi Provinsi Jambi saat ini masih cukup strategis untuk melakukan distribusi karena kedekatannya dengan Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan Bagan Siapi-api di Sumatera Selatan. Hingga sekarang, eksportir cenderung mendistribusikan barang melalui dua pelabuhan tersebut.

2. Tantangan

1. | Pengelolaan kawasan budidaya dan lindung yang tidak berimbang.

Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang beragam. Sayangnya potensi ini tidak diimbangi dengan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang berimbang. Pembukaan lahan yang masif menjadikan Jambi sebagai salah satu provinsi dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia. Deforestasi banyak terjadi karena adanya konversi lahan menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, praktik pertambangan ilegal masih banyak terjadi, tidak hanya merusak lingkungan namun juga menghasilkan korban jiwa karena tidak adanya prosedur keselamatan yang tersertifikasi. Pembukaan lahan perkebunan dan pertanian besar-besaran serta praktik pertambangan mengancam kualitas ekosistem.

2. | Masifnya bencana alam, termasuk kebakaran lahan dan hutan yang dipengaruhi oleh intervensi manusia terhadap alam.

Kebakaran merupakan salah satu kondisi yang perlu diantisipasi di Provinsi Jambi. Selain berdampak secara sosial-ekonomi, aspek lingkungan seperti stok karbon, dinamika vegetasi, emisi gas rumah kaca, dan perubahan penggunaan lahan juga dipengaruhi oleh kebakaran (Bond et al., 2005). Peningkatan frekuensi cuaca ekstrim dewasa ini meningkatkan risiko kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Kebakaran hutan di Provinsi Jambi terjadi setiap tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Kebakaran terbesar di Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2015 yang terjadi pada lahan seluas 19.528 ha. Selain kebakaran hutan, bencana banjir juga merupakan ancaman bagi masyarakat.

Hingga bulan April 2019, tercatat bencana banjir masih terjadi di beberapa titik. Banjir menjadi masalah yang semakin besar mengingat banyak lahan sawah di Provinsi Jambi yang gagal panen apabila terendam oleh banjir. Penyebab banjir salah satunya adalah pencemaran di Sungai Batanghari.

3. | Tumpang tindih area perizinan dan konflik penguasaan lahan.

Bencana alam yang terjadi di Provinsi Jambi tidak terlepas dari penurunan kualitas lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dan perubahan tata guna lahan. Persoalan lahan cukup kompleks mengingat alih fungsi lahan cukup masif terjadi. Hal ini diperparah dengan tumpang tindih area perizinan yang menyebabkan konflik penguasaan lahan. Sebagian besar area konsesi (kurang lebih 70%) HTI dan HPH sudah diokupasi oleh masyarakat. Di samping itu, area hutan produksi dan area penggunaan lain masih banyak yang belum memiliki kejelasan penanggung jawab. Sebagian besar kawasan hutan produksi yang terlantar menjadi tidak beraturan dan ditumbuhi semak belukar.

4. | Restorasi lahan, terutama bekas tambang, tidak berjalan dengan baik.

Harga batubara yang anjlok mengakibatkan banyaknya areal pertambangan ditinggalkan oleh pengusaha. Selain itu, pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan masyarakat juga meninggalkan lubang-lubang baik di sepanjang aliran sungai maupun area lainnya. Pengawasan maupun penindakan kawasan pertambangan ilegal maupun legal tanpa proses reklamasi pasca tambang masih sangat terbatas. Kondisi ini memperparah lahan yang tidak terurus dan teralokasikan dengan baik.

5. | Belum lengkapnya rencana induk perkebunan, termasuk alokasi lahan produktif, untuk komoditas strategis.

Perencanaan tata guna lahan tampak belum cukup mengatur alokasi lahan produktif. Rencana induk perkebunan hanya dimiliki oleh karet dan kopi sedangkan masih banyak komoditas strategis lainnya. Salah satunya adalah kelapa sawit yang berkembang masif di hampir semua wilayah. Perluasan ini perlu dikendalikan sehingga tidak merusak dan mengganggu lahan yang seharusnya dilindungi. Pengaturan yang minim pada lahan mengakibatkan konflik pada beberapa area seperti areal budidaya tanaman kopi di taman nasional. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat ini juga terjadi pada areal hutan lindung gambut. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum juga membuka peluang pelanggaran terhadap penguasaan lahan. Tidak hanya okupansi oleh masyarakat, konsesi perusahaan (sawit, hutan tanaman





industri) sebagian besar mengalami masalah lahan dan konflik dengan masyarakat.

Persoalan pemetaan ini juga terjadi pada lahan pertanian yang belum dilengkapi dengan peta kesesuaian lahan pertanian. Padahal budidaya padi merupakan sektor yang masih perlu untuk didorong mengingat produktivitasnya masih di bawah rata-rata nasional. Perluasan lahan pertanian, meskipun sudah didorong oleh pemerintah daerah melalui penegasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), masih membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur terutama irigasi. Budidaya padi alternatif seperti pada padi rawa/gambut masih belum banyak dilakukan meskipun sudah ada beberapa usaha untuk diterapkan.

6. | **Sistem pengembangan komoditas di sepanjang rantai nilai belum terkelola dengan baik.**

Lahan-lahan di Provinsi Jambi utamanya dikembangkan untuk penanaman komoditas strategis yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, terutama masyarakat. Namun sayangnya, penerapan sistem pengembangan komoditas seperti produktivitas, diversifikasi, dan rantai pasok

masih terkendala di lapangan. Kondisi perkebunan terutama karet dan sawit sudah berumur cukup tua sehingga dibutuhkan revitalisasi dan peremajaan. Produktivitas kelapa sawit yang mayoritas dikelola secara swadaya masih rendah, sehingga menyebabkan perusahaan sulit menerima hasil produksi dari kelapa sawit swadaya. Dilihat dari sisi SDM, masih banyak petani yang belum memperoleh pengetahuan terkait kualitas dan penanganan pasca panen.

Budidaya kayu manis juga masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan intensifikasi. Di sisi lain, komoditas kopi yang sudah tersertifikasi indikasi geografis belum cukup optimal memanfaatkan status tersebut. Manfaat sertifikasi ini juga masih dirasakan oleh sebagian pihak saja sehingga cenderung menimbulkan konflik kepemilikan indikasi geografis. Selain proses produksi, petani juga menemui permasalahan dalam mendistribusikan produknya. Salah satu contohnya yaitu dari sekitar empat puluh Unit Pengelolaan dan Pemasangan Bokar (UPPB) hanya enam belas yang aktif. UPPB cenderung dikuasai oleh pemilik modal atau toke sehingga merugikan petani karet. Saat ini potensi karet masih sebatas produksi untuk

memenuhi permintaan usaha kecil menengah (UKM) di Pulau Jawa. Untuk mengembangkan usaha turunan secara mandiri, kelompok tani menghadapi kendala modal usaha seperti alat mesin dan biaya produksi.

3.2 Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pada permulaan tahun 2019, Provinsi Jambi berkomitmen dalam penyusunan dokumen Pembangunan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi yang selanjutnya akan menjadi arah gerak pelaksanaan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Visi pertumbuhan ekonomi hijau dirancang selaras dengan enam misi yang diusung Provinsi Jambi.

Perekonomian masyarakat Jambi ditopang oleh sektor lahan seperti komoditas perkebunan, pertanian, dan tanaman pangan. Kestabilan kondisi lahan dan iklim merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa indikator ekonomi regional yang terdiri dari PDRB, *income*, dan *output* menunjukkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada periode proyeksi (2020-2045) jika dibandingkan dengan periode historisnya. Sumbangan sektor lahan sudah akan mencapai tahapan stagnan, dikarenakan daya dukung yang sudah semakin terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi pertumbuhan ekonomi hijau untuk menghadapi situasi di masa depan.

Dalam rangka mencapai visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dibutuhkan strategi dan rencana yang terintegrasi dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang provinsi, serta melibatkan seluruh pihak dalam proses dan pengawasannya. Capaian

pertumbuhan ekonomi hijau diselaraskan dengan visi yang ditetapkan secara nasional dan disesuaikan dengan konteks Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
2. Pertumbuhan inklusif dan merata
3. Ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
4. Ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan
5. Pengurangan emisi gas rumah kaca

3.3 Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau difokuskan pada komoditas berbasis kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Sektor-sektor lainnya seperti infrastruktur, industri, pertambangan, maupun jasa lainnya diikutsertakan untuk didorong sebagai kegiatan penunjang dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Keterlibatan multi-pihak menempati posisi yang penting dalam penyusunan rencana induk melalui penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat, swasta, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Pelibatan multi-pihak menjadi kunci untuk mendorong ekonomi masyarakat sekaligus mengelola dan memulihkan kerusakan hutan dan lahan. Analisis dititikberatkan pada sektor berbasis lahan termasuk melakukan penilaian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta perencanaan tata guna lahan.



04 Pendekatan Bentang Lahan dalam Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Secara ekologis, Jambi merupakan rumah dari berbagai jenis ekosistem alami, mulai dari ekosistem sub-pegunungan di daerah Bukit Barisan hingga ekosistem hutan bakau di daerah Tanjung Jabung Timur. Selain itu, keragaman ekosistem Jambi semakin menonjol dengan adanya ekosistem lahan gambut yang mencakup 14% dari total luas lahan di Jambi atau 4% dari seluruh lahan gambut yang ada di Indonesia.

Bab 4

Pendekatan Bentang Lahan dalam Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

4.1 Kerangka Teknis dan Perangkat Perencanaan

Penyusunan dokumen rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau berlandaskan pada tiga prinsip yaitu inklusif, integratif, dan berdasarkan pada data (*informed*). Prinsip pertama yaitu inklusivitas mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan dari beragam latar belakang untuk turut memberikan aspirasi, berdiskusi, dan menyepakati rencana ke depan. Melalui

pelibatan pihak-pihak ini diharapkan pandangan terhadap pengelolaan lahan dan tenurial dapat dihimpun untuk direncanakan secara lebih adil dan menyeluruh. Kedua adalah integratif yaitu upaya penyusunan rencana konservasi dan rencana tata guna lahan secara berkesinambungan untuk menghindari pendekatan yang terpisah (*silo*). Integrasi rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau dengan rencana tata ruang dan pembangunan adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang berkelanjutan.



INKLUSIF

Melibatkan para pemangku kepentingan dalam mendiskusikan aspirasinya dan menegosiasikan rencana yang akan disetujui bersama. Strategi dan intervensi mengetengahkan masyarakat, pengetahuan, dan konteks lokal



INTEGRATIF

Memadukan rencana pembangunan, konservasi dan tata ruang, kebijakan, serta proses untuk menghindari silo



INFORMED (berbasiskan informasi)

Proyeksi dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan dari skenario pertumbuhan hijau dimodelkan menggunakan data dan informasi yang akurat dan *up-to-date* sebagai dasar analisa *trade-off* dan dasar memilih skenario yang sesuai

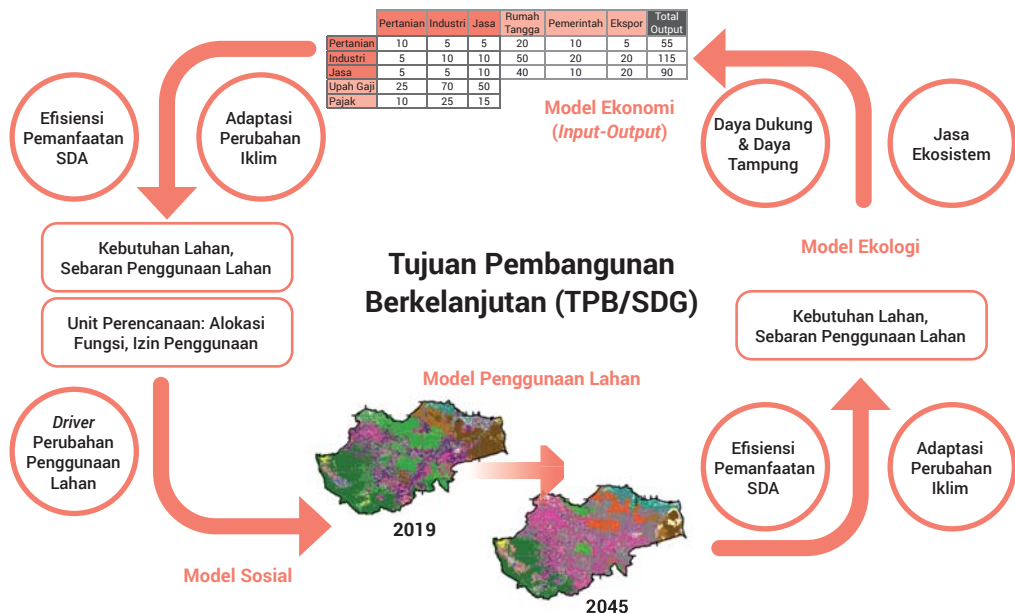
Gambar 4-1. Prinsip utama dalam penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau

Prinsip ketiga adalah mengutamakan penggunaan data yang sahih. Analisis yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini bersumber dari data, informasi, dan pemodelan yang berbasis bukti. Dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dianalisis secara *ex-ante* dan dimodelkan untuk kemudian menjadi dasar penyusunan rencana yang dinegosiasikan dengan parapihak di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder baik spasial maupun non-spasial yang dikategorikan berdasarkan tema yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta dokumen-dokumen kebijakan. Data yang digunakan dalam analisis lahan adalah peta penggunaan lahan multi-waktu yang dapat menggambarkan komoditas strategis Jambi, data cadangan karbon, keanekaragaman hayati, curah hujan, debit sungai, jenis tanah, kebakaran, dan emisi GRK.

Untuk mendapatkan analisis yang memadai sebagai basis penyusunan skenario rencana pertumbuhan ekonomi hijau maka

diperlukan beberapa proses analisis yang bersifat multidisiplin ilmu. Melalui proses ini diperoleh berbagai analisis komprehensif untuk dapat memperkirakan kondisi yang akan datang yang diharapkan dalam rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Skenario yang diturunkan menjadi berbagai strategi pertumbuhan ekonomi hijau berisikan berbagai rekomendasi yang terkait dengan permasalahan penggunaan lahan, sosial, ekonomi, dan ekologi.

Gambar 4-2 di bawah ini menunjukkan kerangka perencanaan dalam menyusun berbagai strategi rencana pertumbuhan ekonomi hijau dimana aspek alokasi tata guna lahan, berbagai praktik/program pembangunan, kebijakan ekonomi dan finansial dapat pertimbangan dan diperkirakan dampaknya terhadap berbagai indikator rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Model analisis ini terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem analisis yang terintegrasi.



Gambar 4-2. Kerangka analisis dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau

4.2 Alur Kerja

Perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau melalui lima tahapan utama yaitu (1) pelibatan pemangku kepentingan dan pembentukan kemitraan, (2) penyusunan skenario *business-as-usual* (BAU), (3) pembentukan kesepakatan tujuan pertumbuhan ekonomi hijau, (4) penyusunan skenario pertumbuhan ekonomi hijau dan analisis *ex-ante*, (5) dan penyusunan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau. Proses yang dilakukan berpegang pada 3 prinsip utama yaitu inklusif, integratif, dan berbasis data dan informasi yang sah. Analisis teknis untuk mengelola data dan melakukan simulasi rencana pembangunan dimasa yang akan datang menggunakan LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*) yang dapat mengakomodasi analisis spasial, pemodelan ekologi dan ekonomi, serta menjalankan proyeksi skenario pembangunan untuk memperoleh gambaran *ex-ante*.

Pelibatan pemangku kepentingan dan pembentukan kemitraan merupakan tahapan yang memastikan dokumen ini memuat aspirasi semua pihak. Proses ini difasilitasi melalui sesi tukar pendapat, lokakarya, dan *forum group discussion* (FDG). Kolaborasi berhasil dibangun diantara jajaran Organisasi Perangkat daerah (OPD), pihak swasta yang diwakili oleh para pengurus dan perusahaan anggota APHI, GAPKI, dan GAPKINDO), dan beberapa lembaga swadaya representasi parapihak. Hubungan yang baik diantara pemangku kepentingan memungkinkan terhimpunnya data dan informasi yang dibutuhkan serta terbentuknya kesepakatan.

Penyusunan skenario *business-as-usual* (BAU) dilakukan untuk mendapatkan rumusan kondisi saat ini dan proyeksi kondisi dimasa yang akan datang dengan memperhatikan

apa yang terjadi saat ini dan rencana pembangunan/kegiatan parapihak dimasa depan yang terdiri dari rencana pembangunan pemerintah dan rencana kegiatan para pengguna lahan yang ada di Provinsi Jambi. Skenario ini dibangun berdasarkan data dan informasi pembangunan dari berbagai dokumen dan informasi langsung parapihak. Pada tahap ini juga didapatkan informasi berbagai kegiatan yang bersifat multisektoral yang membentuk kesatuan ekonomi wilayah.

Pembentukan kesepakatan tujuan pertumbuhan ekonomi hijau dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan apa yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang. Pembentukan kesepakatan ini didasarkan pada tujuan pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJPD, RTRW, serta RPJMD dan juga berdasarkan himpunan pendapat parapihak secara partisipatif. Sebagai sebuah rujukan rencana pembangunan dimasa yang akan datang diharapkan rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini mengandung unsur kebaruan sebagai ide dan gagasan parapihak yang melampaui proses perencanaan pembangunan formal yang secara prosedural biasa dilakukan.

Penyusunan skenario rencana pertumbuhan ekonomi hijau dilakukan melalui tahapan identifikasi berbagai masalah strategis pembangunan, penyusunan capaian dambaan, analisis ketersediaan dan kebutuhan lahan (*land demand analysis*), kesepakatan target capaian indikator makro rencana pertumbuhan ekonomi hijau, dan penyusunan strategi rencana pertumbuhan ekonomi hijau serta rencana intervensi. Proses iteratif ini dilakukan juga untuk membuat analisis *ex-ante* sehingga mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi hijau yang dinilai dari indikator makro pembangunan.

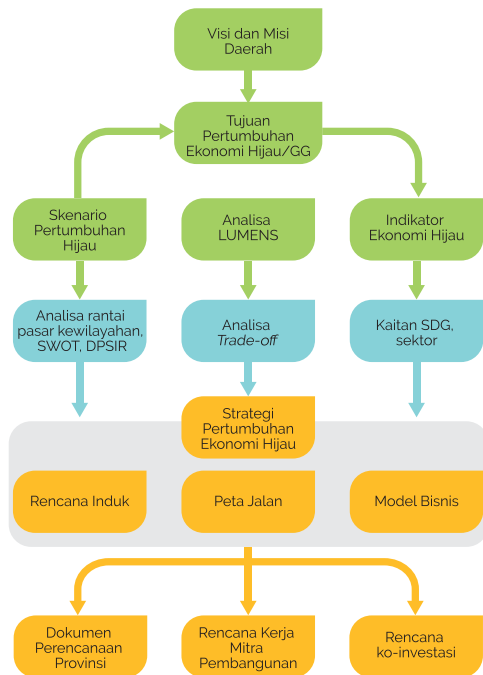
Penyusunan skenario terus mengalami revisi sehingga mendapatkan capaian indikator makro yang bersesuaian dengan target yang telah disepakati. Untuk menggambarkan skenario rencana pertumbuhan ekonomi hijau secara lebih konkret, strategi pertumbuhan ekonomi hijau disusun secara *spatially explicit*. Hal ini memungkinkan lokasi, distribusi, dan aspek kuantitas lain dari strategi tersebut dapat dianalisis lebih lanjut.

Peta jalan rencana pertumbuhan hijau merupakan penerjemahan lebih lanjut dari rencana intervensi yang telah dihasilkan. Penyusunan peta jalan diawali dari penyusunan berbagai aktivitas pembangunan yang dapat dilaksanakan pada setiap rencana intervensi. Kemudian setiap aktivitas tersebut dilengkapi dengan berbagai keterangan untuk

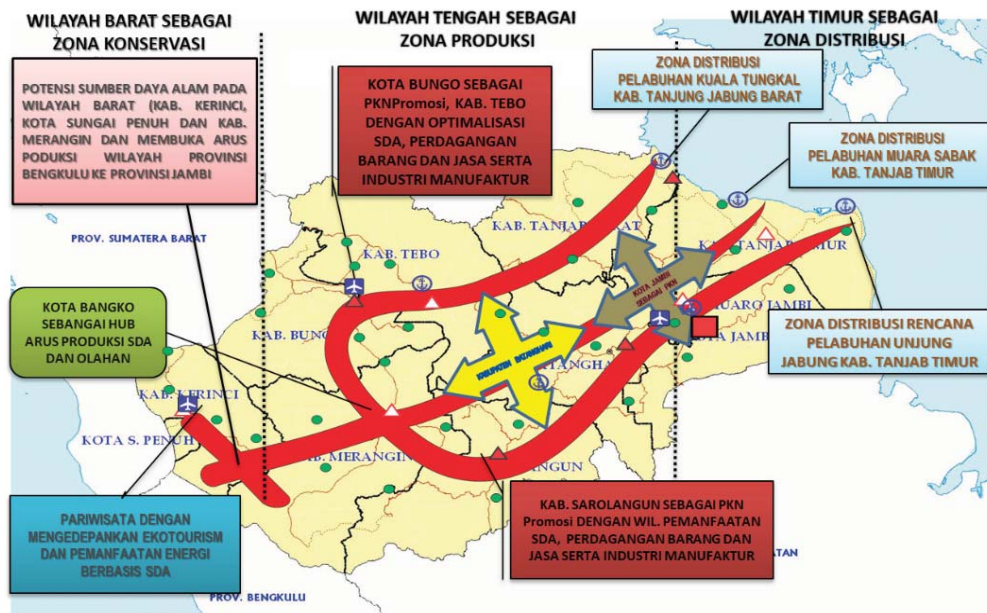
mempermudah proses pengarusutamaan oleh parapihak. Peta jalan rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi terkait distribusi kewenangan, identifikasi sumber pendanaan, pelaksana/pihak yang mengambil peran dalam aktivitas, dan tata urutan berdasarkan perkiraan alokasi waktu/tahapan kegiatan.

4.3 Pendekatan Zona Pembangunan

Proses pelibatan multi-pihak yang inklusif diupayakan melalui pengumpulan aspirasi dari beberapa perwakilan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Tebo, dan Kerinci. Masing-masing merupakan perwakilan dari Zona Timur sebagai kawasan distribusi, Zona Tengah sebagai kawasan produksi, dan Zona Barat sebagai kawasan konservasi. Tujuan dari proses ini adalah (1) menyampaikan konsep dan kerangka kerja penyusunan dokumen dan peta jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau; (2) identifikasi keterkaitan visi dan misi masing-masing daerah yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi, program dan kegiatan yang relevan serta pelaku, tantangan dan kesempatan; (3) identifikasi komoditi unggul, rantai nilai area hulu hingga hilir dan opsi intervensi; (4) identifikasi konteks kewilayahan: keragaman antar kabupaten, kekhususan, infrastruktur, keterhubungan antar wilayah serta keterhubungan dengan area lainnya. Melalui proses ini diperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen mencakup kebutuhan dari keseluruhan wilayah Provinsi Jambi.



Gambar 4-3. Alur kerja penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau



Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Jambi

Gambar 4-4. Zonasi wilayah Provinsi Jambi

Secara umum, tiga zona tersebut memiliki karakteristik regional yang berbeda. Zona hilir yang terdiri dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Kota Jambi merupakan daerah hilir yang diarahkan sebagai sentra distribusi produk menuju daerah lain dalam skala nasional maupun internasional. Titik distribusi terdiri dari Pelabuhan Kuala Tungkal, Muara Sabak, dan Ujung Jabung.

Zona tengah yang terdiri dari Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tebo, dan Bungo berada di daerah yang merupakan daerah dengan tujuan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermukim di daerah bertopografi datar hingga berbukit. Arahan untuk mengembangkan zona tengah, yaitu untuk penggunaan sumber daya alam, perdagangan dan jasa, dan industri manufaktur.

Zona hulu yang terdiri dari Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Sungai Penuh merupakan daerah lereng tinggi dengan jangkauan penggunaan lahan yang lebih terbatas. Zona ini diarahkan untuk membuka aliran produksi dari Bengkulu ke Provinsi Jambi, serta pengembangan pariwisata dengan mempromosikan ekowisata dan penggunaan energi berbasis sumber daya alam.

Kegiatan di tingkat kabupaten mengeksplorasi banyak strategi pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan. Pengenalan konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendapatkan sambutan positif dari para pemangku kepentingan kabupaten yang dilibatkan dalam *roadshow*. Dalam pertemuan ini didapatkan sejumlah masukan yang penting dalam penyusunan dokumen dan



Gambar 4-5. Proses membangun inklusivitas dengan parapihak di tingkat lokal

peta jalan. Beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh pemangku kepentingan menunjukkan sensitivitas terhadap keunikan kondisi daerahnya masing-masing. Banyak kebutuhan wilayah untuk membuat intervensi

pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan, terutama dalam arah pembangunan berkelanjutan.

Juli-Agustus 2018

Diskusi, interview dan pengumpulan data primer (*groundcheck*) dan sekunder



Agustus 2018

Kickoff meeting



September 2018

Lokakarya skenario pembangunan daerah dan identifikasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi



Oktober 2018

Konsultasi publik dengan anggota APHI



Oktober 2018

Konsultasi publik dengan anggota GAPKI-Jambi



Oktober 2018

Konsultasi publik dengan anggota GAPKINDO



April – Mei 2019

Analisis dan proses penyusunan peta jalan



Mei 2019

Diskusi dan penulisan draft dokumen



April 2019

Lokakarya penyusunan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi



Februari 2019

Lokakarya Strategi Pembangunan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi



Desember 2018

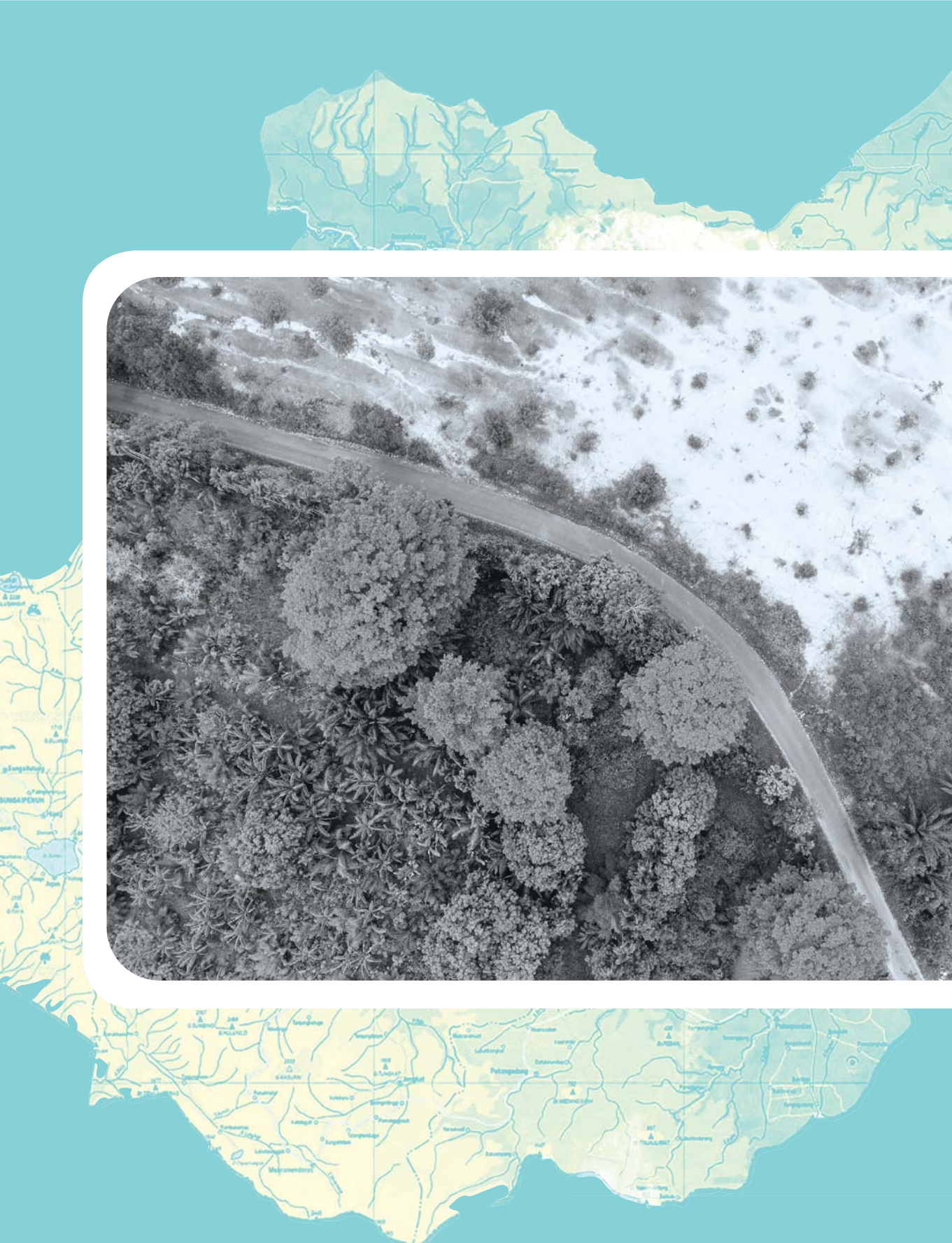
Proses pengumpulan data, interview, FGD dengan kabupaten/kota



November 2018

Lokakarya penentuan target capaian pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi







05 Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

.....

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan kerangka kerja yang holistik, integratif, tematik serta diterjemahkan secara spasial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, sekaligus mencegah degradasi ekologi yang tidak diinginkan serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali.

Bab 5

Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau merupakan kerangka kerja yang holistik, integratif, tematik serta diterjemahkan secara spasial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, sekaligus mencegah degradasi ekologi yang tidak diinginkan serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau disusun dengan berpijak pada visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi: Tertib Unggul Nyaman Adil dan Sejahtera. Visi yang luhur tersebut kemudian dikembangkan lebih jauh lagi melalui proses yang inklusif dan integratif serta ditopang oleh analisis teknis berbasis data yang shahih untuk diterjemahkan sebagai strategi, intervensi dan aktivitas pembangunan hijau yang sesuai

dengan kondisi bentang lahan, sosial dan ekonomi Provinsi Jambi. Bab ini menguraikan secara terperinci keenam butir strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi beserta capaian-capaian dambaan di masing-masing strategi. Manfaat dan dampak dari penerapan strategi-strategi tersebut dituangkan dalam berbagai indikator makro yang dihasilkan lewat rangkaian analisis teknis yang berbasis pada hasil-hasil penelitian terkini di bidang biofisik, sosial, dan ekonomi. Bab ini ditutup dengan uraian terperinci terhadap bentuk-bentuk intervensi di masing-masing butir strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi.

5.1 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Keseluruhan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau dituangkan dalam tiga strategi yang menitikberatkan pada tujuh komoditas unggulan Provinsi Jambi, yaitu karet, kelapa sawit, kopi, kayu manis, kelapa, pinang, dan beras. Masing-masing strategi kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk intervensi yang bersifat tematik dan disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi Provinsi Jambi. Setiap intervensi diuraikan lebih lanjut menjadi rangkaian aktivitas yang mencakup keseluruhan proses implementasi pertumbuhan ekonomi hijau. Tiga butir strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi adalah:

1. Tata guna, Pemulihan, dan Peningkatan Produktivitas Lahan Berkelanjutan



1. | Tata guna lahan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ditopang hampir seluruhnya oleh sektor ekonomi berbasis lahan. Tanpa ada perencanaan yang baik, kecenderungan pemanfaatan lahan secara tidak terkendali akan menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu perencanaan tata guna lahan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan lahan dan ketersediaan lahan merupakan salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Kebutuhan akan lahan untuk fungsi budidaya perlu diseimbangkan dengan kebutuhan akan fungsi perlindungan ekologis bentang lahan. Lebih jauh lagi, fungsi budidaya perlu dialokasikan secara tepat sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan dapat memberikan hasil dan

manfaat yang optimal. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara mengalokasikan pembangunan sumber daya alam terbarukan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kesesuaian biofisik, sosial, dan ekonomi yang tepat. Alokasi lahan yang keliru akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal, dalam hal ini contohnya adalah produksi komoditas pertanian yang jauh dari harapan. Di sisi lain, areal perlindungan dan konservasi yang ada di Provinsi Jambi perlu dipertahankan keutuhannya, disamping juga perlu adanya pemulihan terhadap areal-areal dengan fungsi lindung yang saat ini sudah terdegradasi. Keseluruhan intervensi tata guna lahan yang dibutuhkan oleh Provinsi Jambi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi hijau dituangkan dalam Strategi-1 yaitu Alokasi Tata Guna Lahan Berkelanjutan sebagai Penyelesaian antara Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan.

2. | Pemulihan lahan

Tanpa dapat dipungkiri bahwa aktivitas-aktivitas pembangunan masa lalu di Provinsi Jambi sudah terlanjur menimbulkan degradasi ekologi dalam berbagai bentuk. Deforestasi, kebakaran hutan, pengeringan lahan gambut, pencemaran sungai, dan berkurangnya keanekaragaman hayati adalah bentuk-bentuk degradasi ekologi yang terlihat jelas di Provinsi Jambi. Degradasi tersebut, terlebih lagi yang terjadi di areal-areal dengan fungsi lindung, perlu segera dipulihkan melalui upaya restorasi bentang lahan yang tepat. Restorasi adalah sebuah proses panjang yang mengupayakan pemulihan kembali fungsi bentang lahan sesuai bentuk dan kondisi semula. Butir keenam dalam strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi ini mengupayakan pulihnya fungsi hutan dan lahan sesuai dengan alokasinya pada suatu area. Strategi ini tidak terbatas pada restorasi ekologis hutan untuk mengembalikan suatu

area menjadi hutan alam kembali, tetapi juga mencakup revitalisasi penghidupan. Restorasi berpotensi menyumbang peningkatan ketersediaan lahan untuk memenuhi berbagai kesenjangan dalam kebutuhan lahan. Selain itu, restorasi untuk mengembalikan fungsi akan meningkatkan ketahanan lingkungan. Lebih jauh lagi, upaya restorasi yang menyeluruh pada akhirnya akan mampu mencegah terjadinya degradasi lanjutan di masa yang akan datang.

3. | Peningkatan produktivitas

Bagi sebuah daerah yang bertumpu pada sumber daya alam terbarukan, tingkat produksi sektor-sektor berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan adalah tiang utama pertumbuhan ekonomi. Melalui penerapan teknologi dan teknik budidaya yang tepat, jumlah produksi per-unit lahan di Provinsi Jambi dapat mencapai tingkat yang optimal sehingga pertumbuhan tidak harus selalu diterjemahkan sebagai penambahan areal komoditas atau ekstensifikasi. Bagi daerah yang sedang berkembang namun memiliki keterbatasan sumberdaya, peningkatan produksi per-unit lahan yang dipicu lewat teknologi adalah sebuah langkah yang tepat dibandingkan peningkatan produksi yang dipicu lewat permintaan pasar. Teknologi dan teknik budidaya yang sesuai dengan konteks lokal bukan saja akan menghasilkan peningkatan produksi namun juga akan mengantarkan pada proses belajar dan pemahaman yang bermuara pada keberlanjutan. Namun demikian, peningkatan produksi bukan satu-satunya jalan untuk menjamin nilai manfaat yang tinggi untuk bentang lahan di Provinsi Jambi. Diversifikasi komoditas adalah sebuah langkah yang perlu diambil untuk menghindari ketergantungan berlebih terhadap beberapa komoditas yang saat ini memiliki nilai ekonomi tinggi.

Diversifikasi akan mengurangi kerentanan aktivitas budidaya terhadap faktor-faktor penentu pasar seperti harga dan investasi. Lebih jauh dari itu, peningkatan produksi dan diversifikasi komoditas akan menjadi lengkap dengan adanya perbaikan rantai pasar dan rantai nilai komoditas secara berkelanjutan. Rantai pasar yang baik menjamin pembagian manfaat yang adil antara petani, perantara, dan industri. Sedangkan rantai nilai yang tepat akan berujung pada meningkatnya nilai tambah komoditas melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan pasar. Rantai pasar dan rantai nilai yang lebih baik pada akhirnya akan menghasilkan efek pengganda yang besar terhadap keseluruhan roda perekonomian Provinsi Jambi.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan melalui Peningkatan Akses Terhadap Modal Pembangunan dan Penghidupan (*Livelihood Capitals*) serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan



Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembangunan adalah sebuah syarat mutlak untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam upaya pembangunan, masyarakat membutuhkan akses yang memadai terhadap lima bentuk modal penghidupan (*livelihood capital*) yaitu modal alam, modal sosial, modal finansial, modal fisik, dan modal sumber daya manusia. Tingkat ketahanan penghidupan (*livelihood resilience*) di sebuah wilayah akan bergantung sepenuhnya pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam memastikan keberadaan dan keberlangsungan kelima modal penghidupan tersebut. Hilang atau berkurangnya akses terhadap salah satu dari modal penghidupan,

bukan saja akan menurunkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial yang dipicu oleh ketimpangan pembangunan. Butir kedua dalam Strategi Perumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi ini menguraikan berbagai bentuk intervensi yang diperlukan oleh Provinsi Jambi untuk memastikan akses terhadap kelima modal penghidupan saat ini dan di masa yang akan datang.

Mekanisme insentif dan disinsentif, serta pendanaan inovatif jasa lingkungan sangat potensial dalam mendukung capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam menjamin keberlanjutan investasi finansial dan non-finansial untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan dan menjaga kualitas lingkungan, serta menyediakan jasa lingkungan. Mekanisme ini sebenarnya sudah dicanangkan dalam UU 23/2009 akan tetapi sampai saat ini implementasinya masih sangat terbatas pada skala lokal atau percontohan. Demikian juga program global pemberian insentif bagi penurunan emisi GRK yang telah direncanakan sebagai program REDD+ sampai saat ini belum aktif. Strategi ini merupakan strategi inovatif untuk Provinsi Jambi karena mekanisme insentif dan pendanaan jasa lingkungan pada skala provinsi dikaitkan dengan intervensi integratif Pertumbuhan Hijau belum banyak dipraktikkan.

wilayah adalah salah satu kunci untuk menjamin adanya keterkaitan (*interlinkages*) yang pada akhirnya dapat menjamin adanya pemerataan manfaat pembangunan. Arus barang dan jasa di sebuah wilayah, membutuhkan konektivitas yang kuat, sehingga nilai tambah sebuah produk dapat dinikmati secara optimal tanpa terbebani secara berlebihan oleh biaya transportasi yang tinggi. Selain keterkaitan dalam wilayah, keterkaitan antar wilayah Provinsi Jambi dengan daerah lain di luar Provinsi Jambi baik secara regional, nasional, maupun global perlu menjadi perhatian penting dalam upaya menggapai pertumbuhan ekonomi hijau. Keterkaitan dengan daerah di luar Provinsi Jambi akan membuka kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah melalui aktivitas perdagangan yang kuat. Selain konektivitas, skala ekonomi yang dikembangkan melalui pembangunan industri hilir adalah sebuah keniscayaan. Melalui pengembangan skala ekonomi, nilai tambah yang lebih optimal dapat dihasilkan melalui pengolahan bahan mentah dan bahan baku menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan ketersediaan komoditas unggulan yang besar di Provinsi Jambi seperti karet, kopi, kayu manis dan kelapa sawit, pembangunan skala ekonomi sudah selayaknya menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan hijau Provinsi Jambi.

3. Konektivitas dan Rantai Nilai Berkelanjutan



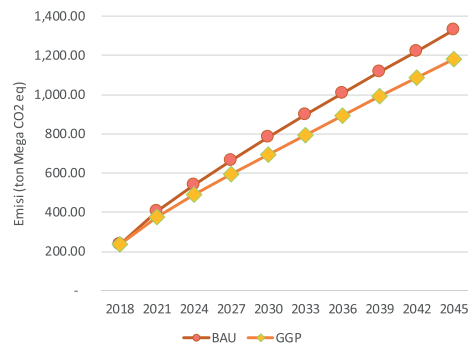
Pertumbuhan ekonomi hijau selain menekankan pada keberlanjutan, juga menitikberatkan pada pemerataan. Manfaat pembangunan berkelanjutan selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di sebuah wilayah. Konektivitas

Tabel 5-1. Capaian dambaan pada tingkat strategi

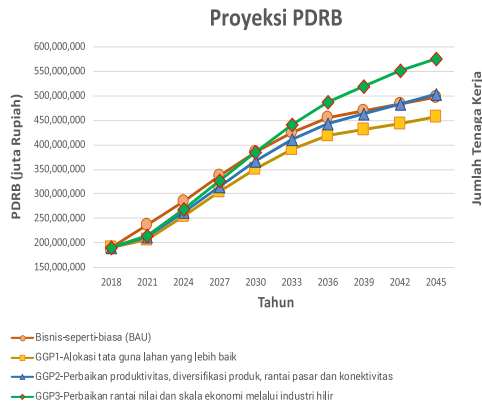
Strategi	Capaian Dambaan
1. Tata guna, Pemulihan, dan Peningkatan Produktivitas Lahan Berkelanjutan	• Keseimbangan antara fungsi produksi dan lindung • Kesetaraan penguasaan lahan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan • Berkurangnya konflik dan tumpang tindih ijin • Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan berkeadilan • Penentuan prioritas area untuk restorasi fungsi yang terdegradasi • Pengembangan komoditas yang tepat dengan memperhatikan kesesuaian biofisik, sosial, dan ekonomi • Produktivitas optimal dari berbagai komoditas unggulan Provinsi Jambi yang menjadi penggerak perekonomian daerah
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan melalui Peningkatan Akses terhadap Modal Pembangunan dan Penghidupan (<i>livelihood capitals</i>) serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan	• Peningkatan kapasitas SDM Jambi yang bertumpu pada perbaikan akses masyarakat terhadap modal penghidupan • Terbentuknya berbagai kelembagaan masyarakat dan petani yang dinamis dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan • Kemitraan dan kolaborasi dalam pengelolaan dan pendanaan bersama yang menunjang fungsi kawasan konservasi • Tata kelola dan kebijakan yang mendukung skema kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah (KIJL) dan pembayaran jasa lingkungan (PJL) berbasis performa yang efisien dan berkeadilan. • Perizinan dan pasar komoditas jasa ekosistem yang adil untuk menjaga suplai secara berkelanjutan
3. Konektivitas dan rantai nilai yang berkeadilan	• Adanya sarana dan prasarana pendukung yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan menyalurkan barang/jasa (<i>outlet</i> ekonomi) • Kemudahan distribusi hasil produksi melalui penyediaan jalan penghubung yang dapat menurunkan biaya angkutan • Adanya keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan • Terbukanya berbagai rantai pasok dan rantai pasar dengan pembagian peranan yang seimbang dari petani hingga pengguna di dalam dan luar daerah • Berbagai industri hilir berbasis komoditas unggulan daerah yang dapat mendorong berkembangnya kegiatan pada sektor hulu dan penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

5.2 Proyeksi Dampak

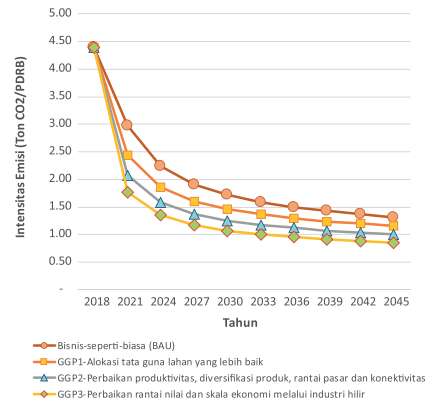
Rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi dilengkapi dengan analisis dampak terhadap enam belas (16) indikator makro penting pembangunan. Proyeksi dampak tersebut memberikan informasi terhadap meningkatnya kinerja berbagai indikator pada skenario rencana pertumbuhan hijau seperti ditunjukkan pada Tabel 5-1.



Gambar 5-1. Perbandingan hasil proyeksi emisi gas rumah kaca pada skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP)



Gambar 5-2. Perbandingan hasil proyeksi Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP)



Gambar 5-3. Perbandingan hasil proyeksi nilai intensitas emisi pada skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) dan skenario pertumbuhan ekonomi hijau (GGP)

Gambar 5-1 menunjukkan estimasi efektifitas skenario rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi dalam menurunkan emisi GRK dari kegiatan berbasis lahan hingga tahun 2045. Pada tahun 2045, skenario pertumbuhan hijau diproyeksikan dapat menurunkan emisi sebesar 19,8% dibandingkan dengan BAU.

Salah satu indikator penting yang disepakati oleh parapihak dalam proses penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Angka PDRB menunjukkan kinerja ekonomi wilayah sebagai penggerak pembangunan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, skenario pertumbuhan ekonomi hijau diproyeksikan dapat meningkatkan PDRB Provinsi Jambi.

Proyeksi nilai intensitas emisi yang menggambarkan hubungan antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan (emisi GRK) memperlihatkan adanya dampak yang baik ditunjukkan oleh skenario pertumbuhan ekonomi hijau. Gambar 5-3 menunjukkan bahwa skenario pertumbuhan hijau secara keseluruhan akan menurunkan intensitas emisi.

Seluruh perkiraan kinerja pertumbuhan ekonomi hijau disampaikan pada Tabel 5-2. Penjelasan terkait dengan masing-masing definisi dan ruang lingkup indikator disampaikan pada lampiran.

Tabel 5-2. Indikator makro pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi beserta perbandingan dampak ex-ante pada BAU dan GGP

BAU										Pertumbuhan Hijau										
INDIKATOR MAKRO																				
2018	2021	2024	2027	2030	2033	2036	2039	2042	2045	2018	2021	2024	2027	2030	2033	2036	2039	2042	2045	
4.39	2.97	2.24	1.91	1.72	1.59	1.50	1.43	1.37	1.31	Intensitas Emisi (ton CO2 eq/ juta Rupiah PDRB)	4.39	1.77	1.35	1.17	1.06	1.00	0.95	0.91	0.88	
191,098,712	235,895,505	285,468,746	336,386,643	384,516,578	425,432,216	454,639,992	468,599,397	482,744,633	497,058,992	PDRB (juta Rupiah)	191,098,712	214,896,402	269,434,651	327,442,230	384,776,146	441,420,131	488,104,104	519,594,421	552,447,470	575,226,837
1,462,389	1,941,543	2,951,500	4,504,696	6,569,887	9,070,494	11,886,607	14,862,606	17,999,328	21,297,098	Serapan Tenaga Kerja (orang)	1,462,389	2,121,527	3,351,706	5,174,354	7,565,951	10,489,470	13,832,017	17,432,162	21,288,635	25,320,111
78,706,403	97,198,678	117,697,946	138,771,712	158,696,322	175,637,723	187,717,380	193,464,531	199,291,022	205,190,670	Upah gaji (juta Rupiah)	78,706,403	102,388,471	124,497,300	147,602,143	169,922,882	191,053,648	207,628,069	217,602,215	227,714,756	234,282,904
96,853,734	118,980,953	143,456,936	168,567,227	192,285,492	212,452,476	226,893,795	233,894,916	240,976,074	248,125,333	Keuntungan Usaha (juta Rupiah)	96,853,734	126,036,971	153,026,989	181,334,133	208,833,535	235,650,818	257,204,392	270,900,337	284,799,360	293,016,514
96.8%	78.4%	65.8%	57.3%	51.4%	47.5%	45.0%	43.8%	42.7%	41.6%	Rasio Upah Gaji dan Keuntungan Usaha (%)	96.8%	78.1%	67.4%	60.4%	55.9%	52.8%	51.4%	51.3%	51.4%	51.2%
10.58%	9.88%	9.78%	9.90%	10.09%	10.27%	10.41%	10.60%	10.77%	10.90%	Persentase agroforestri (%)	10.58%	9.65%	9.38%	9.34%	9.39%	9.46%	9.51%	9.61%	9.70%	9.77%
57.72	30.76	18.46	13.31	10.34	8.1	6.82	6.05	5.22	4.73	Deforestasi ribu Ha/tahun	57.72	19.09	9.85	6.46	4.28	3.08	2.58	2.19	1.91	1.77
91.31%	91.06%	90.55%	90.06%	89.59%	89.21%	88.87%	88.57%	88.25%	88.03%	Tutupan pohon (%)	91.31%	91.32%	90.94%	90.55%	90.16%	89.80%	89.48%	89.19%	88.93%	88.69%
209.16	232.29	252.26	269.15	282.87	294.09	304.01	312.88	320.38	327.38	Potential Erosi (ton/ha)	209.16	223.97	234.87	242.99	248.43	252.3	255.72	258.1	260.7	262.75
40.48	38.08	45.66	52.58	42.57	48.66	53.48	58.25	41.25	39.51	Flow persistence (indeks hidrologi tanpa unit)	40.48	29.57	34.78	40.33	32.51	37.30	42.08	48.75	30.48	30.83
11.99	10.39	9.69	9.21	8.85	8.59	8.39	8.23	8.08	7.95	DIFA (indeks keanekaragaman hayati tanpa unit)	11.99	11.52	11.23	11.01	10.84	10.69	10.56	10.44	10.33	10.23
36.38%	36.54%	36.72%	36.86%	36.98%	37.07%	37.14%	37.19%	37.21%	37.24%	Keragaman kekayaan lahan (%)	36.38%	36.41%	36.47%	36.52%	36.57%	36.60%	36.63%	36.65%	36.67%	36.69%
175.38	107.06	72.95	58.81	51.91	47.27	44.39	42.18	40.49	39.03	Emisi sektor berbasis lahan (Mton CO2 eq)	175.38	77.78	51.87	42.78	37.89	35.40	34.13	32.78	32.00	31.30
59.87	62.75	64.16	64.98	65.60	66.10	66.51	66.87	67.20	67.48	Emisi gambut berbasis lahan (Mton CO2 eq)	59.87	62.21	62.75	63.08	63.37	63.66	63.93	64.18	64.41	64.60
66.69	39.91	32.95	32.15	31.53	31.38	31.32	31.49	31.31	31.33	Serapan karbon berbasis lahan (Mton CO2 eq)	66.69	39.24	32.26	30.97	30.30	29.95	29.93	29.99	29.96	29.87

5.3 Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Intervensi pembangunan hijau ini merupakan pendetailan dari upaya yang lebih nyata dari setiap strategi yang telah dirumuskan. Intervensi diuraikan berdasarkan capaian dambaan, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian intervensi, dan kebijakan pemungkinnya.

1. Intervensi pada Strategi 1: Tata Guna, Pemulihan, dan Peningkatan Produktivitas Lahan Berkelanjutan

Intervensi pada strategi 1 terkait upaya untuk (1) memperbaiki tata guna lahan dengan memperhatikan kewenangan, kebutuhan-ketersediaan lahan dan pengusahaan lahan yang ada, (2) upaya pemulihan lahan-lahan terdegradasi dengan berbagai komoditas yang bernilai ekonomi, dan (3) berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dari pengelolaan lahan (Tabel 5-3).

Tabel 5-3. Rincian intervensi, capaian dambaan, indikator dan kebijakan pemungkin pada Strategi 1

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.1. Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan melalui penerapan kebijakan satu peta	Padu serasi antara kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan pengembangan komoditas melalui penerapan kebijakan satu peta	1. Operasionalisasi kelembagaan kebijakan satu peta 2. Operasionalisasi prosedur tata guna lahan berbasis kebijakan satu peta-satu data 3. Jumlah sumber daya manusia untuk kebijakan satu peta 4. Frekuensi sosialisasi terhadap kelompok masyarakat 5. Jumlah batas fisik yang tersedia di lapangan 6. Jumlah kasus pelanggaran izin lahan yang teridentifikasi dan ditangani 7. Luas area hutan lindung 8. Luas area terdeforestasi dan terdegradasi	• UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang • UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah • Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. • Keppres No. 20/2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta • Permenko Bidang Perekonomian No. 2/2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.2. Alokasi dan pemetaan akses kawasan hutan untuk penghidupan masyarakat dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskinan	Pemerataan pertumbuhan ekonomi di tingkat lanskap melalui alokasi ekspansi HHBK pada lokasi-lokasi desa miskin	1. Jumlah HKM, HTR, dan Hutan Desa 2. Frekuensi pertemuan dan dialog multipihak terkait perhutanan sosial 3. Jumlah kemitraan yang terjalin antara perusahaan dengan masyarakat 4. Pendapatan masyarakat dari sumber HHBK dan ekowisata	• PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial • PermenLHK No. 27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
1.3. Alokasi akses-kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin (Reformasi Agraria)	Tercapainya cita-cita Reforma Agraria terkait penghidupan dan penguasaan lahan di desa miskin dan marginal	1. Pendapatan masyarakat di desa miskin 2. Jumlah area pelepasan lahan TORA 3. Jumlah sertifikat hak milik dari program TORA yang diterbitkan 4. Jumlah area TORA yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif	• PermenLHK No. 5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk TORA • PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan • PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan • PermenLHK No. 12/2015 tentang Pembangunan HTI • KepmenLHK No. 180/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
1.4. Alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegradasi	Pemulihan dan pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegradasi melalui upaya-upaya pengelolaan lahan bersama masyarakat	1. Peta lokasi lahan terdegradasi (tambang, gambut, eks kebakaran dan sebagainya) 2. Luas lahan terdegradasi dan lahan tidur 3. Ketersediaan bibit jenis asli atau mendekati asli sesuai standar 4. Jumlah bibit yang ditanam 5. Jumlah lahan eks tambang yang direklamasi 6. Jumlah kasus pertambangan dan penggalan ilegal	• PermenESDM No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara • PP No. 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan • Perda Provinsi Jambi No. 11/2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di Provinsi Jambi

Intervensi	Capaian dampak	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.5. Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perkebunan melalui revitalisasi lahan	1. Luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan 2. Jumlah konflik terkait ekspansi lahan pertanian/ perkebunan 3. Luas area penanaman 7 komoditas unggulan perkebunan	• UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit • Perda Provinsi Jambi No. 5/2012 tentang Ketahanan Pangan
1.6. Restorasi ekosistem gambut	Ekosistem gambut alami terjaga dan terkelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, produksi komoditas hutan dan lindung) melalui teknik alami/penanaman dan infrastruktur.	1. Luas area Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 2. Jumlah desa atau kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan 3. Ketersediaan lahan, sarana, dan prasarana untuk restorasi 4. Dokumen realisasi RTT atau RPP 5. Luas lahan yang direstorasi	• PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • Permentan No. 33/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi • Inpres No. 8/2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
1.7. Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu	Risiko dan frekuensi kebakaran hutan rendah pada lahan mineral dan gambut	1. Jumlah pendampingan masyarakat 2. Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan karhutla 3. Jumlah personel patroli karhutla 4. Peta sebaran kawasan rawan kebakaran 5. Peta sebaran titik api 6. Jumlah kasus karhutla yang ditangani	• Perda No. 2/2016 tentang Penanganan Karhutla • Pergub No. 31/2016 tentang Petunjuk Teknis Karhutla

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.8. Pemetaan dan penanganan wilayah konflik	Konflik atas lahan terselesaikan secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif	1. Jumlah daerah rawan konflik (masyarakat - negara, masyarakat - perusahaan, masyarakat - swasta) yang teridentifikasi 2. Jumlah konflik antar masyarakat dengan perusahaan 3. Jumlah tim penyelesaian konflik 4. Jumlah konflik yang dimediasi 5. Jumlah nota kesepakatan resolusi konflik 6. Jumlah pelaporan dan perencanaan tindak lanjut penyelesaian konflik	• UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan • PermenLHK No. 12/2015 tentang Pembangunan HTI • PermenATR No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan • Pergub No. 37/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan
1.9. Budidaya padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan memaksimalkan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik yang berlabel	Budidaya padi sawah (irigasi, non-irigasi, dan rawa gambut) yang rendah emisi dan terpadu menjadi praktek umum dan berkelanjutan bagi petani	1. Luas area padi (irigasi, non-irigasi, rawa/gambut) rendah emisi 2. Emisi gas rumah kaca dari lahan padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa gambut) 3. Jumlah sosialisasi untuk kelompok tani mengenai penggunaan bibit rendah emisi dan pupuk organik berlabel 4. Volume pembiayaan subsidi bibit padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa gambut) rendah emisi 5. Jumlah pupuk organik yang digunakan dalam praktik padi rendah emisi 6. Jumlah produksi beras organik 7. Jangka waktu perendaman pada sawah irigasi 8. Rasio NTP 9. Jumlah penggunaan air untuk budidaya padi 10. Jumlah petani (irigasi, non-irigasi, rawa/gambut) yang mengaplikasikan padi rendah emisi	• UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Perda No. 5/2012 tentang Ketahanan Pangan

Intervensi	Capaian dampak	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.10. Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, serta pembangunan industri rakyat kelapa dalam	Budidaya kelapa dalam berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas, serta teknologi panen dan pasca panen untuk menghasilkan komoditas dengan produktivitas yang baik.	1. Jumlah produksi kelapa dalam 2. Produktivitas kelapa dalam 3. Luas peremajaan kebun kelapa dalam 4. Luas kebun tumpang sari kelapa dalam dengan pinang, kopi, dan cokelat 5. Nilai produk sampingan dari tumpang sari kelapa dalam 6. Jumlah kegiatan pengolahan kelapa dalam oleh masyarakat 7. Pendapatan rumah tangga petani kelapa dalam	• Permentan No. 33/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi • Permentan No. 93/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kelapa Dalam • Permentan No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani • Pergub No. 30/2013 tentang Penetapan Kampung Pangan Terpadu
1.11. Revitalisasi, peremajaan, dan pengelolaan kebun karet menggunakan GAP	Budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversifikasi komoditas untuk menghasilkan karet dengan produktivitas yang baik	1. Model karet agroforestri 2. Jumlah petani terampil dalam pengelolaan karet berkelanjutan 3. Jumlah bibit unggul karet dan tanaman sela yang didistribusikan 4. Luas kebun bibit karet rakyat tersertifikasi 5. Jumlah pupuk yang terdistribusi untuk pengelolaan karet 6. Luas kebun karet yang sudah diremajakan	• Permentan No. 132/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet yang Baik • Permendag No.54/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet • Rancangan Perda Provinsi Jambi tentang Tata Niaga Komoditi
1.12. Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	Budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kelapa sawit dengan rendemen tertentu yang memenuhi standar PKS.	1. Jumlah kelompok tani sawit 2. Produktivitas lahan sawit 3. Jumlah unit bisnis kelapa sawit oleh masyarakat 4. Jumlah bibit bersertifikat 5. Luas kegiatan <i>replanting</i> kelapa sawit 6. Luas kebun agroforestri sawit 7. Jumlah kemitraan inti dan plasma yang terbentuk 8. Jumlah petani yang memperoleh KUR	• Permentan No. 131/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik • Permentan No. 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) • Permentan No. 18/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit • Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Intervensi	Capaian dampak	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.13. Pengembangan komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bambu, Nylam, dan Jelutung	Produksi komoditas alternatif seperti enau, tebu, bambu, nilam, dan jelutung yang bernilai tambah	1. Jumlah produksi dari komoditas alternatif 2. Jumlah petani yang mampu mengaplikasikan teknologi pasca panen 3. Jumlah variasi produk turunan dari komoditas alternatif	• Permentan No. 12/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman • Permentan No. 54/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Nilam
1.14. Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI	Kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat serta pencegahan kebakaran dengan pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal	1. Jumlah rumah tangga petani peserta program tanaman kehidupan 2. Luas lahan petani di zona tanaman kehidupan per perusahaan HTI 3. Jumlah perjanjian kemitraan 4. Volume pembiayaan program Tanaman Kehidupan 5. Nilai tambah bruto usaha petani peserta program	• PermenLHK No. 12/2015 tentang Pembangunan HTI • SE KLHK No. 13/2016 tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI
1.15. Optimalisasi Indikasi Geografis dan pengembangan industri hilir untuk produk kopi	Agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi-geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat	1. Luas area kebun kopi 2. Jumlah produksi kebun kopi 3. Luas perkebunan kopi 4. Jumlah demplot agroforestri kopi dengan komoditas lainnya 5. Jumlah petani yang mempraktikkan teknik pemanenan dan pemasaran yang baik 6. Jumlah transaksi melalui koperasi Saprodi 7. Jumlah pusat penampungan hasil produksi 8. Jumlah pusat promosi produksi 9. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti <i>event</i> 10. Jumlah barista yang dihasilkan dari pelatihan 11. Nilai produksi kopi berindikasi-geografis 12. Nilai tambah bruto bisnis industri hilir skala kecil	• Permentan No. 49/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (<i>Good Agricultural Practices on Coffee</i>)

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
1.16. Pengembangan dan pengolahan SAD perikanan dan hasil perikanan darat dan laut	Meningkatkan produk dan produksi hasil olahan perikanan secara berkelanjutan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya 2. Jumlah rumah tangga perikanan 3. Jumlah unit pengolahan ikan 4. Jumlah produksi olahan ikan segar 5. Angka konsumsi ikan	• UU No. 31 /2004 tentang Perikanan • UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • PP No. 54/2002 tentang Usaha Perikanan • PermenKKP No. 20/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
1.17. Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming)	Meningkatnya produksi dan diversifikasi pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan disekitar permukiman masyarakat	1. Produksi hortikultura 2. Jumlah masyarkat yang menerapkan <i>urban farming</i>	• UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang • Kepmentan No. 62/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Intervensi 1.1 Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan melalui penerapan kebijakan satu peta

Persoalan ketersediaan dan kebutuhan lahan seringkali menjadi tantangan dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Fungsi lahan dapat berubah dan bertambah seiring meningkatnya tekanan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Untuk memproyeksikan kondisi lahan di masa yang akan datang, dilakukan simulasi berdasarkan skenario 'bisnis seperti biasa' dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJMD/RPJPD), Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sektor-sektor berbasis lahan di

Provinsi Jambi. Hasil simulasi menunjukkan penggunaan lahan yang cukup masif pada periode 2019-2045. Pembangunan yang direncanakan akan mengurangi tutupan hutan sekitar 160.000 hektar dan mengurangi tutupan pohon sebesar 3,28%. Selain itu, alih fungsi yang tidak memperhatikan area lindung dan kesesuaian lahan dapat meningkatkan kerawanan kebakaran lahan hingga 37,24% pada tahun 2045. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan penyusunan strategi alternatif agar dampak negatif lingkungan yang terjadi di masa depan dapat dihindari dengan tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang diusulkan adalah mengalokasikan komoditas berdasarkan kesesuaian lahan sehingga dapat meningkatkan tekanan alih fungsi hutan dan menghindari adanya tumpang tindih alokasi rencana penggunaan lahan

dari berbagai kegiatan. Intervensi dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing kawasan (hulu, tengah, dan hilir) melalui penerapan kebijakan satu peta yang padu dan serasi.

Intervensi 1.2 Alokasi dan pemetaan akses kawasan hutan untuk penghidupan masyarakat dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskinan

Provinsi Jambi menetapkan angka penurunan kemiskinan sebesar 7,40% pada dokumen RPJMD 2016-2021. Hingga tahun 2018, angka kemiskinan masih berada pada angka 7,92%. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, akses terhadap sumber daya alam strategis perlu dialokasikan pada kantong-kantong kemiskinan. Pemerataan ekonomi di tingkat tapak diusahakan melalui alokasi ekspansi hasil hutan bukan kayu (HHBK) khas Jambi seperti minyak kepayang, minyak atsiri, madu hutan, kopi, kayu manis, dan gaharu. Intervensi ini menekankan pada optimalisasi area Perhutanan Sosial (PS) pada desa-desa tertinggal.

Intervensi 1.3 Alokasi akses-kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin (Reforma Agraria)

Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan program strategis nasional yang perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan akses kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat miskin. Luas potensi TORA di Provinsi Jambi mencapai 12.361 ha. Langkah yang perlu dilakukan adalah memetakan secara strategis pelepasan kawasan hutan untuk kemudian diidentifikasi kesesuaian lahan berdasarkan kriteria yang dikaji sebelumnya. Petani miskin yang ada pada kawasan TORA perlu didampingi secara intensif sehingga area TORA dapat dimanfaatkan untuk kegiatan

yang produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Tanah yang menjadi obyek TORA perlu memperhatikan kondisi tutupan lahannya saat ini dan memberikan arahan penggunaan lahan dengan tidak menurunkan kualitas tutupan lahannya.

Intervensi 1.4 Alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegradasi

Kegiatan ekonomi Provinsi Jambi yang berbasis sumber daya alam telah memberikan dampak terhadap bentang lahan sehingga terdapat lahan-lahan yang terdegradasi. Sebagian dari lahan yang terdegradasi menjadi lahan tidur yang tidak produktif baik itu lahan pasca perkebunan, kebakaran, maupun pertambangan. Upaya bersama dari parapihak dibutuhkan untuk memulihkan dan memanfaatkan kembali lahan tidur dan terdegradasi sehingga dapat mengembalikan kondisi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan pemulihan ini perlu dilakukan dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Intervensi 1.5 Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan

Sebagian besar komoditas unggulan di Provinsi Jambi saat ini sudah berumur cukup tua sehingga dibutuhkan revitalisasi dan peremajaan dibandingkan ekspansi lahan. Usulan tujuh komoditas strategis unggulan perlu dipetakan untuk membuat prioritas aksi revitalisasi. Kemudian daerah potensial budidaya ini dapat menjadi sentra-sentra komoditas yang mendorong perekonomian masyarakat di sekitarnya. Kegiatan revitalisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan bantuan dan pendampingan dalam menyediakan input revitalisasi dan pengelolaan kebun bagi masyarakat.

Intervensi 1.6 Restorasi ekosistem gambut

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir sebagian besar terjadi di lahan gambut, terutama di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Lahan gambut memiliki karakteristik spesifik yang menjadi penyimpanan cadangan karbon yang besar. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus dimulai dengan merestorasi gambut sebagai upaya pencegahan bencana tahunan ini. Alokasi fungsi baik budidaya, produksi komoditas hutan, maupun lindung perlu diimbangi dengan teknik penanaman alami yang cocok untuk gambut seperti paludikultur dan pengembangan infrastruktur penunjang restorasi gambut. Restorasi gambut ini juga dilakukan dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan restorasi sehingga masyarakat juga memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan restorasi.

Intervensi 1.7 Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu

Seperti yang telah dijelaskan pada intervensi sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang perlu diantisipasi di Provinsi Jambi. Risiko kebakaran hutan dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga dibutuhkan upaya mitigasi melalui pemetaan, pendampingan, patroli, dan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kasus kebakaran hutan lahan mencakup penanganan pasca kebakaran dan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Oknum yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan wajib untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Intervensi 1.8 Pemetaan dan penanganan wilayah konflik

Persoalan terkait lahan sangat dekat dengan potensi konflik akibat tumpang tindih kepentingan antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan perusahaan, atau masyarakat dengan swasta. Meskipun persoalannya dapat teridentifikasi, batas dan daerah rawan konflik masih belum jelas sehingga dibutuhkan pemetaan, studi, dan pembentukan rencana aksi penanganan daerah rawan konflik. Pemerintah perlu menempatkan diri sebagai mediator dan fasilitator dalam konflik yang ditangani. Pelibatan masyarakat dan komunikasi yang berimbang adalah kunci dalam penyelesaian konflik secara adil. Dalam penanganan masalah ini pemerintah juga diharapkan membentuk tim gabungan yang beranggotakan multipihak sehingga dapat mewakili semua kepentingan secara adil.

Intervensi 1.9 Budidaya padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan memaksimalkan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik yang berlabel

Emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian sebagian besar bersumber dari budidaya padi irigasi dalam bentuk gas metan (CH₄). Penanaman yang dilakukan dengan penggenangan dan penggunaan pupuk kimia memiliki risiko yang lebih tinggi melepaskan gas metan. Kegiatan yang perlu difokuskan adalah pengaktifan praktik padi rendah emisi baik irigasi, non-irigasi, maupun rawa/gambut mulai dari kelompok tani. Bibit rendah emisi dan pupuk organik berlabel perlu disubsidi dan disalurkan kepada kelompok-kelompok padi di demplot varietas padi rendah emisi.

Intervensi 1.10 Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, serta pembangunan industri rakyat kelapa dalam

Komoditas kelapa adalah salah satu komoditas unggulan Provinsi Jambi dengan luas mencapai 118.540 ha yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Selain kebun kelapa dalam sudah memasuki umur tua, pengelolaan kebun masih dilakukan secara tradisional sehingga dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Pertanian kelapa dalam sendiri sangat rentan menghadapi harga yang rendah dan kelesuan pasar sehingga dibutuhkan hilirisasi dan diversifikasi agar dapat meningkatkan harga dan penyerapan komoditas kelapa dalam. Petani kelapa dalam kebanyakan adalah petani rakyat sehingga pembangunan industri rakyat kelapa dalam diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Beberapa upaya yang dapat ditempuh seperti pembentukan kelembagaan kelompok tani, perbaikan infrastruktur pendukung, peningkatan kemampuan teknologi pasca panen berbagai turunan produk kelapa dalam.

Intervensi 1.11 Revitalisasi, peremajaan, dan pengelolaan kebun karet menggunakan GAP

Kebun-kebun karet di Provinsi Jambi mayoritas adalah kebun tua sedangkan luas komoditas karet merupakan kedua tertinggi. Untuk mengoptimalkan kembali lahan-lahan yang telah menjadi kebun karet, dibutuhkan revitalisasi dan peremajaan. Selain itu, masih banyak kebun bibit yang tidak memiliki sertifikat maka untuk memberikan distribusi bibit yang berkualitas dan terjamin dibutuhkan sertifikasi kebun bibit karet rakyat. Implementasi praktik pengelolaan kebun karet yang baik dapat diimbangi dengan distribusi pupuk yang terjangkau serta pembinaan pemupukan yang berimbang,

Intervensi 1.12 Intensifikasi budidaya sawit berkualitas

Kebun sawit merupakan sumber ekspansi lahan yang cukup masif di Provinsi Jambi. Untuk mengelola lahan dengan lebih berkelanjutan, intensifikasi budidaya sawit perlu ditekankan. Salah satunya juga melalui penanaman kembali (*replanting*) kebun sawit yang sudah tua. Budidaya sawit berkelanjutan yang dimaksud adalah budidaya yang memenuhi standar sertifikasi nasional dan global seperti RSPO dan ISPO serta mampu menerapkan aplikasi pengelolaan yang ramah lingkungan. Pengembangan kebun sawit dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui pola kemitraan inti dan plasma, dan juga pengelolaan sawit mandiri yang dilakukan secara baik dalam memenuhi standar pengelolaan yang disarankan.

Intervensi 1.13 Pengembangan komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bambu, Nylam, dan Jelutung

Pengembangan komoditas alternatif menjadi aspek yang penting untuk menurunkan ketergantungan eksploitasi lahan pada komoditas-komoditas tertentu. Produksi enau, tebu, nilam, dan jelutung sebenarnya sudah dapat ditemui di beberapa kawasan di Provinsi Jambi, meskipun demikian dibutuhkan pengembangan melalui penyediaan bibit berkualitas, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan produk turunan yang kompetitif. Upaya ini perlu terus dilakukan secara serius

Intervensi 1.14 Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12 Tahun 2015, area HTI di Indonesia wajib menyediakan ruang sebesar paling sedikit 20% untuk tanaman kehidupan. Pengalokasian ruang untuk tanaman kehidupan dapat

menjadi salah satu cara memberdayakan masyarakat di dalam maupun sekitar hutan. Pengelolaan lahan dilakukan melalui pola kemitraan. Dalam peraturan menteri ini juga telah diatur untuk menerapkan sistem agroforestri/wanatani sebagai upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu dibuat SOP dan pembentukan kelembagaan yang dapat menjamin implementasi program tersebut di setiap konsesi yang ada untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat.

Intervensi 1.15 Optimalisasi Indikasi Geografis dan pengembangan industri hilir untuk produk kopi

Kopi sebagai komoditas strategis khas Jambi merupakan target utama pengembangan pemerintah. Pengelolaan lahan sampai produksi perkebunan kopi perlu mendapatkan perhatian lebih melalui penyuluhan dan pendampingan secara lebih lanjut. Beberapa kegiatan yang didorong antara lain membangun demplot agroforestri kopi, penguatan saprodi, dan optimalisasi indikasi geografis. Hilirisasi komoditas kopi masih memiliki potensi yang besar terutama dalam meningkatkan harga dan ekspor. Pengembangan Indikasi Geografis sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pengakuan spesies lokal sehingga produksi dan nilai jualnya dapat ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Intervensi 1.16 Pengembangan dan pengolahan SAD perikanan dan hasil perikanan darat dan laut

Stock Investment Driven (SAD) atau pendugaan stok ikan merupakan pengembangan dan pengolahan melalui pendekatan berdasarkan suplai produk perikanan yang tersedia. Pengembangan dengan SAD perikanan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi nelayan baik budidaya

maupun tangkap. Nelayan di Provinsi Jambi masih perlu ditopang dengan sarana prasarana yang memadai diimbangi dengan penyuluhan standar kelayakan pengolahan.

Intervensi 1.17 Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming)

Pertanian perkotaan adalah suatu upaya pengelolaan lahan yang sempit di perkotaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan kota. Konsep ini cukup populer dalam menyokong ketahanan pangan terutama rumah tangga dan perkotaan yang identik dengan lahan yang terbatas. Peningkatan diversifikasi pertanian sederhana dilakukan melalui pemanfaatan lahan-lahan di sekitar permukiman masyarakat atau pekarangan. Masyarakat umum, tidak hanya petani, didorong untuk mengembangkan hortikultura dan mengelola lahannya secara intensif. Untuk mendukung intervensi ini dibutuhkan sosialisasi, penyuluhan, serta sarana prasarana pendukung yang terarah bagi masyarakat yang berminat mengembangkan demplotnya sendiri.

2. Intervensi pada Strategi 2: Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan melalui Peningkatan Akses Terhadap Modal Pembangunan dan Penghidupan (*livelihood capitals*) serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Intervensi pada strategi 2 terkait upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat dengan memperbaiki aksesibilitas terhadap berbagai modal penghidupan dan pemanfaatan jasa lingkungan yang ada. Secara rinci uraian intervensi pada Tabel 5-4 di bawah ini.

Tabel 5-4. Rincian intervensi, capaian dambaan, indikator dan kebijakan pemungkin pada Strategi 2

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
2.1. Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang solid	Kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun kelompok, termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola lahan dan hutan dengan kearifan lokal	1. Jumlah lembaga pertanian dan kehutanan yang mempunyai legalitas 2. Jumlah kemitraan, dukungan modal, dan pelatihan 3. Jumlah Gapoktan yang mampu mengelola lahan dan hutan 4. Jumlah keterwakilan perempuan dan pemuda dalam kelompok tani	• UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • Permentan No. 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani • Permentan No. 18/2018 tentang Pengembangan Pertanian berbasis Korporasi Petani • Pergub Provinsi Jambi No. 21/2011 tentang Penyuluhan Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan
2.2. Pengembangan akses permodalan bagi masyarakat	Akses yang mudah bagi masyarakat ke sumber-sumber permodalan serta sarana dan prasarana produksi	1. Jumlah lembaga keuangan mikro di desa 2. Jumlah petani penerima kredit 3. Jumlah kelompok petani penerima kredit 4. Jumlah saprodi yang diterima di tingkat desa 5. Tingkat pengembalian kredit 6. Jumlah koperasi yang sehat 7. Jumlah peserta asuransi pada kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan	• Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa • Perda Provinsi Jambi No. 4/2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
2.3. Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu (satu desa satu penyuluh)	1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan 2. Jumlah sertifikasi penyuluh yang diterbitkan 3. Jumlah tenaga penyuluh di setiap sektor ekonomi lahan 4. Jumlah penyuluh di setiap desa 5. Jumlah anggaran yang tersedia untuk penyuluh dan kegiatan penyuluhan 6. Jumlah pendampingan teknis kepada masyarakat oleh perusahaan 7. Jumlah demplot atau bioplot yang terbentuk	• UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • Pergub Provinsi Jambi No. 10/2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi
2.4. Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi	Implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan sektor swasta dan mitra internasional	1. Jumlah keterlibatan lembaga masyarakat dalam program restorasi 2. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan restorasi 3. Keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) restorasi 4. Jumlah desa yang didampingi 5. Luas lahan kritis yang akan direstorasi 6. Laporan kegiatan dan keuangan 7. Jumlah pendanaan dari paramitra	• Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut • Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit • PermenLHK No. 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
2.5. Penysadartahuan, promosi, pembentukan institusi multipihak, serta penguatan regulasi untuk penyediaan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, untuk sektor swasta dan masyarakat lokal	Kesadaran masyarakat terhadap konsep jasa lingkungan, institusi multipihak yang mampu melakukan pengumpulan, pemupukan, penyaluran dan pemantauan capaian pemakaian dana secara adil dan efisien, serta didukung oleh regulasi dan kebijakan efektif dalam menghasilkan jasa lingkungan.	1. Jumlah materi publikasi mengenai konsep jasa lingkungan dan pendanaan inovatif 2. Jumlah pelatihan konsep jasa lingkungan dan pendanaan inovatif untuk berbagai pihak 3. Institusi multipihak dengan neraca pendanaan positif 4. Sistem insentif dan disinsentif operasional dan terantau secara teratur serta berbasis performa	• Perdirjen No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung • Perda Provinsi Jambi No. 6/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Perda No. 14/2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
2.6. Peningkatan skala ekonomi melalui penyediaan produk kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang ada	Meningkatnya kemampuan keuangan petani yang didukung oleh penyediaan modal, kemampuan dalam pengelolaan keuangan, dan dukungan kelembagaan keuangan desa (BUMDES)	1. Jumlah dana/aset yang dimiliki oleh koperasi masyarakat/BUMDES/ lembaga keuangan mikro 2. Jumlah kredit yang disalurkan 3. Jumlah petani yang mendapatkan kredit 4. Jumlah dana desa yang digunakan dalam kegiatan produktif	• PP No. 60/2014 tentang Dana Desa • Permendes PDTT No. 4/2015 tentang Badan Usaha Milik Desa • Perda Provinsi Jambi No. 4/2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.7. Kompensasi/ imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk tata kelola DAS	Tata kelola DAS yang terintegrasi dan terukur melalui penerapan KIPJL yang operasional dan berdampak positif bagi masyarakat.	1. Kualitas dan aliran jasa lingkungan tata kelola DAS (laju erosi, laju aliran permukaan, kualitas air, dst.) 2. Luas tutupan lahan dengan praktik konservasi tanah dan air 3. Jumlah petani peserta skema IJL 4. Jumlah perusahaan mitra skema IJL 5. Jumlah dan volume pendanaan skema KIPJL yang operasional dan berkesinambungan 6. Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung KIPJL 7. Sistem insentif dan disinsentif untuk kasus PETI berjalan dan terantau secara teratur	• Peraturan Pemerintah No. 37/2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Perda Provinsi Jambi No. 1/2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi • Perda Provinsi Jambi No. 1/2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
2.8. Kompensasi/ imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk keanekaragaman hayati	Keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi yang mendukung tujuan konservasi dan bermanfaat bagi masyarakat lokal	1. Kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati 2. Luas tutupan lahan sebagai koridor, area penyangga, dan bernilai konservasi tinggi (HCV) 3. Jumlah petani peserta skema IJL 4. Jumlah perusahaan mitra skema IJL 5. Jumlah dan volume pendanaan skema KIPJL yang operasional dan berkesinambungan 6. Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung KIPJL	• PermenLHK No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah • Perda Provinsi Jambi No. 1/2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup
2.9. Pasar dan inisiatif karbon sukarela	Pasar dan inisiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendukung pencapaian target daerah dalam mengurangi emisi GRK	1. Stok dan laju penambahan karbon 2. Luas tutupan lahan dengan skema pasar dan inisiatif karbon sukarela 3. Jumlah perusahaan mitra skema pasar/inisiatif karbon 4. Jumlah LSM mitra skema pasar/inisiatif karbon 5. Jumlah skema pasar/ inisiatif karbon yang operasional dan berkesinambungan 6. Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung pasar/inisiatif karbon	• PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup • Permenhut No. 50/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction
2.10. Pasar komoditas air untuk suplai air berkelanjutan	Pasar komoditas air berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata	1. Persentase pembagian manfaat sesuai performa 2. Efisiensi kinerja PDAM 3. Volume komoditas air yang dimanfaatkan	• Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Sumber Daya Air • Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air • Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
2.11. Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata: wisata lanskap umum dan wisata khusus	Industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan	1. Jumlah kawasan ekowisata 2. Jumlah pengunjung kawasan tiap tahun 3. Jumlah portfolio investasi bisnis ekowisata masyarakat 4. Nilai tambah bruto investasi bisnis ekowisata masyarakat 5. Kualitas dan aliran jasa lingkungan sesuai konteks (tautan ke intervensi Imbal Jasa Lingkungan)	• PermenLHK No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi • Perdirjen No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung • Perda No. 7/2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
2.12. Sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, pekebunan dan kehutanan	Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen tersertifikasi dalam skala yang lebih luas	1. Kualitas dan aliran jasa lingkungan 2. Jumlah pelacak pada sertifikasi produk pertanian, perkebunan dan kehutanan 3. Jumlah petani kecil dengan akses pasar komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan berindikasi-geografis 4. Nilai produksi komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan berindikasi-geografis dalam satu bentang lahan	• Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 Lampiran 1.2 Standard Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HTI • Perda Kab. Batanghari No. 14/2001 IPHH • Perda Kab. Muaro Jambi No. 20/2002 IPHHKLH

Intervensi 2.1 Kelembagaan pertanian dan kehutanan yang solid

Pengembangan usaha pertanian dan kehutanan perlu diimbangi dengan kelembagaan yang handal. Selama ini struktur dan pengelolaan kelembagaan yang tradisional dan tidak efisien menghambat petani memperoleh keuntungan yang optimal. Kapasitas kelompok tani dan anggotanya

termasuk perempuan dan taruna tani perlu dikembangkan sejalan dengan semangat pemberdayaan dan peningkatan partisipasi. Penguatan kelembagaan desa maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki jangkauan kerja berkaitan dengan pengembangan pertanian dan kehutanan juga menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan penguatan kelembagaan petani.

Intervensi 2.2 Pengembangan akses permodalan bagi masyarakat

Persoalan yang paling sering dialami oleh masyarakat pelaku usaha pertanian dan kehutanan di lapangan yaitu kesulitan mengakses permodalan. Padahal tanpa adanya permodalan yang memadai, kegiatan produksi dan pemasaran dapat terhambat. Pengembangan lembaga keuangan mikro desa seperti Kelompok Ekonomi Petani (KEP), Koperasi Usaha Tani, dan Badan Usaha Milik Desa perlu terus didorong dan dikuatkan perannya dalam menunjang kegiatan ekonomi petani. Lembaga keuangan mikro tersebut dapat bermitra dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam mendukung pelayanan perbankan di tingkat desa. Pemerintah dapat memfasilitasi penyadartahuan dan penyuluhan mengenai peran lembaga keuangan dalam menunjang kegiatan pertanian tingkat desa.

Intervensi 2.3 Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu

Akses terhadap penyuluh juga merupakan aspek yang penting dalam mendukung kegiatan pertanian. Kurangnya penyuluh lapang baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi persoalan yang kerap ditemui. Penyuluh lapang sebaiknya memiliki spesialisasi dalam mendampingi komoditas tertentu sehingga aplikasi di lapangan dapat lebih terarah. Penyuluh yang kuat dan memadai merupakan fondasi bagi peningkatan kapasitas sumber daya petani yang unggul dan mandiri. Sesuai dengan arahan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan harus memenuhi tiga aspek yaitu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.

Intervensi 2.4 Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi

Program restorasi dapat berjalan apabila prasyarat berupa ketersediaan pendanaan, kesiapan kebijakan, dan kemitraan yang solid sudah terpenuhi. Pendanaan untuk pemulihan lahan yang mengalami degradasi fungsi perlu dipetakan dari berbagai sumber sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan restorasi. Kegiatan sebelumnya pada lahan yang terdegradasi seperti pembakaran hutan dan eksploitasi sumber daya mineral dapat diidentifikasi dalam memetakan tanggung jawab pembiayaan. Kebijakan baik secara nasional maupun lokal perlu disiapkan sebagai payung dalam mengawal kegiatan-kegiatan restorasi yang dilaksanakan sampai tingkat tapak. Yang terakhir, kemitraan strategis dapat dibangun dalam perencanaan maupun implementasi sehingga melibatkan banyak pihak dalam rangka kelancaran program restorasi.

Intervensi 2.5 Penyadartahuan, promosi, pembentukan institusi multipihak, serta penguatan regulasi untuk penyediaan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, untuk sektor swasta dan masyarakat lokal

Pelestarian ekosistem yang sejalan dengan penyediaan jasa lingkungan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan sektor swasta. Ketersediaan jasa lingkungan dalam pengelolaan yang adil dan merata diterapkan melalui penyiapan aspek institusional dan sumber daya manusia. Pemerintah dapat melakukan penyadartahuan, promosi, dan fasilitasi pembentukan institusi multipihak dalam penyediaan jasa lingkungan. Provinsi Jambi sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup yang perlu diperkuat dalam implementasinya.

Intervensi 2.6 Peningkatan skala ekonomi melalui penyediaan produk kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang ada

Kredit usaha tani, atau yang sekarang disebut sebagai kredit usaha rakyat, adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pelaku usaha kecil terhadap sumber pembiayaan. Kredit dapat diberikan kepada koperasi maupun UMKMK yang memiliki prospek pengembangan (*feasible*) meskipun belum *bankable*. Untuk memperoleh kredit, petani dapat bergabung ke dalam koperasi/ BUMDes dan melalui beberapa prosedur. Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan.

Intervensi 2.7 Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk tata kelola DAS

Perumusan skema insentif dan pendanaan dalam tata kelola lanskap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL). Khususnya terkait tata kelola daerah aliran sungai (DAS), skema KIPJL menjadi jembatan yang dibutuhkan dalam menghubungkan aktor multipihak pada tingkat provinsi yang berkaitan dengan DAS. Pengelolaan DAS selama ini masih terkendala kewenangan (sektor lingkungan hidup, pekerjaan umum, kehutanan, dan tata ruang) dan pendekatan yang *silo*. Adanya KIPJL diharapkan dapat menjadi wadah untuk dialog dan integrasi multipihak yang sinergis. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pihak-pihak terkait penting disiapkan dalam mendukung pelaksanaan skema insentif dan pendanaan yang berkelanjutan.

Intervensi 2.8 Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk keanekaragaman hayati

Adanya KIPJL untuk keanekaragaman hayati bertujuan untuk menjamin dan memelihara manfaat jasa keanekaragaman hayati termasuk di dalamnya pemanfaatan sumber komoditi primer, sumber daya genetik dan sebagainya, hak cipta intelektual; dan jasa pemanfaatan plasma nutfah serta mikrobial sebagai bahan baku. Sertifikasi produk, seperti produk pertanian yang bersahabat dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati, dapat dikembangkan dalam rangka menginternalisasikan nilai konservasi dalam pengembangan komoditas.

Intervensi 2.9 Pasar dan inisiatif karbon sukarela

Pasar inisiatif karbon sukarela (*voluntary carbon mechanism/VCM*) perlu didorong penerapannya melalui proses perencanaan yang tepat sasaran. Lokasi yang potensial untuk VCM diidentifikasi di awal melalui pemetaan dan diskusi multipihak yang partisipatif. Dibutuhkan kebijakan yang mencakup dasar dan prosedur penerapan VCM agar implementasinya terarah. Hal ini dilakukan beriringan dengan penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan pengukuran karbon di tingkat tapak.

Intervensi 2.10 Pasar komoditas air untuk suplai air berkelanjutan

Masih banyak wilayah di Provinsi Jambi yang mengalami krisis air bersih saat kemarau datang, antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Analisis pengelolaan sumber daya air dilakukan di awal untuk mengidentifikasi potensi dan ancaman

terhadap ketersediaan jasa lingkungan air yang ada di kawasan rawan krisis air. Dari hasil yang diperoleh, sistem pemantauan sumber daya air disusun dan kompensasi diberikan untuk pihak yang terlibat dalam konservasi sumber daya air. Penyaluran air tentunya tidak terlepas dari kinerja PDAM sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap kinerja PDAM untuk perbaikan sistem di masa yang akan datang.

Intervensi 2.11 Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata: wisata lanskap umum dan wisata minat khusus

Pendekatan ekowisata sudah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tapi juga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya dibutuhkan penyusunan rencana pengembangan kawasan-kawasan ekowisata yang dilengkapi dengan strategi pemasaran, konservasi, serta pemberdayaan masyarakat. Kawasan-kawasan ini perlu dikembangkan secara partisipatif untuk kemudian menjadi ruang yang menerapkan konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) melalui pendapatan wisata untuk konservasi di dalamnya sehingga lingkungan alam tetap terjaga.

Intervensi 2.12 Sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, pekebunan dan kehutanan

Sistem sertifikasi menjadi wadah dalam mengelola dan mengendalikan lanskap yang lebih berkelanjutan. Pada sektor pertanian, sertifikasi lanskap dapat mendorong implementasi praktik pertanian yang baik dalam menunjang penyediaan jasa lingkungan sekaligus produktivitas lahan. Sertifikasi komoditas perkebunan dapat diterapkan

mengacu pada sistem sertifikasi yang sudah ada misalnya sertifikasi indikasi geografis pada kopi atau ISPO dan RSPO untuk kelapa sawit. Dengan mengoptimalkan sertifikasi ini, sistem perkebunan baik dari penanaman, pengelolaan, sampai dengan pemasaran dapat terintegrasi dalam suatu usaha yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk sektor kehutanan, sertifikasi kayu berkelanjutan perlu didorong untuk diadopsi seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Forest Steward Council (FSC), Forest Law Enforcement Government and Trade (FLEGT).

3. Intervensi pada Strategi 3 : Konektivitas dan Rantai Nilai Berkelanjutan

Intervensi pada strategi 3 terkait upaya untuk meningkatkan konektivitas wilayah antara sumber produksi dengan distribusi dan pasar dan perbaikan sistem untuk memperbaiki keterkaitan hulu-hilir. Intervensi pada strategi ini juga ditujukan untuk mendapatkan rantai nilai produksi dan rantai pasar yang seimbang, adil, dan menguntungkan semua pihak dalam proses produksi hingga pemasaran hasil. Secara rinci uraian intervensi pada Tabel 5-5.

Tabel 5-5. Rincian intervensi, capaian dambaan, indikator dan kebijakan pemungkin pada Strategi 3

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
3.1. Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri	Adanya pelabuhan dan sarana pendukung yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan menyalurkan barang dari Provinsi Jambi (<i>outlet</i> ekonomi)	1. Tingkat kemajuan pembangunan pelabuhan 2. Panjang jalan menuju pelabuhan 3. Jumlah arus barang (<i>freight</i>) yang disalurkan melalui pelabuhan 4. Jumlah sarana pergudangan yang terbangun 5. Nilai ekspor	• Perda Provinsi Jambi No. 3/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah • Perda Provinsi Jambi No. 10/2013 tentang RTRW Provinsi Jambi • Perda Provinsi Jambi No. 1/2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus
3.2. Peningkatan moda transportasi transportasi di area sentra produksi ke fasilitas pengelolaan atau pasar	Kemudahan distribusi hasil produksi melalui penyediaan jalan penghubung yang dapat menurunkan biaya angkutan	1. Pengembangan moda transportasi sungai 2. Pembangunan jaringan kereta api 3. Pembangunan terminal tipe C (Angdes dan Angkot) 4. Penyediaan alat angkut komoditas	• Pergub No. 20/2017 jo Pergub No. 53/2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak • Perda No. 1/2013 tentang Pengelolaan DAS • Pergub No. 64/2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
3.3. Pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan	Adanya keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan	1. Jumlah dokumen perencanaan pendukung 2. Kapasitas angkut jalan 3. Jumlah perubahan status jalan menjadi jalan nasional/provinsi	• PermenPUPR No. 4/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan • PermenPUPR No. 7/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia • Perda No. 10/2013 tentang RTRW Provinsi Jambi • Perda No. 10/2013 tentang RTRW Provinsi Jambi
3.4. Peningkatan kemudahan dalam akses informasi pasar yang menguntungkan petani	Membaiknya keuntungan petani yang didukung oleh informasi pasar yang memadai	1. Intensitas (jumlah informasi per bulan) informasi harga yang diterima petani 2. Persentase peningkatan keuntungan petani	• Perda No. 1/2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus • Ranperda Tata Niaga Komoditi Perkebunan
3.5. Pembentukan industri turunan kelapa dalam terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani	Industri kelapa dalam terpadu yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani	1. Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) kelapa terpadu 2. Jumlah tenaga kerja industri kelapa terpadu 3. Nilai investasi pengolahan kelapa dalam 4. Penyaluran insentif untuk industri kelapa dalam	• Permentan No. 93/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Kelapa Dalam

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator yang disarankan	Kebijakan pemungkin
3.6. Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor	Meningkatnya nilai tambah dari produk turunan karet	1. Nilai tambah bruto produk turunan karet 2. Jumlah perusahaan yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha 3. Jumlah pabrik pengolahan turunan karet 4. Volume pembiayaan modal usaha rakyat 5. Nilai investasi pengolahan turunan karet 6. Nilai tambah bruto bisnis industri hilir karet skala kecil	• Permentan No. 132/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet yang Baik • Permentan No. 38/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)
3.7. Optimalisasi pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	Rantai pemasaran karet mentah dengan posisi tawar petani yang kuat untuk sistem perdagangan dan ekonomi desa yang adil di tingkat petani	1. Jumlah UPBB yang terbentuk 2. Jumlah petani dan pedagang yang secara aktif terlibat dalam kegiatan di UPBB 3. Jumlah UPPB dengan standar manajemen baik 4. Frekuensi pengawasan UPPB 5. Frekuensi penegakan hukum di UPPB 6. Nilai transaksi yang terjadi di UPBB	• Permentan No. 38/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR) • Permendag No.54/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet
3.8. Diversifikasi usaha tani dengan agroforestri komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis	Produksi kayu manis yang berkualitas dan terdiversifikasi dengan nilai tambah yang menguntungkan petani	1. Jumlah produksi kayu manis 2. Jumlah benih kayu manis yang tersalurkan ke petani 3. Jumlah pembibitan mandiri desa dan kebun benih induk di tingkat kabupaten 4. Jumlah demplot agroforestri kayu manis dengan komoditas lainnya 5. Jumlah IKM produk turunan kayu manis yang terbentuk 6. Nilai perdagangan produk turunan kayu manis 7. Sertifikasi produk unggulan 8. Jumlah kegiatan yang memanfaatkan teknologi tepat guna 9. Jumlah produk yang dipasarkan baik domestik dan ekspor	• Permentan No. 12/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman • Perda Provinsi Jambi No. 4/2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Intervensi 3.1 Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri

Pemerintah Provinsi Jambi telah merencanakan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebelum tahun 2018. Namun sayangnya pada tahun 2018 pencairan dana mengalami kendala. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan No. 43 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Ujung Jabung Provinsi Jambi, rencana ini mulai dikerjakan kembali. Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung diharapkan dapat menjadi pusat distribusi bagi komoditas perdagangan dari Provinsi Jambi mengingat selama ini hasil produksi masih dibawa ke Sumatera Barat atau Lampung untuk didistribusikan ke luar pulau. Pelabuhan Ujung Jabung direncanakan memiliki zona ekonomi kawasan industri di sekitarnya sehingga dapat menjadi atraksi pusat ekonomi yang menarik bagi investor.

Intervensi 3.2 Peningkatan moda transportasi di area sentra produksi ke fasilitas pengelolaan atau pasar

Pendistribusian hasil panen dari sentra produksi ke fasilitas pengelolaan maupun pasar masih mengalami hambatan. Salah satunya disebabkan oleh terbatasnya moda transportasi yang memadai. Untuk itu, penyediaan moda transportasi menjadi penting dalam melancarkan proses distribusi. Provinsi Jambi memiliki potensi sungai dari hulu sampai hilir yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendistribusikan barang. Pengembangan moda transportasi sungai dapat menjadi solusi yang sesuai terutama dalam mengurangi beban jalan raya. Selain itu, pembangunan jalur kereta api juga perlu dilanjutkan. Beberapa titik strategis dapat diidentifikasi untuk kemudian ditempatkan terminal tiga yaitu angkutan desa dan

angkutan kota dalam rangka membuka akses dari sentra ke pasar-pasar di kota.

Intervensi 3.3 Pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan

Pengembangan jalan dan jembatan selama ini masih belum dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam mengenai tarikan dan dorongan kebutuhan transportasi untuk sektor ekonomi strategis. Studi terkait identifikasi kondisi jalan dan jembatan dibutuhkan untuk melihat jalur-jalur strategis distribusi komoditas yang perlu untuk diprioritaskan. Beberapa jalur yang telah teridentifikasi perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga memperlancar arus peredaran barang dan jasa.

Intervensi 3.4 Peningkatan kemudahan dalam akses informasi pasar yang menguntungkan petani

Keterbatasan informasi menjadi persoalan di kalangan petani. Terlebih lagi dengan semakin majunya inovasi yang diberikan oleh era digital, petani yang tidak memiliki akses dan kapabilitas yang memadai akan mudah tergerus. Dalam rangka meningkatkan harga di kalangan petani, akses terhadap informasi pasar harus transparan. Hal ini membuka kesempatan bagi petani untuk memiliki posisi tawar yang berkeadilan.

Intervensi 3.5 Pembentukan industri turunan kelapa dalam terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani

Kebanyakan pengembangan komoditas kelapa dalam masih dijual per butir pasca petik. Kondisi ini menyebabkan harga cenderung fluktuatif dan cenderung rendah di kalangan petani kelapa dalam. Maka dari itu dibutuhkan hilirisasi dalam bentuk industri turunan kelapa dalam terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Intervensi 3.6 Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor

Pengembangan produk turunan karet dapat meningkatkan nilai tambah bruto dari produksi karet. Petani karet perlu dilibatkan sebagai investor sehingga pengembangan usaha dapat menyejahterakan petani sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan. Dalam merancang usaha percontohan dibutuhkan studi kelayakan dan teknologi pengelolaan karet tepat guna terlebih dahulu. Industri yang dikembangkan dapat berupa industri berbasis lateks, crumb rubber mini, *scraper rubber mini*, dan pengolahan karet pekat.

Intervensi 3.7 Optimalisasi pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih

Keberadaan Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar (UPBB) perlu dioptimalkan sebagai simpul penyaluran karet bersih. Rantai pemasaran karet mentah ini dapat meningkatkan posisi tawar petani sehingga sistem perdagangan dapat memberikan harga yang adil bagi petani. Pemerintah sebaiknya memastikan peningkatan kualitas dan kuantitas UPBB sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Kemudian diikuti dengan peningkatan dan penguatan peran petani melalui perbaikan sistem pengelolaan yang terpadu.

Intervensi 3.8 Diversifikasi usaha tani dengan agroforestri komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis

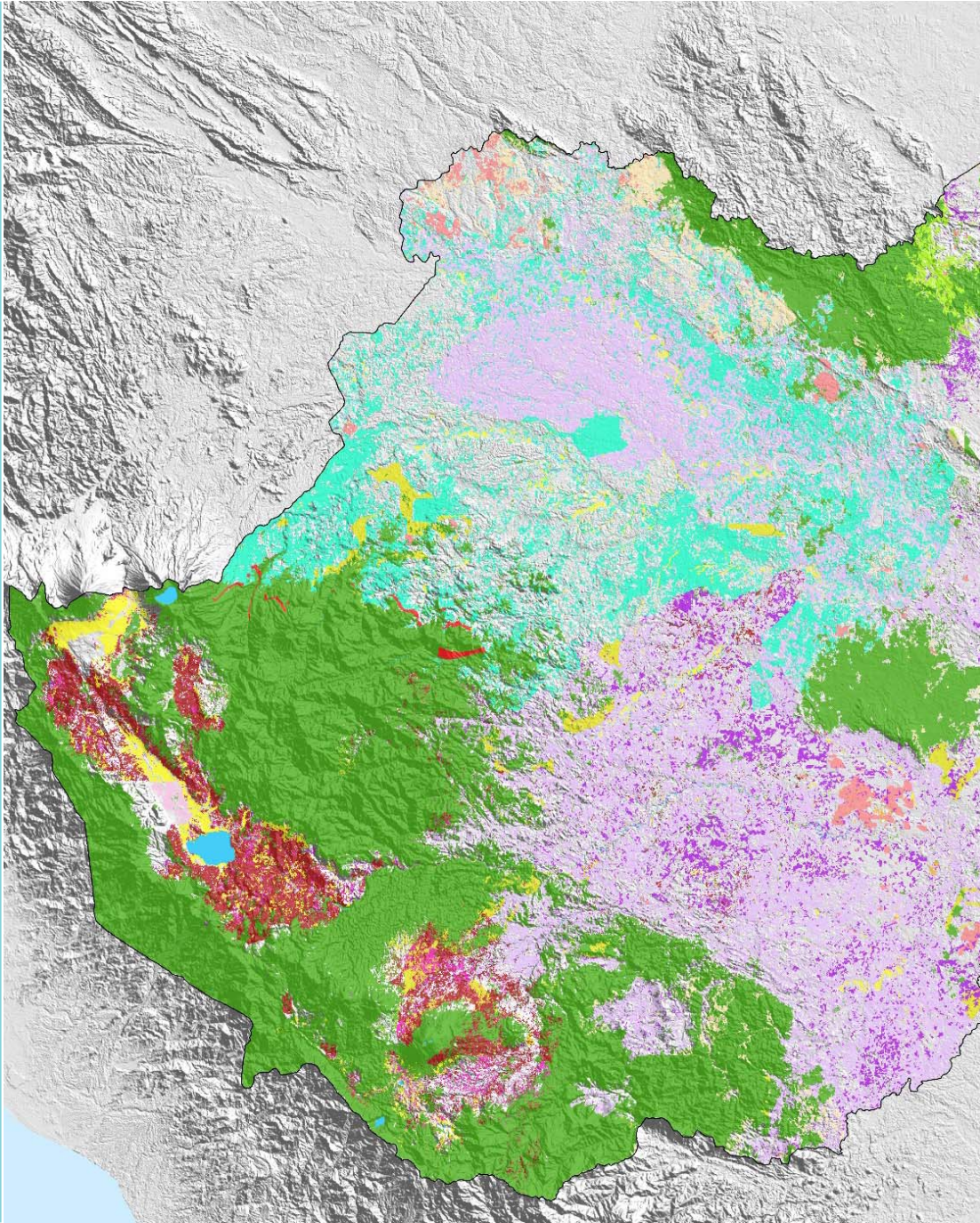
Kayu manis sebagai komoditas khas Jambi memiliki posisi yang unggul dibandingkan produsen kayu manis lain di Indonesia. Untuk mengoptimalkan produksi kayu manis dibutuhkan diversifikasi usaha tani. Sistem agroforestri dapat dikombinasikan dalam upaya ini untuk meningkatkan diversifikasi

dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Penerapan teknologi pasca panen dan pemasaran harus ditingkatkan dalam rangka mengoptimalkan produksi yang sudah ada.

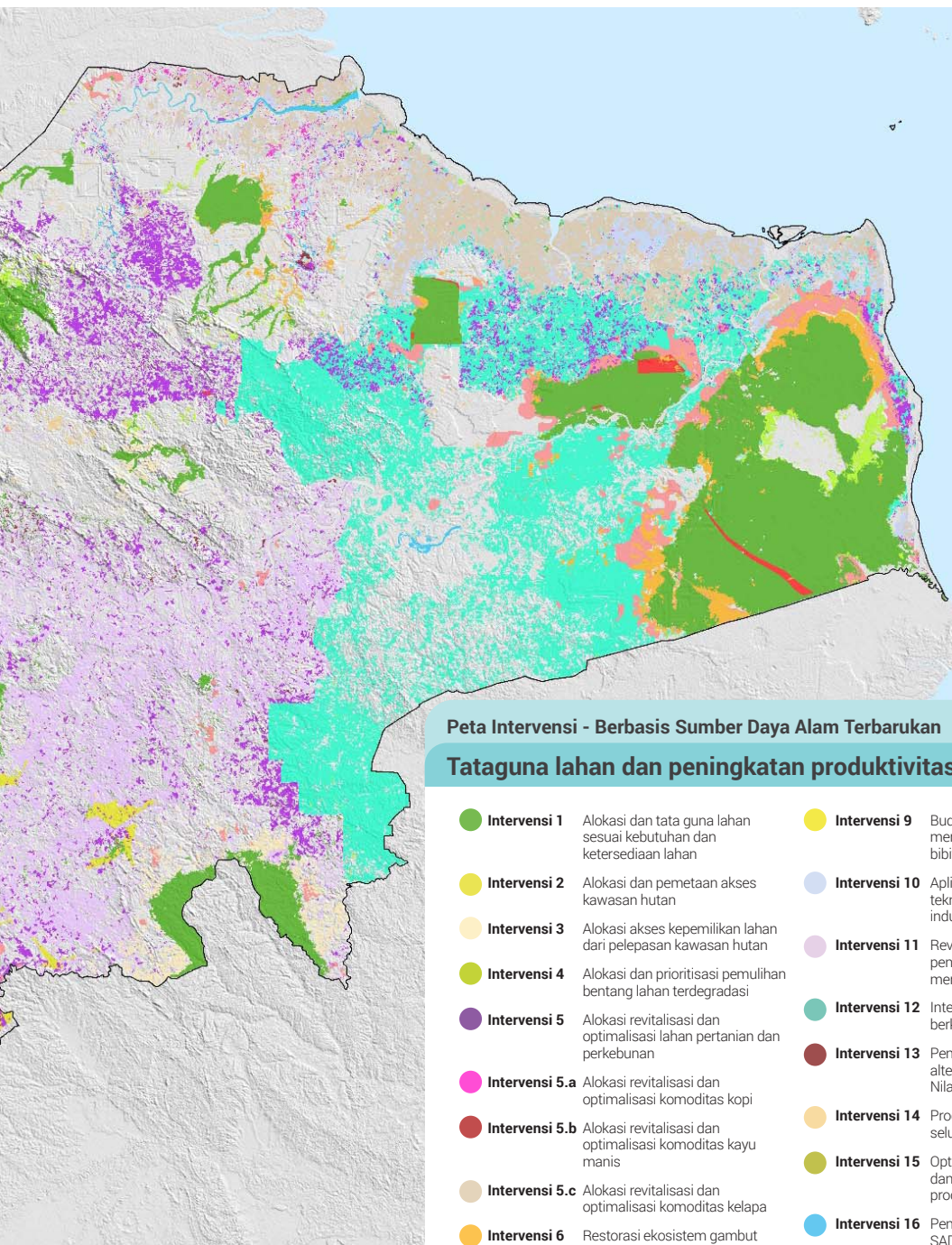
5.4 Peta Intervensi

Setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki intervensi berbeda yang dapat dipetakan berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Peta intervensi disusun berdasarkan 17 intervensi yang ada pada Strategi 1 yaitu Tata guna, Pemulihan, dan Peningkatan Produktivitas Lahan Berkelanjutan (Gambar 5-4). Penyusunan peta intervensi menggunakan data spasial dan statistik yang beragam berdasarkan intervensi yang diusulkan antara lain: peta tutupan lahan tahun 2015-2018, administratif, RTRW Provinsi Jambi, ekoregion, gambut, HTI, HPH, kebun, fungsi kawasan, perkiraan api, burn scar, kesesuaian lahan, PPIAPS, desa miskin, dan TORA.

Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau



Gambar 5-4. Peta intervensi - berbasis sumber daya alam terbarukan



Peta Intervensi - Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan

Tataguna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan

- | | |
|--|--|
| <p>Intervensi 1 Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan</p> <p>Intervensi 2 Alokasi dan pemetaan akses kawasan hutan</p> <p>Intervensi 3 Alokasi akses kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan</p> <p>Intervensi 4 Alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegradasi</p> <p>Intervensi 5 Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan</p> <p>Intervensi 5.a Alokasi revitalisasi dan optimalisasi komoditas kopi</p> <p>Intervensi 5.b Alokasi revitalisasi dan optimalisasi komoditas kayu manis</p> <p>Intervensi 5.c Alokasi revitalisasi dan optimalisasi komoditas kelapa</p> <p>Intervensi 6 Restorasi ekosistem gambut</p> <p>Intervensi 7 Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu</p> <p>Intervensi 8 Pemetaan dan penanganan wilayah konflik</p> | <p>Intervensi 9 Budidaya padi dengan memaksimalkan penggunaan bibit rendah emisi</p> <p>Intervensi 10 Aplikasi GAP, diversifikasi, teknologi serta pembangunan industri kelapa dalam</p> <p>Intervensi 11 Revitalisasi, peremajaan, pengelolaan kebun karet menggunakan GAP</p> <p>Intervensi 12 Intensifikasi budidaya sawit berkualitas</p> <p>Intervensi 13 Pengembangan komoditas alternatif (Enau, Tebu, Bambu, Nilam, Jelutung)</p> <p>Intervensi 14 Program tanaman kehidupan seluas 20% di areal HTI</p> <p>Intervensi 15 Optimalisasi indikasi geografis dan pengembangan industri hilir produk kopi</p> <p>Intervensi 16 Pengembangan & pengolahan SAD perikanan serta hasil perikanan darat-laut</p> <p>Intervensi 17 Pengembangan pertanian perkotaan</p> |
|--|--|

Area Intervensi

Ringkasan estimasi area intervensi indikator untuk tata guna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan berdasarkan batas administrasi

	Intervensi 1	Intervensi 2	Intervensi 3	Intervensi 4	Intervensi 5		Intervensi 6	Intervensi 7	Intervensi 8	Intervensi 9	Intervensi 10	Intervensi 11	Intervensi 12	Intervensi 13	Intervensi 14	Intervensi 15	Intervensi 16	Intervensi 17
Kabupaten	Alokasi dan pemetaan kebutuhan lahan berdasarkan ketersediaan lahan	Alokasi dan pemetaan kawasan hutan	Alokasi akses kepemilikan lahan dari pasangan kawasan hutan terdegradasi	Alokasi dan pemetaan kawasan hutan terdegradasi	Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perikanan	Kayu manis	Kolpa	Restorasi ekosistem gambut	Pengelolaan lahan tepadi	Pemetaan dan penugasan wilayah konflik	Budidaya padi dengan teknologi rendasi emisi	Agulasi konsep diversifikasi, teknologi serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam	Revitalisasi, pemetaan, dan kebun karet menggunakan GAP	Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	Perdagangan komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bumbu, Nyam, dan Jaating	Program tanaman kedelai seluas 20% di areal HTI	Optimalisasi pedasi pengembangan industri hilir untuk produk kopi	Pengembangan dan pengalihan lahan pertanian dan hasil perikanan darat (labur/farming)
Batanghari	66061	14342		29451					3313			116813			2254			
Bungo	103861	10673							827	3092	6113			122706				4047
Kerinci	190258	13676			21970	6972	61418			21224				151		731		5819
Merangin	325605	21433		43321	10549	31887			559	6184			132632	4211		2910		2277
Muaro Jambi	96501			654					13870	17502	2414				183			
Sarolangun	39501	14197	16472		37297	55	33		605	11425				231450				
Tanjung Abung Barat	53967											31058				4381		5777
Tanjung Abung Timur	103890				16145	60989	3960		4147	2083	233							
Tebo	77509		29426		9112	25004	7	38484	10568	24740	2386			93360		1138		
Jambi	6								11539	58	3852							1294
Sungai Penuh	23344																	2674

Area Intervensi

Ringkasan estimasi area intervensi indikator untuk tata guna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan berdasarkan pola ruang Provinsi

	Intervensi 1	Intervensi 2	Intervensi 3	Intervensi 4	Intervensi 5		Intervensi 6	Intervensi 7	Intervensi 8	Intervensi 9	Intervensi 10	Intervensi 11	Intervensi 12	Intervensi 13	Intervensi 14	Intervensi 15	Intervensi 16	Intervensi 17
Pola Ruang	Alokasi dan pemetaan kebutuhan lahan berdasarkan ketersediaan lahan	Alokasi dan pemetaan kawasan hutan	Alokasi akses kepemilikan lahan dari pasangan kawasan hutan terdegradasi	Alokasi dan pemetaan kawasan hutan terdegradasi	Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perikanan	Kayu manis	Kolpa	Restorasi ekosistem gambut	Pengelolaan lahan tepadi	Pemetaan dan penugasan wilayah konflik	Budidaya padi dengan teknologi rendasi emisi	Agulasi konsep diversifikasi, teknologi serta penggunaan dan pemanfaatan produksi dalam	Revitalisasi, pemetaan, dan kebun karet menggunakan GAP	Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	Perdagangan komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bumbu, Nyam, dan Jaating	Program tanaman kedelai seluas 20% di areal HTI	Optimalisasi pedasi pengembangan industri hilir untuk produk kopi	Pengembangan dan pengalihan lahan pertanian dan hasil perikanan darat (labur/farming)
Cagar Alam					3								17					
Hortikultura	29540			936	19134	7951	42537	29432	800	6207	6	38461		60901	70610	43		11475
Hutan Lindung	92987	1321	3962		195	206			272	2096			1699	987		228		10
Hutan Lindung Gambut	46782	252			74		156		2188	639	4822			751				16
Hutan Produksi Terbatas	238964	34038	41863	7362	18806	4178	27181	992	3564	20638	157		54442	78556		5578	654	509
Hutan Produksi Terbatas	135022	4217	12085	7197	4560	1214	6449		10366	7871			11197	5108		8	181	18
Perkebunan	51509			903	173581	7540	12257	82523	2957	20607	61	41713	389818	338343	7392	23		2656
Pemukiman	891			81	7263	257	1024	1397		34			11722	16347			677	651
Pertambangan	14552			295	4586	103	674		409				27970	18671		10	69	152
Pertambangan Migas	3100			109	5515	253	19	1096	367	1431			21426	32548		40	26	1771
Taman Hutan Raya	10344			70	186			1495	3115				3451	442				
Taman Nasional	561468	4786	2271	8956	1019	2004	37	7453	7019	886			828	2354			1309	1456
Taman Wisata Alam	189		50		1								64	3				

Tabel 5-6. Intervensi aksi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi

No.	Intervensi Jambi	Intervensi Zona			Kabupaten/Kota										
		Hulu	Tengah	Hilir	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
Strategi 1 : Tata guna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan															
1.1	Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan memperhatikan area lindung dan kesesuaian lahan melalui penerapan kebijakan satu peta				Penyusunan basis data informasi komoditas	Penyusunan basis data informasi komoditas	Penyusunan basis data informasi komoditas	Penyusunan basis data informasi komoditas	Penyusunan basis data informasi hutan	Penyusunan basis data informasi hutan	Penyusunan basis data informasi hutan	Penyusunan basis data informasi hutan	Penyusunan basis data informasi hutan	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan	
1.2	Alokasi dan penataan akses kawasan hutan untuk penghidupan masyarakat dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskinan				Kajian tipologi perhutanan sosial dan kegiatan masyarakat setempat	- Penam- - Perhutanan Sosial - Moratori- um sawit	- Penam- - Perhutanan Sosial - Moratori- um sawit	- Penam- - Perhutanan Sosial - Moratori- um sawit					Kajian tipologi perhutanan sosial dan kegiatan masyarakat setempat		
1.3	Alokasi akses-kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin (Reforma Agraria)						Kajian definisi dan kriteria desa miskin yang layak diprioritaskan	Facilitasi petani miskin untuk akses kepemilikan lahan	Revisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan penuntutan hutan	Identifikasi lahan yang sesuai untuk pelepasan kawasan	Identifikasi lahan yang sesuai untuk pelepasan kawasan	Kajian definisi dan kriteria desa miskin yang layak diprioritaskan			
1.4	Alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegradasi								Rehabilitasi lahan bekas tambang minyak ilegal	Penentuan prioritas lahan terdegradasi untuk rehabilitasi	Penentuan prioritas lahan terdegradasi untuk rehabilitasi				
1.5	Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan				Penentuan daerah berpotensi budidaya	- Penentuan prioritas revitalisasi kebun karet tua - Moratori- um sawit	Penentuan prioritas revitalisasi kebun karet tua	Penentuan prioritas revitalisasi kebun karet tua		Penetaan distribusi kebun kelapa dalam tua dan prioritas revitalisasi	Penetaan distribusi kebun kelapa dalam tua dan prioritas revitalisasi				
1.6	Restorasi ekosistem gambut					Rehabilitasi lahan bekas tambang	Rehabilitasi lahan bekas tambang		- Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi - Rehabilitasi lahan bekas tambang	Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi	Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi				

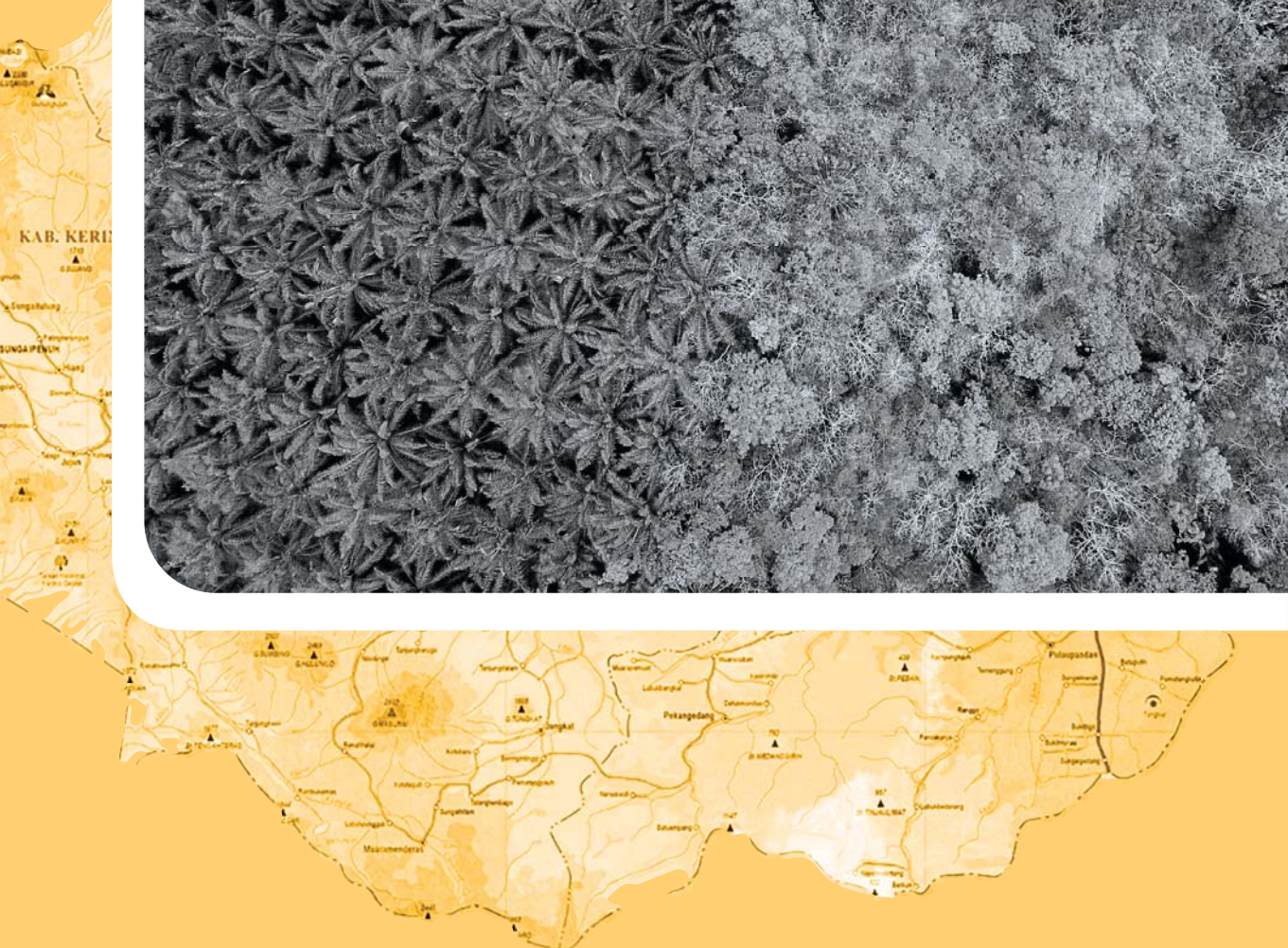
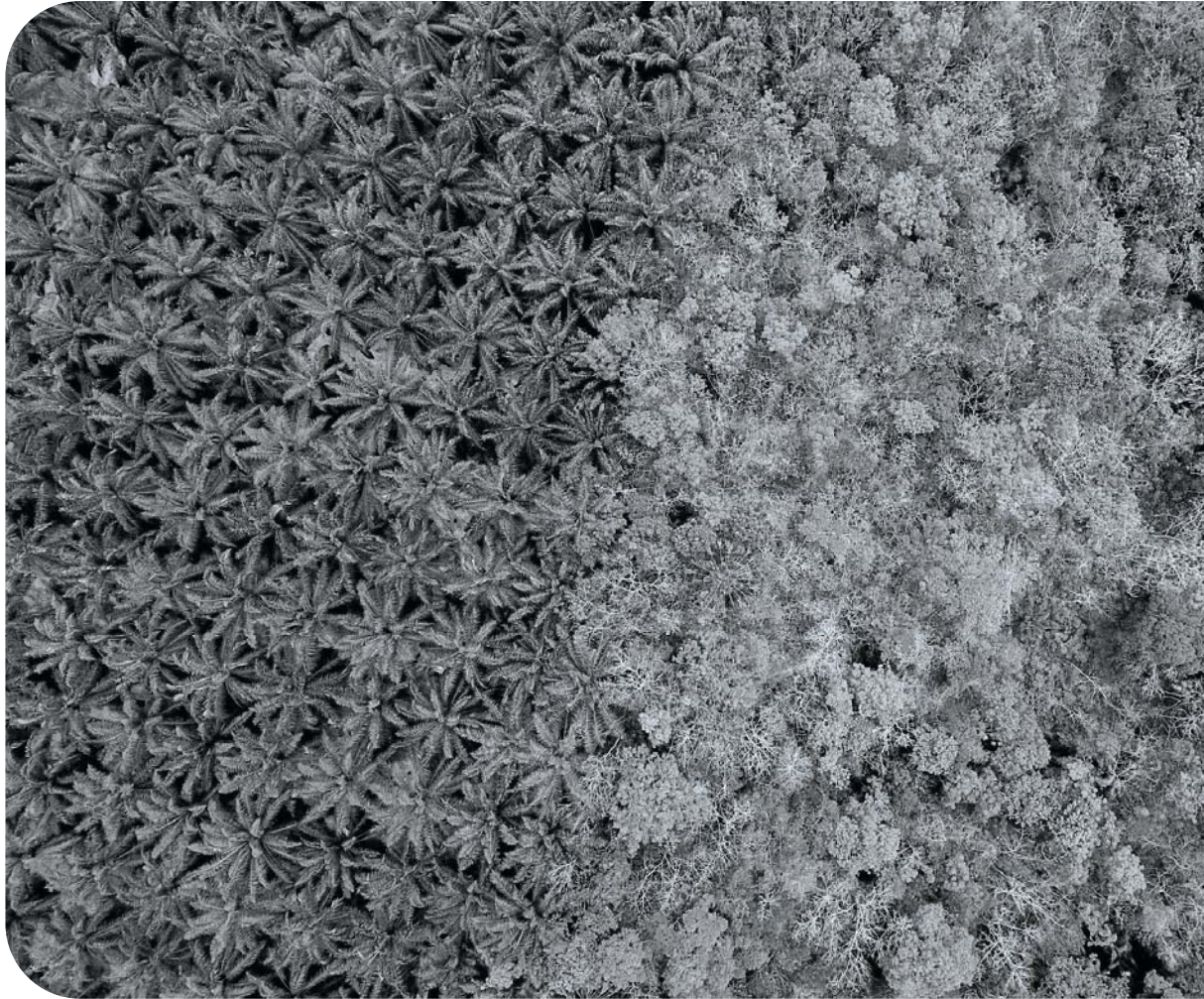
No.	Intervensi Jambi	Intervensi Zona			Kabupaten/Kota										
		Hulu	Tengah	Hilir	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
1.7	Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu					Patroli pencegahan karhutla	- Sosialisasi dan pemasangan papan larangan - Patroli karhutla	Pemetaan wilayah rawa karhutla	- Penanganan pasca kebakaran - Penegakan hukum karhutla	Pemetaan wilayah rawan karhutla	Pemetaan wilayah rawan karhutla	Pemetaan wilayah rawan karhutla	- Sosialisasi dan pemasangan papan larangan - Patroli karhutla		
1.8	Pemetaan dan penanganan wilayah konflik						Sinkronisasi batas kawasan konflik	Sinkronisasi batas kawasan konflik	Pembentukan tim penyelesaian konflik	Identifikasi tipologi dan penyelesaian konflik	Identifikasi tipologi dan penyelesaian konflik	Sinkronisasi batas kawasan rawan konflik	Studi sosial ekonomi dan trenial serta akses lahan masyarakat		
1.9	Budidaya padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan memaksimalkan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik yang berlabel						Pengaktifan kelompok padi rendah emisi	Pengelolaan dan pemanfaatan pupuk organik	Pengelolaan dan pemanfaatan pupuk organik	Pemantauan kualitas air	Pengaktifan kelompok padi rendah emisi	Perencanaan partisipatif dengan petani	Perencanaan partisipatif dengan petani	Pengaktifan kelompok padi rendah emisi	Pemantauan kualitas air
1.10	Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, serta pembangunan industri rakyat kelapa dalam									Pelatihan dan penyuluhan kelompok tani kelapa dalam	Pengelolaan kebun benih induk di tingkat kabupaten				
1.11	Revitalisasi, pemetaan, dan pengelolaan kebun karet menggunakan GAP					Kajian pengelolaan agroforestri karet	Fasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat	Penjaminan pasokan pupuk terjangkau	Kajian pengelolaan agroforestri karet	Distribusi bibit unggul karet	Penjaminan pasokan pupuk terjangkau	Distribusi bibit unggul karet	Distribusi bibit unggul karet	Peremajaan kebun karet	
1.12	Intensifikasi budidaya sawit berkualitas								Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sawit	Penerapan program replanting untuk mencapai ISPO/RSPO	Penerapan program replanting untuk mencapai ISPO/RSPO	Pengembangan agroforestri sawit	Pengembangan agroforestri sawit		
1.13	Pengembangan komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bambu, Nylam, dan Jelutung					Pengembangan komoditas alternatif nilam dan jelutung		Pengembangan komoditas alternatif enau		Pengembangan komoditas alternatif bambu					

No.	Intervensi Jambi	Intervensi Zona			Kabupaten/Kota											
		Hulu	Tengah	Hilir	Batang Hari	Sarolangun	Merangin	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	
2.5	Penyadartahuan, promosi, pembentukan institusi multihak, serta penguatan regulasi untuk penyediaan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, untuk sektor swasta dan masyarakat lokal						Pelatihan tentang jasa lingkungan, pemyaran dan co-investasi jasalingkungan, pembiayaan jasa lingkungan; target untuk pemerintah daerah, LSM dan sektor swasta	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Penguatan kelembagaan dan keahlian koperasi masyarakat/ BUMDES/ lembaga keuangan mikro	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah		
2.6	Peningkatan skala ekonomi melalui penyediaan produk kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang ada						Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Penguatan kelembagaan dan keahlian koperasi masyarakat/ BUMDES/ lembaga keuangan mikro	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	
2.7	Kompensasi/mbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk tata kelola DAS						Peningkatan kapasitas, kelengkapan dokumen dan membuat badan hukum bagi 'Kelompok Tani jasa Lingkungan'	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk tata kelola DAS	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk tata kelola DAS	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	
2.8	Kompensasi/mbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk keanekaragaman hayati						Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam KIPJL	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk keanekaragaman hayati	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk keanekaragaman hayati	Facilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Facilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Facilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Facilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Facilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Facilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	

No.	Intervensi Jambi	Intervensi Zona			Kabupaten/Kota								Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
		Hulu	Tengah	Hilir	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	
2.9	Pasar dan inisiatif karbon sukarela				Identifikasi gap kebijakan dan peraturan an di tingkat provinsi untuk memastikan efisiensi izin skema pasar dan insinitif karbon sukarela, resolusi konflik,	Identifikasi gap kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi untuk memastikan efisiensi izin skema pasar dan insinitif karbon sukarela, resolusi konflik,	Identifikasi gap kebijakan dan peraturan provinsi untuk memastikan efisiensi izin skema pasar dan insinitif karbon sukarela, resolusi konflik,	Facilitasi untuk partisipan pasar karbon sukarela dan juga intermedias, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	Facilitasi untuk partisipan pasar karbon sukarela dan juga intermedias, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	Facilitasi untuk partisipan pasar karbon sukarela dan juga intermedias, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	Facilitasi untuk partisipan pasar karbon sukarela dan juga intermedias, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	Facilitasi untuk partisipan pasar karbon sukarela dan juga intermedias, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	Facilitasi untuk partisipan pasar karbon sukarela dan juga intermedias, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	
2.10	Pasar komoditas air untuk suplai air berkelanjutan									Analisis praktik saat ini dan potensinya untuk pembagian manfaat, termasuk sumber dan tingkat dari dampak lingkungan, penghitungan kompensasi, dan target distribusi air bersih	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan			Pengecekan adanya kompensasi dan pembagian manfaat melalui semua OPD di bawah koordinasi BAPPEDA, BPDAS, dan perusahaan
2.11	Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata				Sosialisasi konsep ekowisata sebagai minat khusus bukan wisata massal (mass tourism)	Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENCANA STRA dalam mendukung wisata di Jambi	Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENCANA STRA dalam mendukung wisata di Jambi	Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENCANA STRA dalam mendukung wisata di Jambi	Sosialisasi konsep ekowisata sebagai minat khusus bukan wisata massal (mass tourism)			Identifikasi dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata	Identifikasi dan penilaian jasa lingkungan dari lokasi ekowisata	

No.	Intervensi Jambi	Intervensi Zona			Kabupaten/Kota										
		Hulu	Tengah	Hilir	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
2.12	Sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, pekebunan dan ketahanan				Pengawasan indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi	Pengawasan indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi	Penyederhanaan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan yang mendukung proses ekologi	Penyederhanaan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan yang mendukung proses ekologi		- Pembebasan lahan - Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional - Pembangunan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri					
Strategi 3: Konektivitas dan rantai nilai berkeadilan															
3.1	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri														
3.2	Peningkatan moda transportasi transportasi di area sentra produksi ke fasilitas pengelolaan atau pasar				Penyediaan alat angkut komoditas			Pengembangan moda transportasi sungai		Penyediaan alat angkut komoditas	Penyediaan alat angkut komoditas	Pembangunan terminal tipe C (Anggdes dan Angkot)			
3.3	Pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan				Penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan strategis guna menunjang pusat-pusat kegiatan antar wilayah				Penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan strategis guna menunjang pusat-pusat kegiatan antar wilayah	Peningkatan status jalan					
3.4	Peningkatan kemudahan dalam akses informasi pasar yang menguntungkan petani				Pembuatan basis data harga komoditas	Pembuatan basis data harga komoditas	Pembuatan basis data harga komoditas	Sosialisasi harga komoditas tingkat desa	Sosialisasi harga komoditas tingkat desa	Pembuatan basis data harga komoditas	Sosialisasi harga komoditas tingkat desa	Sosialisasi harga komoditas tingkat desa	Pembuatan basis data harga komoditas	Pembuatan basis data harga komoditas	Pembuatan basis data harga komoditas

No.	Intervensi Jambi	Intervensi Zona			Kabupaten/Kota										
		Hulu	Tengah	Hilir	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh
3.5	Pembentukan industri turunan kelapa dalam terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani									Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk turunan kelapa dalam	Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk turunan kelapa dalam				
3.6	Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor					Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri
3.7	Optimalisasi pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokal – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih					Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat
3.8	Diversifikasi usaha tani dengan agrobisnis komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis				Penjaminan ketersediaan benih kayu manis										Pembangunan bibit desa dan kebun benih induk di tingkat kabupaten (sentral produksi) untuk pengembangan bibit berkualitas kayu manis





Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Sektor berbasis lahan merupakan penyusun utama ekonomi di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, masih banyak isu terkait dengan pengelolaan lahan yang terjadi. Kegiatan ekonomi di Provinsi Jambi yang didominasi oleh sektor sumber daya alam membutuhkan konektivitas yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan distribusi dengan baik sehingga nilai tambah produk dapat dicapai secara optimal tanpa biaya transportasi yang membebani petani maupun produsen. Perbaikan rantai nilai merupakan sasaran strategis dalam strategi ini yaitu untuk meningkatkan skala ekonomi melalui pengembangan hilirisasi industri secara khusus pada tujuh komoditas unggulan Provinsi Jambi.

Bab 6

Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

6.1 Lini Masa dan Alternatif Pembiayaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Strategi 1. Tata Guna, Pemulihan, dan Peningkatan Produktivitas Lahan Berkelanjutan

Sektor berbasis lahan merupakan penyusun utama ekonomi di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, masih banyak isu terkait dengan pengelolaan lahan yang terjadi. Lahan merupakan sumber daya yang terbatas (*limited resources*) sedangkan pemanfaatannya beragam, melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan memiliki kecenderungan tumpang tindih penggunaan lahan yang tinggi. Strategi yang pertama akan membahas elemen-elemen utama dalam pengelolaan lahan berkelanjutan yaitu melalui perbaikan tata guna lahan, pemulihan lahan yang terdegradasi, dan peningkatan produktivitas pada sektor-sektor lahan yang strategis.

Strategi 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan melalui Peningkatan Akses Terhadap Modal Pembangunan dan Penghidupan (*Livelihood Capitals*) serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi hijau membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang unggul

dan kelembagaan yang kuat dalam rangka mendukung keberlanjutan. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di Provinsi Jambi perlu ditingkatkan terutama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap modal pembangunan dan penghidupan (*livelihood capitals*). Hal ini perlu didukung untuk mencapai pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Selain itu, mekanisme jasa lingkungan juga termasuk dalam strategi ini sebagai upaya pendanaan inovatif untuk memastikan adanya upaya pelestarian lingkungan dalam investasi yang berkelanjutan.

Strategi 3. Konektivitas dan Rantai Nilai Berkelanjutan

Keterhubungan dan aksesibilitas merupakan aspek yang penting dalam menopang ekonomi wilayah terutama bagi Provinsi Jambi dalam menghubungkan nodal-nodal strategis penopang kegiatan masyarakat. Kegiatan ekonomi di Provinsi Jambi yang didominasi oleh sektor sumber daya alam membutuhkan konektivitas yang mampu menghubungkan sentra produksi dan distribusi dengan baik sehingga nilai tambah produk dapat dicapai secara optimal tanpa biaya transportasi yang membebani petani maupun produsen. Perbaikan rantai nilai merupakan sasaran strategis dalam strategi ini yaitu untuk meningkatkan skala ekonomi melalui pengembangan hilirisasi industri secara khusus pada tujuh komoditas unggulan Provinsi Jambi.

Tabel 6-1. Lini masa dan alternatif pembiayaan kegiatan pada strategi 1

Strategi 1: Tata guna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.1	Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan melalui penerapan kebijakan satu peta	Padu serasi antara kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan melalui alokasi kebutuhan pengembangan komoditas melalui penerapan kebijakan satu peta	1.1.1	Penyusunan basis data sistem informasi satu peta	✓	✓			✓							
			1.1.2	Peninjauan kembali dan sinkronisasi izin konsesi dan hak guna usaha melalui program satu peta	✓	✓	✓									
			1.1.3	Pemetaan dan identifikasi komoditas yang dikembangkan saat ini	✓	✓		✓								
			1.1.4	Penataan batas sesuai RTRW melalui peraturan zonasi				✓	✓							
			1.1.5	Penyelenggaraan sistem pemantauan pemanfaatan ruang terutama pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan				✓			✓					
1.2	Alokasi dan pemetaan akses kawasan hutan untuk penghidupan masyarakat dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskinan	Pemerataan pertumbuhan ekonomi di tingkat lanskap melalui alokasi ekspansi HHBK pada lokasi-lokasi desa miskin	1.2.1	Penambahan area Perhutanan Sosial pada lokasi desa tertinggal ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)				✓	✓							
			1.2.2	Harmonisasi, konsultasi, dan pemutakhiran secara berkala Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (HTR, HKM dan HD) dengan RTRW dan peta lainnya yang dimiliki lembaga non-pemerintah.				✓	✓		✓					
			1.2.3	Kajian tipologi Perhutanan Sosial dan aktivitas penghidupan masyarakat setempat (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan)				✓			✓	✓				
			1.2.4	Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan				✓				✓				
			1.2.5	Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat provinsi yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial							✓					
			1.2.6	Fasilitasi kemitraan perhutanan sosial yang melibatkan perusahaan												

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Damba-an Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.3	Alokasi akses-kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk penghijauan di desa miskin (Reforma Agraria)	Tercapainya cita-cita Reforma Agraria terkait penghijauan dan penguasaan lahan di desa miskin dan marginal	1.3.1	Kajian definisi dan kriteria desa miskin yang layak untuk diprioritaskan di sekitar kawasan hutan	✓	✓										
			1.3.2	Identifikasi lahan yang sesuai (feasibility study) untuk pelepasan kawasan	✓		✓									
			1.3.3	Identifikasi kawasan hutan	✓		✓					✓				
			1.3.4	Fasilitasi tim terpadu dalam membuat kajian mengenai perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi.	✓											
			1.3.5	Penyusunan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan	✓		✓					✓				
			1.3.6	Revisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan sentra komoditas	✓											
1.4	Alokasi dan prioritas pemuliharaan lahan terdegradasi	Pemulihan dan pemanfaatan kembali lahan-lahan tidur dan terdegradasi melalui upaya-upaya pengelolaan lahan bersama masyarakat	1.3.7	Fasilitasi petani miskin untuk mendapat akses kepemilikan lahan	✓		✓									
			1.4.1	Penentuan prioritas lahan terdegradasi untuk direhabilitasi di tingkat desa	✓		✓					✓				
			1.4.2	Survei wilayah terdegradasi	✓											
			1.4.3	Penyediaan bibit dan sarpras untuk pengkayaan dengan spesies lokal dan endemik	✓		✓					✓				
			1.4.4	Penanaman dan pemeliharaan	✓	✓	✓	✓				✓				
			1.4.5	Pengawasan dan evaluasi wilayah terdegradasi	✓											
1.5	Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perkebunan melalui revitalisasi lahan	1.4.6	Rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal, mining, dan drilling sesuai peruntukan lahan awal	✓	✓	✓	✓				✓				
			1.5.1	Pemetaan pengembangan/prioritas komoditas di tingkat kabupaten	✓											
			1.5.2	Moratorium izin baru sawit	✓		✓									
			1.5.3	Penentuan daerah potensial budidaya sentra sentra komoditas	✓											
			1.5.4	Pemetaan distribusi kebun tua dan prioritas revitalisasi dan peremajaan 7 komoditas unggulan	✓											
					✓											

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.6	Restorasi ekosistem gambut	Ekosistem gambut alami terjaga dan terkelola sesuai dengan alokasi fungsinya (budidaya, produksi komoditas hutan dan lindung) melalui teknik alami/ penanaman dan infrastruktur.	1.6.1	Pemetaan dan perencanaan kawasan restorasi	✓	✓										
			1.6.2	Survei lokasi untuk kesesuaian pelaksanaan restorasi	✓		✓									
			1.6.3	Peningkatan kapasitas masyarakat (wilayah APL)			✓	✓								
			1.6.4	Penyiapan bahan dan sarana prasarana			✓	✓								
			1.6.5	Pelaksanaan kegiatan (<i>rewetting, revegetation, revitalization</i>)			✓	✓								
			1.6.6	Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi			✓									
1.7	Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu	Risiko dan frekuensi kebakaran hutan rendah pada lahan mineral dan gambut	1.7.1	Sosialisasi dan pemasangan papan larangan	✓											
			1.7.2	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla	✓	✓	✓									
			1.7.3	Penyiapan SDM dan pembentukan tim satgas dan kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah	✓											
			1.7.4	Patroli pencegahan karhutla	✓											
			1.7.5	Pemetaan wilayah rawan karhutla	✓		✓									
			1.7.6	Penanganan pasca kebakaran, pemetaan, penghitungan kerugian, rekomendasi	✓		✓									
1.8	Pemetaan dan penanganan wilayah konflik	Konflik atas lahan terselesaikan secara efektif menuju tatanan sosial yang kondusif	1.7.7	<i>Ground check</i> area atau titik hotspot	✓		✓									
			1.7.8	Penegakan hukum karhutla	✓				✓							
			1.8.1	Sinkronisasi batas kawasan rawan konflik	✓											
			1.8.2	Identifikasi tipologi, pemetaan, dan pembuatan rencana aksi penyelesaian rawan konflik	✓		✓									
			1.8.3	Pembentukan dan penguatan tim penyelesaian konflik (di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Sektoral)	✓	✓	✓									
			1.8.4	Mediasi penyelesaian konflik antar pihak terkait	✓	✓										
			1.8.5	Fasilitasi penyelesaian konflik melalui nota kesepakatan	✓	✓										
			1.8.6	Studi sosial ekonomi, tenurial, dan akses lahan masyarakat sekitar hutan	✓		✓									

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			1.8.7	Konsultasi dengan masyarakat sekitar untuk penentuan zonasi		✓		✓		✓						
1.9	Budidaya padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan memaksimalkan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik yang berlabel	Budidaya padi sawah (irigasi, non-irigasi, dan rawa gambut) yang rendah emisi dan terpadu menjadi praktik umum dan berkelanjutan bagi petani	1.9.1	Pengaktifan praktik padi rendah emisi pada kelompok tani		✓	✓									
			1.9.2	Pembangunan demplot varietas padi rendah emisi dan metode <i>System of Rice Intensification</i> (SRI)		✓	✓									
			1.9.3	Sosialisasi untuk kelompok tani mengenai penggunaan bibit rendah emisi dan pupuk organik berlabel				✓								
			1.9.4	Pemberian subsidi bibit padi varietas unggul rendah emisi dan varietas lokal		✓										
			1.9.5	Pemantauan kualitas air irigasi agar bebas polutan		✓			✓							
			1.9.6	Penyuluhan melalui sekolah lapang untuk meningkatkan kualitas benih, cara seleksi, dan penanganan hama penyakit		✓										
			1.9.7	Pengelolaan dan pemanfaatan pupuk organik					✓	✓						
			1.9.8	Perencanaan partisipatif petani untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP)		✓			✓							
1.10	Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, serta pembangunan industri rakyat kelapa dalam	Budidaya kelapa dalam berkelanjutan, terpadu dengan diversitas komoditas, serta teknologi panen dan pasca panen untuk menghasilkan komoditas dengan produktivitas yang baik	1.10.1	Pelatihan dan penyuluhan kelompok tani kelapa dalam untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen petani		✓	✓									
			1.10.2	Peremajaan perkebunan kelapa dalam												
			1.10.3	Pengembangan tumpang sari kelapa dalam dengan pinang, kopi, dan cokelat					✓	✓						
			1.10.4	Pembangunan nurseri mandiri desa							✓					
			1.10.5	Pengelolaan kebun benih induk di tingkat kabupaten untuk pengembangan bibit berkualitas					✓	✓						
			1.10.6	Penguatan kelembagaan kelompok tani kelapa dalam					✓							
			1.10.7	Penguatan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) kelapa dalam		✓										

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.11	Revitalisasi, peremajaan, dan pengelolaan kebun karet menggunakan GAP	Budidaya karet berkelanjutan, terpadu dengan diversifikasi komoditas untuk menghasilkan karet dengan produktivitas yang baik	1.11.1	Kajian pengelolaan agroforestri karet dengan tanaman sela produktif	✓				✓							
			1.11.2	Penyuluhan praktik pertanian yang baik (GAP) pada budidaya karet	✓		✓		✓							
			1.11.3	Distribusi bibit unggul karet dan tanaman sela (kopi, cokelat, dsb)	✓				✓	✓	✓					
			1.11.4	Fasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat, termasuk dukungan peningkatan kualitas pembibitan lokal di penangkar	✓					✓						
			1.11.5	Penjaminan pasokan pupuk terjangkau dan informasi pemupukan berimbang	✓		✓	✓	✓	✓						
1.12	Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	Budidaya sawit berkelanjutan, berstandar sertifikasi nasional dan global, terpadu dengan diversitas komoditas dan ternak, serta teknologi panen dan pasca panen yang menghasilkan kelapa sawit dengan rendemen tertentu yang memenuhi standar PKS.	1.11.6	Peremajaan perkebunan karet					✓	✓						
			1.12.1	Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sawit	✓											
			1.12.2	Penyediaan benih unggul bersertifikat kelapa sawit	✓				✓	✓						
			1.12.3	Penguatan bisnis pembibitan kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan benih bersertifikat oleh masyarakat	✓		✓									
			1.12.4	Penerapan program replanting dan pembinaan kebun plasma dan kebun kelapa sawit rakyat untuk mencapai standar sertifikasi ISPO/RSPo												
			1.12.5	Pengembangan opsi agroforestri sawit dengan tanaman komoditas dan ternak (sapi) terutama untuk kebun di atas 8 tahun.	✓		✓	✓	✓	✓						
			1.12.6	Pengembangan pola kemitraan antara inti dan plasma	✓				✓							
			1.12.7	Peningkatan akses petani ke pendanaan usaha tani dan mempermudah persyaratan untuk KUR	✓		✓	✓	✓							

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.13	Pengembangan komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bambu, Nylam, dan Jelutung yang bernilai tambah	Produksi komoditas alternatif seperti Enau, Tebu, Bambu, Nylam, dan Jelutung yang bernilai tambah	1.13.1	Penyediaan bibit berkualitas untuk komoditas alternatif	✓	✓	✓	✓								
			1.13.2	Penggunaan teknologi pasca panen	✓	✓		✓								
			1.13.3	Pengembangan produk turunan bambu	✓				✓							
			1.13.4	Pengembangan tebu integrasi ternak	✓			✓								
			1.13.5	Peningkatan investasi di tebu	✓			✓	✓							
			1.13.6	Industri pengolahan gula pasir skala besar					✓		✓					
1.14	Program tanaman kehutanan seluas 20% di areal HTI	Kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan meningkat serta pencegahan kebakaran dengan pengembangan agroforestri yang sesuai dengan kearifan lokal	1.14.1	Penyadartahuan, penyuluhan mengenai konsep tanaman kehidupan dan skema pelaksanaannya bagi masyarakat lokal	✓	✓		✓								
			1.14.2	Pemetaan lahan dalam zona tanaman kehidupan secara partisipatif	✓	✓										
			1.14.3	Penyusunan perjanjian kemitraan mengikat, termasuk indikator M&E	✓	✓										
			1.14.4	Fasilitasi opsi pembiayaan alternatif program Tanaman Kehidupan	✓	✓		✓	✓							
			1.14.5	Identifikasi opsi agroforestri bagi-hasil tanaman kayu produktif, yang sesuai dengan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat	✓											
1.15	Optimalisasi Indikasi Geografis dan pengembangan industri hilir untuk produk kopi	Agroindustri kopi berbasis masyarakat berfokus pada kopi berindikasi-geografis dengan nilai tambah dan daya saing kuat	1.15.1	Penyuluhan GAP diversifikasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara hayati, serta sambung pucuk oleh penyuluh bersertifikasi	✓											
			1.15.2	Pengelolaan produksi hasil perkebunan	✓	✓										
			1.15.3	Perluasan area perkebunan kopi terbatas berdasarkan kesesuaian lahan dan tidak merambah hutan	✓											
			1.15.4	Pembangunan demplot untuk agroforestri kopi dikombinasikan dengan ternak kambing, sekaligus praktek pembuatan kompos dan strip rumput penahan erosi	✓	✓	✓	✓								
			1.15.5	Perbaikan teknik pemanenan dan pemasaran, seperti penjaminan petik merah	✓											

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
1.16	Pengembangan dan pengolahan SAD perikanan darat dan laut	Meningkatkan produk dan produksi hasil olahan perikanan secara berkelanjutan	1.15.6	Penguatan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodil) kopi	✓				✓							
			1.15.7	Pembangunan pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan					✓	✓						
			1.15.8	Pembangunan pusat promosi produksi					✓							
			1.15.9	Keterlibatan dalam event seperti Festival Kopi dan pameran		✓			✓							
			1.15.10	Pelatihan barista secara publik untuk generasi muda		✓										
			1.15.11	Optimalisasi dan penambahan varietas kopi Indikasi Geografis, seperti Merangin Arabika dan Robusta		✓	✓									
			1.15.12	Dukungan terhadap kegiatan Pentahelix (multi-pihak): integrasi budidaya, agrowisata, pemasaran		✓			✓							
			1.16.1	Penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya					✓							
			1.16.2	Kegiatan bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan		✓	✓									
			1.16.3	Melakukan diversifikasi produk olahan		✓			✓							
			1.16.4	Sosialisasi standar kelayakan pengolahan (SKP)		✓			✓							
			1.16.5	Sosialisasi kampanye GEWARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)		✓			✓							
1.17	Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming)	Meningkatnya produksi dan diversifikasi pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan disekitar permukiman masyarakat	1.16.6	Pelaksanaan lomba masak serba ikan				✓	✓	✓						
			1.16.7	Pengelolaan lubuk larangan dan suaka perikanan												
			1.16.8	Pembangunan sentra budidaya ikan-ikan lokal												
			1.17.1	Intensifikasi lahan berpotensi untuk kegiatan <i>urban farming</i>												
			1.17.2	Sosialisasi dan pendampingan kegiatan <i>urban farming</i> pada setiap wilayah yang berpotensi												
			1.17.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk penyediaan pasar bagi produk <i>urban farming</i>												

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPB; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

Tabel 6-2. Lini masa dan alternatif pembiayaan kegiatan pada strategi 2

Strategi 2: Kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan jasa lingkungan

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan										Lini Masa		
															2019-2024	2025-2030	2031-2035
2.1	Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang solid	Kapasitas masyarakat yang tinggi secara individu maupun kelompok termasuk kaum marginal, kaum muda dan perempuan, dalam mengelola lahan dan hutan dengan kearifan lokal	2.1.1	Penetapan kelembagaan dan pendampingan terhadap kelompok pertanian dan kehutanan	✓	✓											
			2.1.2	Sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan pertanian dan kehutanan oleh NGO dan pemerintah			✓										
			2.1.3	Penguatan kapasitas Gabungan antar Kelompok Tani (Gapoktan)			✓		✓								
			2.1.4	Peningkatan partisipasi anggota kelompok tani termasuk petani wanita dan taruna tani			✓										
2.2	Pengembangan akses permodalan bagi masyarakat	Akses yang mudah bagi masyarakat ke sumber-sumber permodalan serta sarana dan prasarana produksi	2.1.5	Perencanaan dan pengelolaan KPH		✓		✓									
			2.2.1	Penumbuhan dan pengembangan KEP (Kelompok Ekonomi Petani), Koperasi, Badan Usaha Milik Petani	✓	✓		✓									
			2.2.2	Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)		✓											
			2.2.3	Kemitraan dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha (pertanian, perkebunan, perikanan)					✓	✓							
			2.2.4	Sosialisasi sumber akses modal untuk masyarakat			✓	✓									
			2.2.5	Penguatan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam administrasi dan pengelolaan keuangan					✓	✓							
			2.2.6	Revitalisasi koperasi		✓	✓										
2.3	Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu (satu desa satu penyuluhan)	2.2.7	Fasilitasi penyediaan asuransi bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan		✓											
			2.3.1	Penguatan balai penyuluhan (pertanian, kehutanan, dan lainnya)		✓	✓										
			2.3.2	Standarisasi penyuluhan		✓	✓	✓									
			2.3.3	Peningkatan kompetensi penyuluhan			✓	✓									
			2.3.4	Peningkatan anggaran operasional penyuluhan dan penyuluhan		✓			✓								
			2.3.5	Peningkatan penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk penyuluhan		✓	✓	✓									
			2.3.6	Pemberdayaan penyuluhan swadaya			✓	✓	✓								
			2.3.7	Peningkatan pendampingan teknis kepada masyarakat oleh perusahaan					✓	✓							

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035	
2.4	Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi	Implementasi restorasi terwujud melalui dana publik, serta dukungan sektor swasta dan mitra internasional	2.3.8	Pembuatan demplot atau bioplot					✓	✓							
			2.3.9	Pembelajaran sukses dari tempat lain			✓										
			2.3.10	Koordinasi, monitoring dan evaluasi			✓	✓									
			2.4.1	Penguatan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat (e.g.: Masyarakat Peduli Api, GAPOKTAN, masyarakat desa di daerah penyangga) dan pemerintah (provinsi, kabupaten, desa)		✓	✓		✓								
			2.4.2	Alokasi dana untuk melakukan kegiatan restorasi lahan di luar kegiatan sosialisasi dan pencegahan		✓		✓				✓					
			2.4.3	Pembangunan kemitraan yang melibatkan multipihak		✓					✓						
2.5	Penyadartahuan, promosi, pembentukan institusi multipihak, serta penguatan regulasi untuk penyediaan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, untuk sektor swasta dan masyarakat lokal	Kesadaran masyarakat terhadap konsep jasa lingkungan, institusi multipihak yang mampu melakukan penghimpunan, pemupukan, penyaluran dan pemantauan capaian pemakaian dana secara adil dan efisien, serta didukung oleh regulasi dan kebijakan efektif dalam menghasilkan jasa lingkungan.	2.4.4	Perencanaan penyuluhan tentang restorasi untuk masyarakat di sekitar kawasan gambut dan Taman Nasional (terutama dalam hal perluasan lahan menggunakan sistem bakar)		✓											
			2.4.5	Optimalisasi fungsi TRGD untuk melaksanakan kegiatan kemitraan restorasi lahan gambut		✓				✓							
			2.4.6	Optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara transparan		✓				✓							
			2.4.7	Inisiasi penganggaran restorasi dari dana non-pemerintah						✓	✓						
			2.5.1	Penyadartahuan dan mempromosikan konsep jasa lingkungan dan penerapannya		✓											
			2.5.2	Pelatihan tentang jasa lingkungan, pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan, pembiayaan jasa lingkungan; target untuk pemerintah daerah, LSM dan sektor swasta		✓					✓						
2.6	Peningkatan skala ekonomi melalui penyediaan produk kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang ada	Meningkatnya kemampuan keuangan petani yang didukung oleh penyediaan modal, kemampuan dalam pengelolaan keuangan, dan dukungan kelembagaan keuangan desa (BUMDES)	2.5.3	Fasilitasi dan pembentukan insitusi multipihak untuk melakukan penghimpunan, pemupukan, penyaluran dan pemantauan capaian pemakaian dana		✓		✓	✓								
			2.5.4	Revisi regulasi terkait jasa lingkungan dan instrumen jasa lingkungan		✓				✓	✓						
			2.6.1	Penguatan kelembagaan dan keahlian koperasi masyarakat/ BUMDES/ lembaga keuangan mikro		✓		✓									
			2.6.2	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah		✓											
			2.6.3	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan		✓					✓						
			2.6.4	Pengawasan pemanfaatan dana desa							✓	✓					

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
2.7	Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk tata kelola DAS	Tata kelola DAS yang terintegrasi dan terukur melalui penerapan KIPJL yang operasional dan berdampak positif bagi masyarakat	2.7.1	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk tata kelola DAS	✓	✓			✓	✓			✓			
			2.7.2	Peningkatan kapasitas, kelengkapan dokumen dan membuat badan hukum bagi 'kelompok Tani Jasa Lingkungan' yang berasal dari kelompok tani yang sudah ada atau lembaga/ kelompok masyarakat desa lainnya	✓				✓	✓			✓			
			2.7.3	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	✓				✓	✓			✓			
			2.7.4	Kordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi	✓				✓	✓			✓			
2.8	Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk keanekaragaman hayati	Keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi yang mendukung tujuan konservasi dan bermanfaat bagi masyarakat lokal	2.7.5	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL	✓				✓	✓						
			2.7.6	Sistem insentif dan disinsentif untuk kabupaten dan desa lokasi PETI: hulu (Merangin, Sorolangun, Mersam, Muara Panco, dll) terutama di skala sub-DAS.	✓				✓	✓			✓			
			2.8.1	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk keanekaragaman hayati	✓	✓			✓	✓						
			2.8.2	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat					✓		✓					
2.9	Pasar dan insiatif karbon sukarela	Pasar dan insiatif karbon sukarela yang operasional, berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendukung pencapaian target daerah dalam mengurangi emisi GRK.	2.8.3	Kordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi	✓	✓			✓	✓			✓			
			2.8.4	Penguatan peran swasta dan pemangku kepentingan lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL	✓				✓							
			2.9.1	Identifikasi gap kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi untuk memastikan efisiensi izin skema pasar dan insiatif karbon sukarela, dan resolusi konflik	✓				✓	✓			✓			
			2.9.2	Fasilitasi untuk partisipan pasar Karbon sukarela dan juga intermediaries, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	✓				✓	✓			✓			
2.9.3			2.9.3	ToT untuk monitoring dan pengukuran karbon di tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat	✓	✓			✓	✓	✓		✓			
			2.9.4	Dukungan terhadap LSM untuk memfasilitasi pengukuran karbon, pelibatan masyarakat dan negosiasi pasar karbon sukarela	✓				✓				✓			

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
2.10	Pasar komoditas air untuk suplai air berkelanjutan	Pasar komoditas air berdampak positif bagi masyarakat melalui suplai air adil merata.	2.10.1	Analisis praktik saat ini dan potensinya untuk pembagian manfaat, termasuk sumber dan tingkat dari dampak lingkungan, penghitungan kompensasi, dan target distribusi air bersih	✓			✓					✓			
			2.10.2	Pengecekan adanya kompensasi dan pembagian manfaat melalui semua OPD di bawah koordinasi BAPPEDA, BPDAS, dan perusahaan	✓			✓	✓							
			2.10.3	Penerapan sistem monitoring sebagai basis untuk negosiasi dan pembaruannya	✓											
			2.10.4	Penilaian dan peningkatan efisiensi kinerja PDAM, khususnya dalam menyediakan dan menyalurkan air bersih di daerah perkotaan	✓				✓							
			2.10.5	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan	✓			✓	✓	✓			✓			
2.11	Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata: wisata lanskap umum dan wisata minat khusus	Industri ekowisata dengan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan pengelolaan lingkungan	2.11.1	Sosialisasi konsep ekowisata sebagai wisata minat khusus bukan wisata massal (<i>mass tourism</i>)	✓				✓							
			2.11.2	Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENSTRA dalam mendukung wisata di Jambi	✓	✓		✓	✓			✓				
			2.11.3	Identifikasi dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata	✓				✓					✓		
			2.11.4	Pengembangan rencana partisipatif dengan komunitas lokal tentang bagaimana tempat ekowisata dan menyediakan nilai tambah dari ekowisata sebagai bagian dari program diversifikasi pendapatan	✓			✓	✓	✓						
			2.11.5	Perbaikan sistem tiket untuk lokasi ekowisata, dan mengidentifikasi bagaimana membiayai konservasi dari pendapatan ekowisata				✓								
			2.11.6	Identifikasi dan penilaian jasa lingkungan dari lokasi ekowisata	✓				✓							
			2.11.7	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di daerah wisata.									✓			

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
2.12	Sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, pekebunan dan kehutanan	Dampak positif secara ekologis dan ekonomis bagi petani dan masyarakat sekitar, pengusaha serta konsumen tersertifikasi dalam skala yang lebih luas	2.12.1	Integrasi program pembangunan pertanian pada area yang potensial untuk mendapatkan sertifikasi	✓				✓							
			2.12.2	Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari basis data provinsi untuk program sertifikasi (lingkungan, ekonomi dan sosial).	✓											
			2.12.3	Pengawasan indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian dari basis data provinsi	✓							✓				
			2.12.4	Penyederhanaan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk pekebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi, misahya agroforestri.	✓		✓									
			2.12.5	Aplikasi sistem insentif (pengurangan pajak) untuk perusahaan berkelanjutan dan sistem dsinseftr (denda) untuk perusahaan pelanggar.	✓	✓										
			2.12.6	Pengembangan dan integrasi indikator hijau untuk sistem finansial agribisnis	✓	✓		✓				✓				
			2.12.7	Penyederhanaan perizinan HTI sebagai sistem insentif jika perusahaan sudah mengaplikasikan sertifikasi berkelanjutan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), <i>Forest Law Enforcement, Governance and Trade</i> (FLEGT), dan <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC), sesuai dengan tuntutan konsumen global, dengan bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah (LSM)	✓			✓	✓			✓				
			2.12.8	Analisis sistem perizinan dan sertifikasi kayu yang tumpang tindih, dan mengaplikasikannya di tingkat provinsi serta memberikan rekomendasi di tingkat nasional	✓				✓							

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

Tabel 6-3. Lini masa dan alternatif pembiayaan kegiatan pada strategi 3

Strategi 3: Konektivitas dan rantai nilai berkeadilan

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
3.1	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri	Adanya pelabuhan dan sarana pendukung yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan menyalurkan barang dari Provinsi Jambi (outlet ekonomi)	3.1.1	Pembebasan lahan pembangunan pelabuhan	✓	✓			✓							
			3.1.2	Pembangunan akses jalan menuju pelabuhan	✓	✓			✓							
			3.1.3	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri			✓		✓			✓				
3.2	Peningkatan moda transportasi di area sentra produksi ke fasilitas pengelolaan atau pasar	Kemudahan distribusi hasil produksi melalui penyediaan jalan penghubung yang dapat menurunkan biaya angkutan	3.1.4	Pembangunan sarana pergudangan	✓				✓	✓						
			3.2.1	Pengembangan moda transportasi sungai	✓	✓			✓							
			3.2.2	Pembangunan jaringan kereta api	✓	✓	✓		✓							
			3.2.3	Pembangunan terminal tipe C (Angdes dan Angkot)												
3.3	Pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan	Adanya keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan	3.2.4	Penyediaan alat angkut komoditas	✓	✓	✓		✓	✓						
			3.3.1	Penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan strategis guna menunjang pusat-pusat kegiatan antar wilayah	✓											
			3.3.2	Pemeliharaan jalan dan jembatan												
			3.3.3	Peningkatan status jalan	✓	✓										

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
														2019-2024	2025-2030	2031-2035
3.4	Peningkatan kemudahan dalam akses informasi pasar yang menguntungkan petani	Membaiknya keuntungan petani yang didukung oleh informasi pasar yang memadai	3.4.1	Pembuatan basis data harga komoditas	✓	✓										
			3.4.2	Sosialisasi harga komoditas hingga tingkat desa		✓	✓									
3.5	Pembentukan industri turunan kelapa dalam terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani	Industri kelapa dalam terpadu yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani	3.5.1	Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk turunan kelapa dalam	✓	✓										
			3.5.2	Pengembangan industri pengolahan kelapa dalam (contoh: batok untuk briket arang, minyak VCO, nata de coco)		✓	✓			✓						
			3.5.2	Fasilitasi investasi industri pengolahan dengan menjamin penyediaan bahan baku kelapa dalam	✓	✓										
			3.5.2	Pengembangan sistem insentif untuk industri kelapa dalam	✓	✓										
3.6	Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor	Meningkatnya nilai tambah dari produk turunan karet	3.6.1	Studi kelayakan dan teknologi pengelolaan karet tepat guna untuk pembangunan produk hilir karet, termasuk industri berbasis lateks, <i>crumb rubber mini</i> , <i>scraper rubber mini</i> dan pengolahan karet pekat	✓	✓										
			3.6.2	Fasilitasi kemitraan sektor swasta dan pelaku usaha, termasuk dengan perbankan untuk modal usaha	✓	✓										
			3.6.3	Fasilitasi pendirian pabrik produk turunan karet sesuai dengan kajian pada bagian sebelumnya	✓	✓										

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035	
3.7	Optimalisasi pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bakar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	Rantai pemasaran karet mentah dengan posisi tawar petani yang kuat untuk sistem perdagangan dan ekonomi desa yang adil di tingkat petani	3.6.4	Pengembangan skema investasi dengan melibatkan petani karet sebagai investor	✓				✓								
			3.6.5	Penentuan syarat-syarat investasi industri rumah karet baru yaitu minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	✓												
			3.6.6	Penjaminan konsistensi kualitas pasca panen karet siap jual						✓	✓						
			3.6.7	Pembangunan industri pengelolaan produk turunan karet terpadu untuk meningkatkan nilai tambah (contoh: aspal karet, sarung tangan, aksesoris motor, balon, ban, vulkanisir)						✓	✓	✓					
			3.7.1	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	✓					✓							
			3.7.2	Peningkatan peran kelompok tani di mekanisme pasar UPPB dengan peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak dan juknis kelompok, terutama mengenai proses panen yang baik dan pengenalan mutu karet	✓	✓											
			3.7.3	Perbaikan sistem manajemen UPPB dengan menerbitkan sertifikat pengumpul sesuai dengan lokasi UPPB	✓					✓							
3.7.4			Pengawasan di pasar lelang untuk menghindari praktek ilegal, oknum monopoli harga, dan menjamin mekanisme pasar	✓	✓												

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan	Lini Masa
					1 2 3 4 5 6 7 8 9	2019-2024 2025-2030 2031-2035
3.8	Diversifikasi usaha tani dengan agroforestri komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis	Produksi kayu manis yang berkualitas dan terdiversifikasi dengan nilai tambah yang menguntungkan petani	3.7.5	Penegakan hukum dan penguatan regulasi agar sistem insentif dan disinsentif berjalan untuk memperbaiki mutu karet bersih melalui UPBB	✓	
			3.7.6	Pengembangan diversifikasi pemasaran dengan pembeli boka baru	✓ ✓ ✓	
			3.8.1	Kerjasama dengan KPH program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan budidaya dan produk kayumanis di dalam kawasan melibatkan masyarakat	✓	
			3.8.2	Penjaminan ketersediaan benih kayu manis		
			3.8.3	Pembangunan pembibitan mandiri desa dan kebun benih induk di tingkat kabupaten (sentral produksi) untuk pengembangan bibit berkualitas kayu manis dan tanaman agroforestri lainnya	✓ ✓	
			3.8.4	Pembangunan demplot agroforestri dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi (kopi, cabe, hortikultur bawah naungan)	✓ ✓	
			3.8.5	Pelatihan diversifikasi usaha dengan sistem agroforestri dan agrowisata di area perkebunan rakyat kayu manis	✓	

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. ELH

No.	Intervensi Jambi	Capaian Dambaan Jambi	No.	Aktivitas Jambi	Potensi Pembiayaan									Lini Masa		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	2019-2024	2025-2030	2031-2035
			3.8.6	Peningkatan mutu dan nilai tambah produk turunan kayu manis					✓	✓						
			3.8.7	Optimalisasi Indikasi Geografis produk kayumanis	✓				✓							
			3.8.8	Peningkatan kualitas teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis berindikasi geografis.			✓	✓	✓							
			3.8.9	Fasilitasi pemasaran produk kayu manis dan produk agroforestri dengan kualitas tinggi	✓				✓							
			3.8.10	Pelibatan BEKRAF dalam melakukan peningkatan branding produk kayu manis asal Jambi	✓				✓							

Keterangan kolom Potensi Pembiayaan: 1. DAK; 2. APBD Provinsi; 3. APBD Kabupaten/Kota; 4. Dana Desa; 5. Hibah Daerah; 6. KPBU; 7. Pinjaman Daerah; 8. Obligasi; 9. IELH

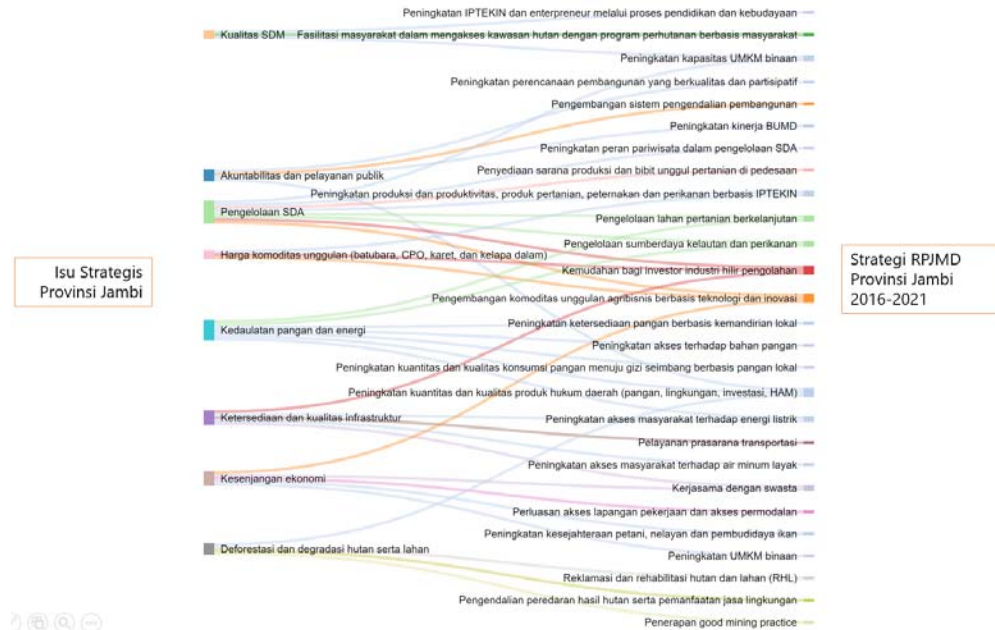
6.2 Program-Program Tematik

Program tematik merupakan suatu rancangan yang difokuskan pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan prioritas. Penyusunan program-program tematik mengacu pada program strategis RPJMD Provinsi Jambi, isu strategis provinsi, dan kegiatan-kegiatan prioritas pada rencana induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Dengan adanya program-program tematik yang dijabarkan secara rinci, diharapkan kegiatan-kegiatan dapat dirunut untuk dapat menghimpun parapihak mencapai tujuan tematik. Pada dokumen RPJMD Provinsi Jambi terdapat 11 isu strategis dan 73 strategi yang akan dipetakan berdasarkan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi hijau untuk mendapatkan rancangan program-

program tematik di Provinsi Jambi. Pada Gambar 6-1 dapat dilihat kaitan antara isu strategis dan strategi yang ada pada dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Keterkaitan ini membentuk kecenderungan pada beberapa isu utama yang mengerucut pada tiga program tematik yang ditawarkan dalam Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yaitu:

1. Industri hilir komoditas karet
2. Pengembangan industri kayu
3. Penguatan komoditas kelapa dalam

Penyusunan program tematik menjadi dasar bagi pembuatan rencana usaha (*business plan*). Tiga program tematik yang ditawarkan dalam rencana induk ini dapat memberikan opsi investasi bagi pihak swasta untuk menanamkan modal pada bidang usaha strategis di Provinsi Jambi.



Gambar 6-1. Pemetaan isu strategis dan strategi Provinsi Jambi

1. Program Tematik 1: Pengembangan Industri Hilir Komoditas Karet

• Tautan Strategi

Program tematik satu terkait dengan strategi 1 (alokasi dan produktivitas), strategi 2 (kelembagaan petani karet dan akses terhadap permodalan), dan strategi 3 (rantai nilai).

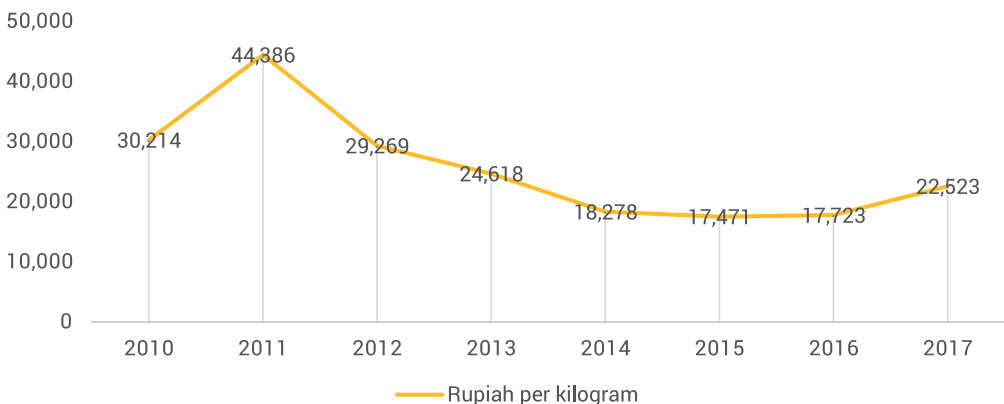
• Latar Belakang

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas penting dunia. Permintaan konsumsi karet dunia meningkat setiap tahun dengan rata-rata sebesar 3,27% per tahun. Sebesar 46,5% dari total konsumsi karet dunia merupakan karet alam. Untuk memenuhi kebutuhan karet alam, produksi karet alam dunia meningkat rata-rata sebesar 2,75% per tahun. Indonesia adalah produsen karet alam (*Hevia Bresiliensis*) terbesar kedua di dunia. Indonesia memiliki kontribusi sebesar 14% dari total produksi dunia. Produksi karet alam Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,6% per tahun. Sebesar 8,5% dari total produksi karet alam Indonesia berasal dari Provinsi Jambi.

Komoditas karet alam merupakan salah satu sumber ekonomi rakyat yang sangat penting

bagi Provinsi Jambi. Luas perkebunan karet alam di Provinsi Jambi pada tahun 2016 yaitu seluas 1.683.557 hektar. Sekitar 40% dari total luas perkebunan karet alam di provinsi ini merupakan perkebunan karet rakyat (665.306 ha). Sekitar 212.363 petani menggantungkan hidupnya pada perkebunan karet. Produk karet remah rakyat dijual petani kepada para pelaku pasar untuk memenuhi kebutuhan pabrik karet remah yang terdapat di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Karet alam merupakan salah satu sumber mata pencaharian petani di Jambi, namun demikian terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani sehingga mempengaruhi keuntungan ekonomi yang didapat petani dari bertani karet. Permasalahan umum yang ditemui oleh petani karet tersebut diantaranya adalah produktivitas karet rakyat yang rendah, harga yang diterima petani masih rendah, kualitas hasil panen karet yang buruk, penanganan pasca panen yang terbatas, informasi harga yang kurang transparan, posisi tawar petani terhadap rantai nilai tradisional yang rendah, rantai pasokan karet yang panjang, kekuatan ekonomi pengumpul tradisional yang terlalu dominan serta diperparah oleh pengaruh harga karet dunia yang rendah.



Gambar 6-2. Volatilitas harga karet

Volatilitas harga karet alam memiliki dampak jangka panjang terhadap pendapatan produsen dan mempengaruhi perencanaan produksi menjadi lebih sulit, termasuk terhadap petani. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa usaha untuk membantu petani karet dalam memecahkan beberapa permasalahan tersebut terutama bagi perbaikan kualitas hasil produksi karet rakyat dengan membentuk beberapa pasar lelang rakyat. Akan tetapi, kurangnya monitoring dari pemerintah, dikuasainya pembelian oleh sindikasi pengepul, pengepul yang mampu mengendalikan harga, standar kualitas yang telah ditetapkan kurang diterapkan, kualitas tidak serta merta meningkatkan harga secara signifikan dan tata niaga yang lemah menyebabkan beberapa usaha pemerintah masih belum mampu menjadi jawaban permasalahan yang dihadapi petani karet di Provinsi Jambi.

- **Tujuan Utama**

Meningkatnya kesejahteraan petani karet melalui intervensi pasar yang berkelanjutan.

- **Obyektif**

- Meningkatkan produktivitas usaha perkebunan karet alam melalui bibit unggul yang tersertifikasi dan cara pertanian yang baik.
- Memperbaiki rantai nilai produk karet alam rakyat yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dan bekeadilan seiring dengan perbaikan kualitas produksi yang dilakukan petani.
- Meningkatkan kesejahteraan petani yang saling menguntungkan bagi setiap pelaku usaha dan memiliki keberkelanjutan melalui keterlibatan penuh *offtaker*.

- **Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disarankan**

Intervensi pada petani karet rakyat di Provinsi Jambi memiliki sasaran sebagai berikut:

- Peningkatan produktivitas karet dengan melakukan revitalisasi dan peremajaan perkebunan karet rakyat dengan bibit unggul berproduktivitas tinggi yang tersertifikasi, penyuluhan yang intensif mengenai cara pertanian yang baik serta pemupukan sehingga terjadi perubahan perilaku petani dalam budidaya karet
- Perbaikan rantai nilai pemasaran karet rakyat dan perbaikan kualitas produksi karet alam rakyat yang mampu meningkatkan harga yang lebih adil di tingkat petani dan pengembangan pola kerjasama antara petani dengan industri hilir
- Pengembangan hubungan saling menguntungkan antara petani karet dan pelaku usaha industri karet remah dan melakukan *scale up* melalui adopsi intervensi kepada wilayah produksi perkebunan karet rakyat lainnya.



Kelompok sasaran intervensi ini adalah petani karet rakyat yang terletak di Kabupaten Bungo dengan total luas lahan perkebunan karet seluas 101,851 hektar, satu pabrik pengolahan karet mitra intervensi yang terletak di kabupaten tersebut, beserta dinas pemerintahan terkait. Intervensi ini memiliki potensi untuk ditingkatkan skala ekonominya di kabupaten lainnya yaitu Muara Jambi dengan perkebunan karet rakyat seluas 58,427 hektar dan satu pabrik pengolahan karet mitra intervensi. Dukungan dari pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten sangat nyata bagi komoditas karet sebagai komoditas unggulan daerah.

Mitra Intervensi

Intervensi ini didesain dengan pelibatan sektor usaha dan kemitraan dengan perusahaan dibawah skema *Public Private Partnership* dimana perusahaan dan petani memiliki kepentingan yang sama dan hubungan saling menguntungkan. Aspek keberlanjutan dapat dicapai dengan intervensi melalui kemitraan dengan perusahaan yang memiliki model bisnis yang saling menguntungkan

antara petani dan *off taker*. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan perusahaan karet remah yang memiliki komitmen akan *shared value* kepada *stakeholder* perusahaan terkait, utamanya adalah petani karet.

Salah satu perusahaan karet remah yang merupakan mitra potensial bagi intervensi pertumbuhan ekonomi hijau adalah Kirana Megatara Group. Kirana Megatara Group resmi didirikan pada tanggal 27 Oktober 1964. Pada tahun 1991 didirikan PT Kirana Megatara Tbk yang kini menjadi induk perusahaan bagi 14 pabrik pengolahan karet remah dan satu *sub-holding* di bidang perkebunan, yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Secara keseluruhan, PT Kirana Megatara Group memiliki kapasitas produksi sebesar 720.000 ton karet remah per tahun.

Kirana Megatara Group merupakan perusahaan produsen karet remah yang memproduksi produk SIR 10, SIR 20 dan SIR 20 VK. Produk dari Kirana Megatara Group tersebut diekspor ke pabrik-pabrik ban terkemuka dunia seperti *Apollo, Bridgestone, Continental, Cooper Tires, Fate, Good Year, Gajah Tunggal, Hankook, Kumho Tyres, Michelin, Nexen, Pirelli, Sumitomo, Toyo Tires, Yokohama Rubber* serta memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

PT Kirana Megatara memiliki beberapa strategi dalam menjalankan perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Fokus kepada Pelanggan

Mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan pelanggan utama perusahaan, yakni perusahaan ban global dunia yang masuk dalam top 20 perusahaan ban dunia.



2. Memastikan Ketersediaan Pasokan Bahan Baku

- a. Melaksanakan berbagai program kemitraan dan pembinaan untuk mengubah komposisi pemasok dengan sasaran meningkatkan porsi petani-petani kecil.
- b. Melakukan berbagai perbaikan proses pembelian untuk meningkatkan kecepatan transaksi pembelian dan kenyamanan bagi pemasok.
- c. Ekstensifikasi pembelian dengan meningkatkan jangkauan area pembelian.
- d. Program penanaman kembali untuk mendukung proses regenerasi perkebunan petani kecil.
- e. Melakukan ekspansi strategi *upstream* dengan usaha perkebunan karet.

3. Pengembangan Kapasitas Produksi

- a. Menambah kapasitas produksi dengan meningkatkan kemampuan produksi pabrik-pabrik yang ada, membangun pabrik baru maupun melakukan akuisisi pabrik.
- b. Melakukan berbagai perbaikan pada proses yang berfokus pada QCDsME

Strategi Inisiatif Pembelian Bahan Baku

Beberapa strategi dan program turunannya yang dilakukan di bagian pembelian bahan baku ditujukan untuk meningkatkan jaminan pasokan volume dan kualitas bahan baku untuk dapat menjamin ketersediaan bahan baku yang mencukupi untuk ekspansi volume penjualan Perusahaan. Penjaminan

keberlangsungan ketersediaan bahan baku sangat penting bagi operasional perusahaan.

Mengingat produksi karet alam Indonesia didominasi 85% oleh petani kecil yang dari segi jumlah sangat banyak dan tersebar di pelosok Indonesia serta mata rantai perdagangan karet yang panjang melalui pedagang perantara, sebagai bagian dari strategi perusahaan, Kirana Megatara mensyaratkan kunci keberhasilan Perusahaan ditentukan oleh kemampuan Perusahaan bermitra dengan pemasoknya, baik yang merupakan pedagang perantara maupun petani kecil.

Berbagai inisiatif yang tercakup dalam roadmap khusus yang dibuat di tahun 2011 untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang dibidani oleh Divisi *Sourcing Development*.

Latar Belakang dilakukannya Strategi Inisiatif Pembelian Bahan Baku

Dalam strategi yang telah dicanangkan oleh perusahaan, Kirana Megatara Group memetakan dan menjalankan beberapa strategi utama dikarenakan perusahaan mengidentifikasi ada dua risiko utama dalam kegiatan usaha Perusahaan yang disebabkan oleh karakteristik industri karet, yaitu:

1. Risiko harga pasar yang berada di luar kontrol perusahaan karena karet adalah komoditas internasional sehingga harga berfluktuatif setiap hari mengikuti perdagangan di bursa global.
2. Risiko pasokan bahan baku terkait dengan struktur industri di Indonesia yang cukup unik dengan dominasi kepemilikan kebun karet oleh petani kecil dengan berbagai keterbatasannya.

Perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan prinsip pencocokan antara volume penjualan dengan volume pembelian

bahan baku dengan waktu yang tepat. Hal ini dilakukan guna menciptakan perlindungan alami untuk mengendalikan risiko fluktuasi harga dan memastikan perusahaan dapat mencapai target laba yang diinginkan. Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan melakukan berbagai strategi usaha untuk meningkatkan jaminan ketersediaan pasokan bahan baku dengan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi yang ditujukan kepada pemasok dan strategi *upstream* perkebunan.

Implementasi Strategi Pembelian Bahan Baku

Berbagai program turunan dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pembelian yang dilakukan adalah:

1. Intensifikasi Pembelian Bahan Baku

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan volume pembelian dari pemasok yang telah ada dengan cara:

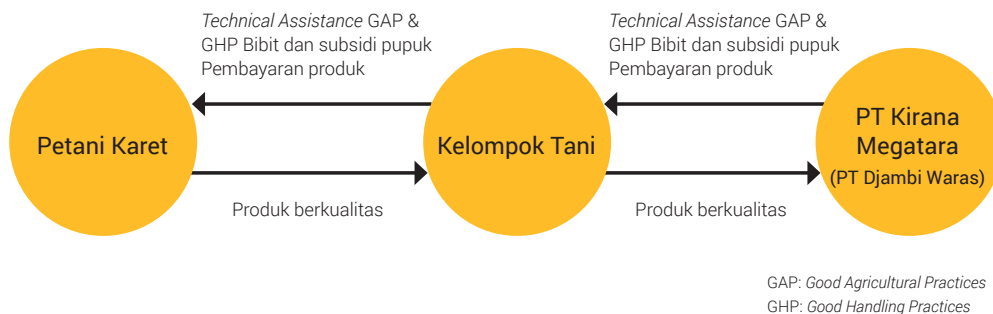
- a. Meningkatkan pelayanan kepada pemasok dengan cara mempercepat proses transaksi pembelian dengan cara:
 - Pemasangan timbangan digital *online* yang terintegrasi dengan aplikasi informasi perusahaan untuk memotong proses kerja, meningkatkan akurasi penimbangan, dan memberi informasi volume timbangan yang transparan dan wajar kepada pemasok.
 - Pemasangan fasilitas *multi unloading terminal* dan sortasi sehingga dapat melayani beberapa pemasok dalam waktu yang sama dalam proses sortasi dan penimbangan untuk mengurangi waktu antrian.

- b. Memperkuat hubungan para pedagang dengan *Supplier Relationship Management* sehingga terbangun hubungan yang erat untuk pengembangan volume bisnis yang lebih besar dengan pemasok yang ada saat ini.
- c. Menggalang kerjasama yang lebih intensif dengan kelompok tani yang sudah ada dengan memberikan penyuluhan peningkatan produktivitas dan kualitas karet boka. Perusahaan memiliki *Sourcing Development Officer* (SDO) di setiap pabrik yang bertugas untuk melakukan kunjungan rutin baik ke mitra kelompok petani yang sudah ada untuk meningkatkan pasokan dengan kualitas yang baik maupun untuk mengidentifikasi potensi petani baru untuk memulai program kemitraan baru dengan Perusahaan.

2. Ekstensifikasi Pembelian Bahan Baku

Strategi ini diarahkan untuk menambah pemasok baru guna mengamankan potensi suplai bahan baku berkualitas. Usaha ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Membangun depo di hampir setiap wilayah potensial bahan baku. Strategi ini merupakan perpanjangan tangan untuk pembelian dari pabrik yang secara lokasi jauh dari beberapa sentra produsen karet dan memotong biaya transportasi yang selama ini harus ditanggung oleh petani jika mengirim sendiri ke lokasi pabrik perusahaan.



Gambar 6-3. Diagram model bisnis kemitraan dengan petani

- b. Mengidentifikasi area potensi bokar dan membuka beberapa depo baru dengan tujuan yang sama seperti di atas.
 - c. Mendekati kelompok tani yang belum terjangkau lewat institusi koperasi maupun lembaga swadaya masyarakat.
3. Optimalisasi *Sourcing Development*

Guna mencapai beberapa tujuan, perusahaan telah mengidentifikasi beberapa akar masalah diantara yang terpenting selain kualitas hasil produksi karet rakyat adalah produktivitas pohon yang rendah bersumber dari kualitas bibit yang buruk (bibit cabutan). Hal ini mengakibatkan hasil sadap yang diperoleh petani karet swadaya tidak optimal. Pada tahun 2011, perusahaan telah membentuk divisi *sourcing development* untuk memulai program penyediaan bibit kualitas tinggi mulai dari bibit muda sampai dengan umur yang siap tanam di kebun.

• Model bisnis

Pada saat kajian dilakukan, baru sekitar 8% dari suplai pabrik diperoleh dari model bisnis *Source Development* Kirana Megatara. Mengingat kapasitas satu pabrik PT Djambi Waras sebesar 68.000 ton per tahun, maka masih diperlukan peningkatan suplai yang bisa diperoleh dari kisaran 80.000 hektar kebun karet rakyat. Selain hal tersebut, dikarenakan dominasi pengepul tradisional yang masih cukup kuat, suplai pabrik PT Djambi Waras hanya sekitar 30%-45% dari dalam Provinsi Jambi. Kekurangan pasokan masih harus didapat dari luar provinsi melalui pengepul dengan harga yang relatif lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah. Dengan latar belakang ini, usaha *Source Development* memiliki potensi yang tinggi untuk ditingkatkan oleh perusahaan dengan memperoleh jaminan suplai karet yang berkualitas langsung dari petani karet.

Kisaran harga karet remah yang diterapkan berdasarkan harga FOB saat kajian dilakukan yaitu sebesar Rp 16.500 per kg, dengan *Dry Rubber Content* yang disyaratkan yaitu

sebesar 70%, harga di tingkat petani sebesar Rp 11.500 per kg. Sebagai perbandingan, harga karet yang menjual produk karetinya melalui rantai pasokan tradisional kepada pengepul berada di kisaran harga Rp 6000 per kg. Terdapat pula praktik-praktik yang merugikan petani seperti pemotongan berat dari pengepul tradisional dengan berbagai alasan, masih adanya kadar kotoran/air 5%-10% dari berat (potong basi) tanpa adanya perbaikan kualitas yang signifikan. Harga yang diterima petani swadaya mitra binaan dengan perbaikan rantai nilai dan perbaikan kualitas telah mampu mencapai harga DRC (*Dry Rubber Content*) sebesar 55%-68% dari harga FOB dengan adanya perbaikan kualitas dan perbaikan terhadap rantai nilai.

Dalam mewujudkan model bisnisnya guna memotong alur pasokan tradisional, PT Kirana Megatara (PT Djambi Waras) membangun beberapa depo-depo (*storage*) dengan kapasitas 200-300 ton karet kering sebagai akses penjualan kepada petani. Kirana Megatara Group menempatkan *Source Development Staff* di setiap depo yang bertugas

untuk melakukan pembinaan (*technical assistance*) kepada kelompok tani mitra perusahaan, yaitu berupa *technical assistance* mengenai *Good Handling Practices* dan *Good Agricultural Practices*. Kecukupan suplai karet berkualitas yang diterima perusahaan dapat dipenuhi dengan peningkatan produktivitas petani, penanganan pasca panen serta alur rantai suplai yang lebih pendek.

Melalui pendekatan *Public Private Partnership* yang dilakukan perusahaan dengan petani karet, model bisnis perusahaan memiliki potensi untuk ditingkatkan skala ekonominya dengan syarat petani karet dan perusahaan memperoleh hubungan yang saling menguntungkan dan mencapai tahap berkelanjutan.

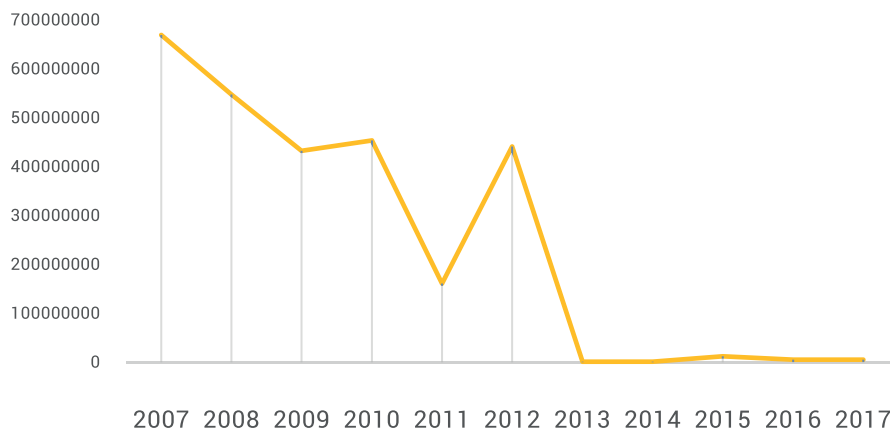
Tabel 6-4 menggambarkan kondisi anggaran pertanian karet petani tradisional sebelum intervensi dan setelah intervensi. Terdapat peningkatan 75% dengan adanya Model Bisnis Perbaikan Rantai Nilai dan peningkatan 100% apabila disertai dengan perbaikan cara bertani.

Tabel 6-4. Perhitungan penghasilan dari berbagai model pengelolaan

	Praktik saat ini	Dengan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i>	Dengan perbaikan rantai nilai dalam model bisnis	Dengan <i>Good Agricultural Practices</i> dan perbaikan rantai nilai dalam model bisnis
Total Pendapatan (Rp)	9,424,382	11,009,692	11,910,884	13,918,943
Produktivitas (karet)- kg/ha	1,243	1,455	1,243	1,455
Harga per kilogram (Rp)	7,500.00	7,500.00	9,500.00	9,500.00
Total Biaya (Rp)	6,102,179	7,255,971	6,102,179.14	7,255,970.88
Input (Rp)	380,150	756,981	380,150	756,981
Tenaga kerja (Rp)	5,722,029	6,498,990	5,722,029	6,498,990
Keuntungan (Rp)	3,322,203	3,753,721	5,808,704	6,662,972
NPV Rp/ha (30 tahun)	27,970,706.30	30,975,840.26	53,030,427.38	60,077,609.71
Kenaikan Pendapatan		13.0%	74.8%	100.6%

Tabel 6-5. Aktivitas intervensi yang dilakukan berdasarkan obyektif dan indikator

Aktivitas	Indikator
Obyektif 1: Meningkatkan produktivitas usaha perkebunan karet alam melalui bibit unggul yang tersertifikasi dan cara pertanian yang baik.	
Kajian penentuan wilayah perkebunan karet rakyat yang memiliki potensi sebagai sumber pasokan perusahaan mitra intervensi	Pemetaan wilayah produsen potensial karet rakyat mitra perusahaan
Pemilihan dan penguatan kelembagaan terhadap kelompok tani mitra perusahaan	Kelembagaan kelompok tani mitra yang kuat dan memenuhi standar
Penyuluhan tentang <i>Good Agricultural Practice</i> budidaya karet kepada staf <i>source development</i> perusahaan dan kelompok tani mitra	Model karet rakyat yang sesuai dengan GAP perkebunan karet
Menjamin pasokan dan distribusi merata bibit karet unggul kepada desa binaan	Penilaian kualitatif ketersediaan bibit unggul dan saprodi
Memfasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat dan peningkatan kualitas pembibitan lokal di tingkat desa binaan	Luas penanaman kebun karet rakyat petani mitra yang diremajakan dengan bibit tersertifikasi
Menjamin pasokan pupuk terjangkau dan informasi pemupukan yang berimbang	Jumlah petani karet yang telah melakukan pemupukan berimbang
Mengaplikasikan <i>Good Agricultural Practices</i> dalam perkebunan karet rakyat mitra perusahaan	Jumlah petani karet dan luas kebun rakyat yang telah menerapkan cara pertanian yang baik perkebunan karet rakyat
Obyektif 2: Memperbaiki rantai nilai produk karet alam rakyat yang memiliki posisi tawar yang lebih baik dan bekeadilan seiring dengan perbaikan kualitas produksi yang dilakukan petani	
Membentuk sistem informasi yang baik antara kelompok tani binaan mitra perusahaan dan perusahaan mitra	Penilaian kualitatif hubungan antara staf <i>source development</i> perusahaan dengan kelompok tani binaan mitra
Menjamin ketersediaan bahan pengolah bakar (bahan olah karet)	Jumlah petani karet mitra yang telah menerapkan cara penanganan pasca panen yang baik
Penyuluhan tentang cara penanganan pasca panen yang baik (<i>Good Handling Practice</i>) hasil olahan karet rakyat kepada staf <i>source development</i> perusahaan dan kelompok tani mitra	Kenaikan kualitas hasil produk karet rakyat dan perbaikan harga yang diterima oleh petani binaan
Menerapkan cara penanganan pasca panen yang baik (<i>Good Handling Practices</i>) oleh petani karet binaan	Jumlah petani karet yang telah melakukan penanganan pasca panen yang baik
Memenuhi kebutuhan pasokan perusahaan yang didapat dari produksi karet rakyat petani binaan mitra perusahaan	Volume penjualan karet rakyat mitra perusahaan terhadap perusahaan
Obyektif 3. Meningkatkan kesejahteraan petani yang saling menguntungkan bagi setiap pelaku usaha dan memiliki keberkelanjutan melalui keterlibatan penuh <i>offtaker</i>	
Melakukan studi kelayakan bagi perusahaan mitra intervensi terhadap model bisnis yang dilakukan	Rasio profitabilitas perusahaan yang diterima oleh perusahaan mitra intervensi dan petani mitra binaan
Melakukan bimbingan dan fasilitasi kepada perusahaan mitra intervensi mengenai kebutuhan bagi keberlangsungan intervensi	Jenis dan nilai investasi yang dilakukan perusahaan mitra untuk intervensi
Melakukan fasilitasi kemitraan antara petani karet dan masyarakat	Jumlah petani karet mitra binaan yang menjadi mitra tetap per usaha
Melakukan <i>scale up</i> model bisnis terhadap perusahaan karet sejenis	Jumlah perusahaan yang mengadopsi model bisnis berbasis kemitraan dengan petani



Gambar 6-4. Produksi hasil hutan kayu di Provinsi Jambi

• **Potensi Implementasi**

1. Komitmen informal dari perusahaan potensial untuk menjadi mitra dalam kegiatan ini.
2. Komitmen informal dan dukungan dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Provinsi Jambi.
3. Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi.

2. Program Tematik 2: Pengembangan Industri Kayu

• **Tautan Strategi**

Program tematik ini terkait dengan ketiga strategi pertumbuhan ekonomi hijau.

• **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tutupan hutan tropis terbesar di dunia. Sayangnya industri hasil hutan kayu masih belum berhasil memenuhi kebutuhan suplai kayu yang berkelanjutan (Nawir, et al., 2003). Produksi hasil hutan kayu dari hutan tanaman masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan luas lahan yang dialokasikan sebagai HTI. Selain persoalan produksi, tekanan

untuk mendistribusikan keuntungan hasil hutan kayu ke komunitas masyarakat juga semakin mendesak. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan kesejahteraan yang terlalu lebar, sehingga dibutuhkan pengoptimalan keuntungan sosial bagi masyarakat yang lebih dari sekedar produksi kayu. Urgensi perbaikan pengembangan industri hasil hutan kayu juga tampak di Provinsi Jambi.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi mencapai 1.167.638 ha yang terdiri dari areal hutan produksi seluas 83%, hutan lindung 16%, dan sisanya merupakan hutan konservasi (BPS, 2017). Meskipun area hutan produksi mendominasi, dapat dilihat pada Gambar 6-4 produksi hasil hutan kayu di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013. Hingga tahun 2017, kondisi produksi cenderung menunjukkan stagnasi.

Solusi yang coba ditawarkan dalam meningkatkan produksi kayu berkelanjutan sekaligus membagi manfaat ke masyarakat yang lebih luas adalah melalui skema kemitraan. Skema kemitraan merupakan upaya kerjasama antar dua atau lebih pihak dalam mengkombinasikan sumber daya

lahan, modal, manajemen, dan peluang pasar dalam rangka mencapai keuntungan bersama.

- **Tujuan Utama**

Meningkatnya produksi hasil hutan kayu berkelanjutan yang menyejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi.

- **Obyektif**

1. Meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu
2. Mengoptimalkan skema kemitraan swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan
3. Meningkatkan posisi tawar masyarakat melalui penentuan harga yang adil

- **Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disarankan**

Usulan intervensi untuk menyejahterakan masyarakat melalui hasil hutan kayu adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan skema kemitraan antara masyarakat dan perusahaan yang saling menguntungkan
2. Peningkatan produktivitas hasil hutan kayu melalui penanaman areal kemitraan dengan tanaman pokok unggul
3. Perbaikan kualitas produksi dan standarisasi sehingga mampu meningkatkan harga pada mitra masyarakat

Pengembangan kemitraan hutan tanaman akan dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan swasta. Salah satu perusahaan yang disarankan dalam studi ini adalah PT Wirakarya Sakti.

Profil Perusahaan Mitra

Wirakarya Sakti merupakan perusahaan nasional yang memiliki konsesi untuk hutan tanaman industri di bawah keputusan menteri dan mengelola wilayah konsesi seluas $\pm$ 290.378 hektar di Provinsi Jambi. Wilayah konsesi ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari, Muaro Jambi, dan Tebo. Area kerja perusahaan dibagi menjadi 8 distrik dengan lokasi lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6-6. Perusahaan telah memulai penanaman pada tahun 1989. Kayu yang dihasilkan akan didistribusikan ke Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry (LPPPI) yang berlokasi di Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wirakarya Sakti dan LPPPI merupakan anak perusahaan Asia Pulp and Paper, salah satu perusahaan *pulp and paper* terbesar di dunia. Kapasitas perusahaan sekitar 430.000 ton per tahun. Studi pada tahun 2003 menyatakan bahwa dari total luas konsesi, baru 31% area yang ditanami (Nawir, et al., 2003). Area konsesi ini tidak terlepas dari persoalan hak atas lahan dengan masyarakat. Hal ini pula yang menjadikan sebagian dari lahan tidak dapat ditanami. Nawir, et al. (2003) menyatakan bahwa 33% dari total area konsesi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai area kemitraan. Dengan adanya area kemitraan diharapkan ketegangan lahan antara perusahaan dan masyarakat dapat berkurang sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Berdasarkan SK Menteri LHK No. SK 57/Menlhk/Setjen/PHL.0/1/2018 mengenai pengaturan tata ruang areal kerja PT Wirakarya Sakti, area yang paling luas adalah zona tanaman pokok meskipun hanya sekitar 47,79% dari total kawasan. Posisi kedua ditempati oleh zona Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (KFLEG) Lindung dengan

Tabel 6-6. Area kerja Wirakarya Sakti

No	Distrik	Administrasi	Kelompok Hutan	Pemangkuan Hutan
1	Distrik I	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi	S. Betara - S. Pengabuan	KPH Kab. Tanjung Jabung Barat, KPH Kab. Muaro Jambi
2	Distrik II	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi	S. Lagan – S. Mendahara	KPH Kab. Tanjung Jabung Barat, KPH Kab. Tanjung Jabung Timur, KPH Kab. Muaro Jambi
3	Distrik III	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi	S. Air Hitam – S. Danau Bangko	KPH Kab. Batanghari, KPH Kab. Muaro Jambi, KPH Kab. Tanjung Jabung Barat
4	Distrik IV	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari	S. Danau Bangko – S. Singoan – S. Benanak	KPH Kab. Batanghari, KPH Kab. Tanjung Jabung Barat
5	Distrik V	Kab. Tanjung Jabung Barat	S. Pengabuan – S. Lumahan – S. Limburan	KPH Kab. Tanjung Jabung Barat
6	Distrik VI	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi	S. Pengabuan – S. Bram Hitam – S. Simp. Kadam	KPH Kab. Tanjung Jabung Barat
7	Distrik VII	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi	S. Batanghari – S. Lagan – S. Mendahara	KPH Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur
8	Distrik VIII	Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Muaro Jambi	S. Batanghari – S. Rengas dan S. Emparing – S. Mengupeh	KPH Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat

luas 25,10% dari total kawasan dan sisanya adalah zona tanaman kehidupan, Kawasan Lindung (KL) setempat dan KL non-gambut lainnya, dan KFLEG Fungsi Budidaya (Gambar 6-5).

Jenis tanaman pokok yang dikembangkan antara lain *Acacia crasscarpa* untuk daerah basah (rawa) dan *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* untuk daerah kering. Sistem yang digunakan adalah silvikultur tebang habis dengan permudaan buatan.

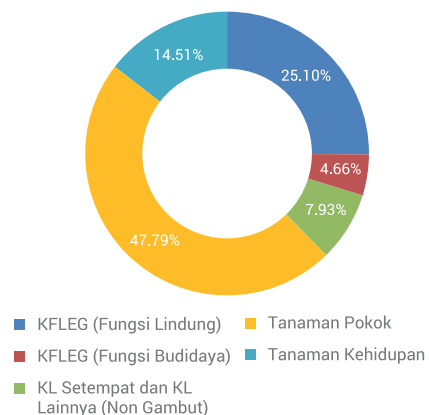
Komitmen perusahaan

Setidaknya terdapat 4 komitmen yang dicantumkan dalam bahan publikasi PT Wirakarya Sakti yang akan dirinci berdasarkan relevansi dengan kegiatan kemitraan pada rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu:

1. Komitmen lingkungan

- Meningkatkan mutu lingkungan hidup berdasarkan ISO 14001:2004

- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*) sesuai prinsip kehati-hatian



Sumber: diolah dari RKU 2018-2027 PT Wirakarya Sakti

Gambar 6-5. Tata ruang area kerja PT Wirakarya Sakti

- Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat
 - Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi, dan kimia
2. Komitmen kelestarian hasil
- Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial
 - Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan
 - Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume)
 - Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu
3. Komitmen Sosial dan Sumberdaya Manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan
 - Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama parapihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*)
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal
4. Komitmen Penerapan *FSC-Controlled Wood* PT Wirakarya Sakti
- Membuktikan bahwa kayu yang disuplai telah terkontrol
 - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Berupaya maksimal untuk menjaga lingkungan serta mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Hutan Tanaman
 - Menjaga areal hutan yang termasuk dalam kriteria HCV (*High Conservation Value*) dan HCS (*High Carbon Stock*)
 - Berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Hutan Tanaman sesuai dengan cakupan kegiatan operasional unit manajemen
 - Melakukan pengelolaan Hutan Tanaman dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan terkait
- **Model bisnis**
- PT Wirakarya Sakti (WKS) memiliki dua skema kemitraan yaitu WKS-Hutan Tanaman Pola Kemitraan (WKS-HTPK) yang dikembangkan di dalam wilayah konsesi dan WKS-Hutan Rakyat Pola Kemitraan (WKS-HRPK). Pola kemitraan hutan tanaman dengan masyarakat yang dilakukan oleh Wirakarya Sakti memiliki tujuan sebagai berikut (Witono, 2005):
1. Mengurangi risiko investasi
 2. Menambah ketersediaan bahan baku serpih bagi perusahaan

3. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat
4. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi operasi perusahaan
5. Berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kehutanan dan pembangunan masyarakat

Pengelolaan hutan dengan pola kemitraan menempatkan masyarakat untuk ikut memiliki hak atas hasil hutan dalam area yang dimitrakan (WKS-HTPK). Lahan-lahan yang tidak produktif di luar konsesi milik masyarakat juga didorong oleh perusahaan untuk ditanami dan dikembangkan melalui pola WKS-HRPK. Pola kemitraan ini mulai digalakkan pada awal tahun 2000-an dengan latar belakang awal untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan atas lahan. PT WKS memiliki desa binaan sejumlah 134 desa di sekitar area kerja. Perusahaan

mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Mulai tahun 2006, WKS memulai program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan alternatif sumber mata pencaharian di dalam kawasan konsesi ke dalam tiga proyek yang berbeda: petani madu, peternak ikan, dan pengrajin bambu. Atas upayanya ini, WKS menerima penghargaan Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2012 – Southeast Asia untuk kategori Pemberdayaan Sosial. Melihat prestasi WKS tersebut, WKS dapat menjadi mitra yang cocok untuk mengembangkan program tematik pertumbuhan ekonomi hijau dalam meningkatkan hasil hutan kayu yang menyejahterakan masyarakat.

Pola pengembangan HTPK dan HRPK yang dilakukan oleh perusahaan mencakup tiga aspek yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha yang dapat dilihat pada Tabel 6-7 (Witono, 2005).

Tabel 6-7. Pola pengelolaan kemitraan oleh PT WKS

	HTPK	HRPK
Kelola kawasan	• Survei lokasi dan orientasi lahan yang diklaim • Penyelesaian klaim	• Pendataan areal tidak produktif di luar kawasan hutan • Penentuan batas secara kolektif • Sosialisasi program dengan melibatkan masyarakat
Kelola kelembagaan	• Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) • Pembentukan koperasi	• Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) • Pembentukan koperasi
Kelola usaha	• Kerja sama kemitraan antara perusahaan dengan kelompok tani atau koperasi yang diketahui oleh Dinas Kehutanan atau pejabat terkait • Pendampingan kelompok tani dalam kegiatan pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan • Pembibitan oleh kelompok tani dapat mencapai 500.000-1.500.000 batang per bulan	• Melibatkan kelompok tani dari mulai persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. • Pembinaan dan pendampingan kelompok tani dan koperasi



• **Potensi Implementasi**

Pengembangan pola kemitraan ke depan diharapkan dapat bergerak lebih jauh dari penyelesaian konflik hingga pengembangan model usaha yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Beberapa poin kegiatan yang tercantum pada Dokumen Resertifikasi PT WKS cukup relevan membangun *milestones* menuju implementasi usaha kerja sama, antara lain:

- Membangun kemitraan dengan parapihak dalam pemanfaatan lahan tanaman kehidupan
- Melakukan pemetaan sosial pada wilayah desa sekitar
- Melakukan pelatihan berbasis teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan pengembangan ekonomi produktif
- Membangun jalur tata niaga hasil produksi sumber ekonomi bersama masyarakat
- Pemantauan dan evaluasi program pengembangan ragam ekonomi

3. Program Tematik 3: Penguatan Komoditas Kelapa Dalam

• **Tautan Strategi**

Program tematik ini terkait dengan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta pemanfaatan jasa lingkungan dan strategi perbaikan konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan yang diperkuat dengan adanya hilirisasi komoditas unggulan wilayah.

• **Latar Belakang**

Kelapa dalam merupakan suatu komoditas yang memiliki sejarah panjang di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Luas lahan kelapa dalam diperkirakan mencapai 118.540 ha dan tersebar di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dengan luas masing-masing seluas 58.589 ha dan 50.414 ha. Umumnya kelapa dalam ditanam bersama komoditas lainnya seperti pinang. Total produksi pada tahun 2016 sebesar 104.528 ton. Sejak tahun 2010-2016, produksi kelapa

dalam Provinsi Jambi menurun sebesar 1,48% per tahun.

Kelapa sebagai bahan baku kopra adalah kelapa yang termasuk dalam Grade C (Rp.800/kg). Petani menjual dalam dua bentuk yaitu kelapa yang telah melalui proses pembakaran atau sekedar potongan (cungkilan). Harga yang diterima pabrik per kg didasarkan pada kadar airnya. Setelah melalui proses pembakaran selama 2 jam rata-rata harga dapat diterima 60% dari harga jualnya, dan dengan 6 jam pembakaran menghasilkan 80% dari harga jual. Harga pada saat ini adalah Rp. 645 per kg untuk harga kopra, sedangkan cungkilan Rp. 270 per kg. Rata-rata harga per karung Rp. 650 per kg dan tertinggi mencapai Rp.700 per kg. Standar harga yang dipakai adalah standar harga di Rotterdam.

Setelah dilakukan pengeringan kembali oleh pengepul, bahan kopra yang diterima pabrik *Crude Coconut Oil* sebagian besar dalam bentuk kering (53-56%) dan sisanya dalam bentuk cungkilan. Rata-rata petani mengirimkan 10-20 karung per 3 bulan sekali (satu karung cungkilan=90kg, kering=50 kg). Kapasitas pabrik sebesar 30 ton bahan minyak per hari dan rata-rata membutuhkan 90 ton per hari kelapa mentah. Hasil yang didapat berupa 58% bahan minyak kelapa dan 30% bungkil kelapa. Rata-rata dari 100 kg kelapa didapat 36 kg bahan minyak, 45 kg bungkil dan 20% penyusutan. Keuntungan yang didapat sebesar USD 13 - USD14 per ton bahan minyak kelapa. Bungkil dijual dengan harga Rp. 200.000 per kg. Salah satu pengolah bahan minyak kelapa adalah PT Prima Makmur Abadi yang terletak di Tungkal. Total terdapat 3 perusahaan sejenis di Tanjabbar yang terletak di Kuala Tungkal dan 1 perusahaan di Kuala Jambi Tanjatim.

Untuk mendapatkan bahan minyak kelapa dilakukan proses penghancuran, penggilingan, pemanasan dengan air, pengepresan

pertama, pengepresan kedua dan ketiga untuk mendapatkan *Crude Coconut Oil*. Hasil *Crude Coconut Oil* terbanyak diekspor ke perusahaan RBD yang terletak di Malaysia dan sisanya ke Surabaya untuk diekspor pula ke perusahaan RBD di Malaysia. Dalam setahun, pabrik dapat beroperasi 24 hari perbulan selama 2 bulan. Pabrik tidak beroperasi selama 10 hari per bulan akibat keterbatasan suplai bahan baku.

- **Tujuan Utama**

1. Meningkatnya kapasitas petani dalam pengelolaan kebun kelapa dalam dengan pengelolaan yang baik (GAP)
2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas kelapa dalam yang dikelola oleh petani
3. Terbentuknya industri hilir kelapa menjadi beberapa produk turunan untuk menyediakan kebutuhan pasar dan penyerapan produk kelapa dalam dari petani

- **Obyektif**

Model investasi hijau dari komoditas kelapa dalam dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap modal penghidupan sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus membentuk rantai nilai yang adil melalui hilirasi produk. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya serap faktor input dan tenaga kerja serta pendapatan masyarakat.

- **Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang disarankan**

Intervensi yang disarankan dalam program ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Peningkatan produktivitas kebun kelapa dalam untuk petani

Banyaknya kebun kelapa dalam yang sudah memasuki umur tua dan tidak terkelola dengan baik mengakibatkan penurunan produktivitas lahan.



Intervensi perlu dilakukan untuk meremajakan kebun kelapa dalam dengan mengkombinasikan dengan tanaman lain seperti pinang dengan sistem agroforestri. Upaya ini juga perlu dilakukan dengan memberikan pendampingan dan bantuan teknologi dan berbagai bentuk bantuan input bagi kegiatan usaha pertanian tersebut.

- Pembentukan kelembagaan petani dan kelompok tani

Kelembagaan petani merupakan sebuah media dimana berbagai kegiatan dapat dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan keberdayaan petani dari berbagai hal seperti penyediaan input pertanian, pengelolaan kebun, penjualan dan mempertahankan harga jual. Dengan adanya kelembagaan seperti koperasi, kelompok tani maupun kelompok usaha yang lain upaya koordinasi dan

bantuan berbagai pihak juga dapat dilakukan secara efektif.

- Hilirasi industri turunan kelapa dalam
Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kelesuan pertanian kelapa dalam adalah tidak tersedianya pasar yang menguntungkan petani secara berkelanjutan. Produk kelapa dipasarkan tanpa ada kepastian penjualan dan harga yang baik. Hilirasi yang berada dekat dengan kegiatan pertanian kelapa dalam diharapkan akan dapat meningkatkan serapan pasar kelapa dalam dalam berbagai bentuknya. Namun demikian proses hilirisasi ini masih memerlukan dukungan untuk menciptakan lingkungan pendukung bisnis yang memudahkan investor tertarik dengan bisnis ini.



• Model bisnis

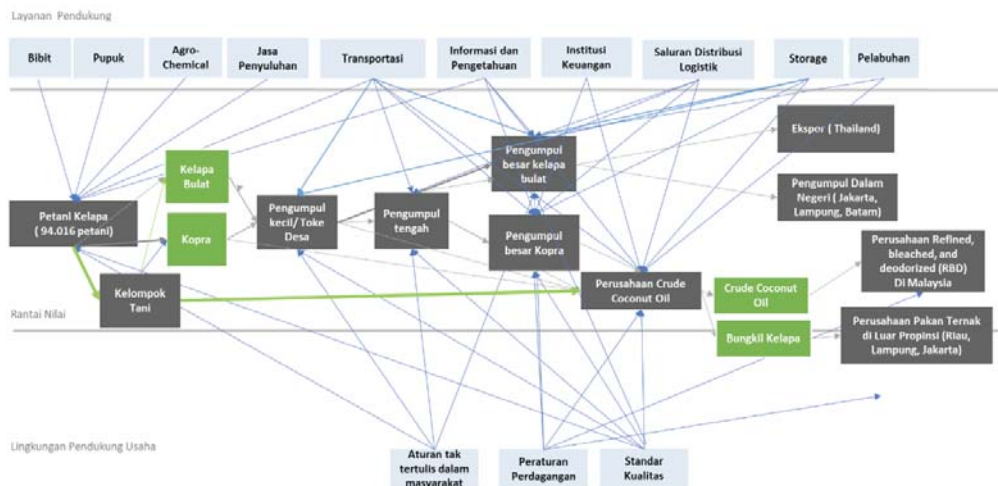
Gambar 6-6 di bawah ini menunjukkan rantai nilai kelapa dalam dari hulu hingga hilir yang terdiri dari rantai nilai utamanya, layanan pendukung, dan lingkungan usaha yang mempengaruhi. Melalui analisis rantai nilai ini dapat diketahui kondisi awal (*existing*) dan *gap* serta potensi pengadaan nilai tambah terhadap proses yang ada sehingga dapat meningkatkan keuntungan semua pelaku didalamnya khususnya petani/kelompok tani di pedesaan. Berdasarkan kondisi yang ada maka diusulkan model bisnis seperti yang diuraikan pada bagian ini.

Model bisnis yang diharapkan dari program tematik ini dilakukan dalam pembagian peran dari berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Sebagai sebuah terobosan program, maka aspek hulu hingga hilir dari kelapa dalam harus dapat ditangani melalui berbagai peran yang seimbang sehingga semua pihak akan mendapatkan manfaat.

Perhitungan Produksi Kelapa Dalam Pada Tingkat Petani/Kelompok Tani

Produksi kelapa dalam dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan kebiasaan petani. Bentuk kegiatan yang diusulkan yaitu mengkombinasikan tanaman kelapa dalam dengan pinang agar petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik. Tanaman pinang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga sangat berarti bagi peningkatan pendapatan petani. Hasil dari pinang diproses setengah jadi dan dijual dalam bentuk buah kering. Panen dan pengolahan sederhana pinang seperti pencongkelan daging buah sampai penjemuran dilakukan oleh petani.

Berdasarkan dari berbagai sumber, jarak tanam ideal adalah 8 X 8 meter dan diantara gawang ditanam pinang dengan jarak dalam baris 2 2 meter. Melalui skema ini produksi kelapa dalam rata-rata yang dapat dihasilkan mencapai 84 butir/pohon/tahun atau 10.080 butir/ha/tahun. Adapun *BC ration* dari skema bisnis ini sekitar 3,3-3,5 dengan keuntungan sekitar 65 juta rupiah per hektar.



Gambar 6-6. Rantai nilai kelapa dalam di Provinsi Jambi

Tabel 6-8. Pembagian peran dalam intervensi program

No	Pihak terkait	Peranan
1	Pemerintah Provinsi Jambi	Melakukan pembentukan dan pendampingan dalam rangka pembentukan kelompok tani kelapa dalam yang ada di wilayah investasi. Berbagai program yang dapat dijalankan diantaranya: 1. Pembuatan jalan penghubung usaha tani untuk menghubungkan lokasi di luar perkampungan. 2. Pembuatan parit untuk mencegah genangan air yang dapat merusak perakaran tanaman. 3. Bantuan alsintan yang memadai dan memperhatikan keseimbangan tenaga kerja.
2	Perusahaan Pengolahan Kelapa Dalam	Melakukan pembelian produksi petani dan kelompok tani dan melakukan pengolahan menjadi berbagai produk turunan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan produk turunan tersebut
3	Masyarakat/ petani	Melakukan pengolahan kebun kelapa dalam menggunakan praktik pertanian yang baik untuk menghasilkan produk kelapa dalam yang berkualitas secara berkesinambungan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Perkiraan kebutuhan luas lahan dan jumlah pohon kelapa yang optimal dapat dilakukan melalui estimasi kapasitas pabrik secara harian. Semakin besar kapasitas inputnya maka perlu lebih banyak pohon kelapa yang harus dikelola oleh kelompok tani.

Perhitungan Produksi Turunan Kelapa Dalam (Pengolahan/Hilirisasi)

Beberapa informasi di bawah merupakan asumsi dan hasil perhitungan yang menunjukkan estimasi kegiatan pengolahan kelapa dalam. Hal pertama yang dilihat adalah terkait faktor input dan produksi yang dihasilkan pada Tabel 6-9.

Investasi untuk kegiatan pengolahan kelapa dalam dibagi menjadi investasi awal dan modal kerja seperti dalam Tabel 6-10. Berdasarkan perhitungan finansial diperoleh hasil bahwa usaha ini dinyatakan layak dengan *pay back period* rata-rata selama 4 tahun, sedangkan perhitungan IRR dan BC ratio seperti dalam Tabel 6-11.

Potensi Implementasi

1. Dukungan dari seluruh tingkatan pemerintah dari provinsi hingga desa dalam membangun komitmen mengembangkan kelapa dalam sebagai sumber penghidupan masyarakat
2. Pembentukan kelompok tani kelapa dalam yang dapat diinisiasi oleh pemerintah dan LSM yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan kelapa dalam
3. Pengoptimalan perusahaan pengolahan kelapa dalam yang sudah ada dengan memasukan input teknologi baru yang dapat meningkatkan kapasitas pengolahan

Tabel 6-9. Perkiraan kebutuhan bahan baku dan produksi

Supply	Kuantitas
Kopra	2 ton per hari 600 ton per tahun
Sabut kelapa	6 ton per hari 1800 ton per tahun
Arang	3 ton per hari 900 ton per tahun
Produksi	Kuantitas
Minyak goreng	270 ton per tahun
Bungkil kelapa	210 ton per tahun
Coco peat	1080 ton per tahun
Coco fiber	360 ton per tahun
Arang tempurung	360 ton per tahun

Tabel 6-10. Perkiraan nilai investasi

Investasi Awal	
Minyak goreng	Rp 150.700.000
Sabut kelapa	Rp 309.650.000
Arang tempurung	Rp 70.630.000
Total	Rp 530.450.000
Modal Kerja	
Minyak goreng	Rp 280.663.667
Sabut kelapa	Rp 92.747.833
Arang tempurung	Rp 62.921.317
Total	Rp 436.332.817

Tabel 6-11. IRR dan BC Ratio kelapa dalam

Minyak Goreng	
IRR	76,7%
BC Ratio	1,30
Sabut Kelapa	
IRR	75,0%
BC Ratio	0,77
Arang	
IRR	115,0%
BC Ratio	6,83



Tata Kelola Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Penentuan indikator rencana pertumbuhan ekonomi hijau memperhatikan aspirasi paripihak yang menjadi aktor dalam kegiatan pembangunan. Mengingat rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau melibatkan multi-pihak, maka bahasa dan detail dokumen perencanaan perlu menjangkau semua pemangku kepentingan yang terkait.

Bab 7

Tata Kelola Pertumbuhan Ekonomi Hijau

7.1 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan merupakan bagian yang penting dalam tata kelola pertumbuhan ekonomi hijau agar ide dan gagasan dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Dalam pengarusutamaan ini banyak sekali pihak yang harus disasar baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Untuk unsur non pemerintah pengarusutamaan dimaksudkan agar rencana kegiatan, pembangunan maupun bentuk-bentuk investasi yang dilakukan dapat selaras dengan strategi dan intervensi dalam rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Dalam tahapan ini perlu dilakukan upaya sistematis untuk menyasar seluruh kalangan tanpa terkecuali dengan masyarakat ditingkat yang paling rendah di desa dan kampung.

Dalam pengarusutamaan terhadap unsur pemerintah prosesnya dapat dibuat lebih sistematis karena adanya sistem perencanaan pembangunan formal yang harus diikuti berdasarkan prosedur standar. Salah satu proses yang dapat menghantarkan kepada proses pengarusutamaan adalah melalui integrasi pada ukuran pencapaian *output* dan *outcome* pembangunan. Oleh karena itu, integrasi indikator rencana pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam indikator kinerja pembangunan daerah menjadi suatu langkah strategis yang mutlak.

Proses yang telah dijalankan untuk memudahkan proses pengarusutamaan indikator tersebut adalah menyusun indikator yang memadai dan mencukupi untuk mengukur kinerja rencana pertumbuhan ekonomi hijau, antara lain:

- Indikator dirancang untuk mudah diukur sehingga dapat memberikan gambaran ketercapaian pada isu strategis yang dituju. Setidaknya indikator mencakup dua komponen yaitu kondisi (*state of affairs*) isu yang sedang dibahas dan mengindikasikan aspek waktu dan lokasi secara spasial.
- Indikator dapat memenuhi beberapa tujuan sekaligus. Misalnya apakah tujuan strategis telah tercapai, mengkomunikasikan kondisi ketercapaian kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, dan implikasi dari berbagai pilihan kebijakan pada konteks skenario tertentu.
- Indikator disusun untuk dapat digunakan secara instrumental, sebagai contoh dalam menginformasikan kebutuhan pembiayaan dengan alokasi anggaran yang diasosiasikan dengan sasaran yang spesifik dan terikat waktu.



Penentuan indikator rencana pertumbuhan ekonomi hijau memperhatikan aspirasi paripihak yang menjadi aktor dalam kegiatan pembangunan. Mengingat rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau melibatkan multi-pihak, maka bahasa dan detail dokumen perencanaan perlu menjangkau semua pemangku kepentingan yang terkait. Setelah indikator tersusun, tahapan pengarusutamaan secara instrumental antara lain: (1) memastikan pertumbuhan hijau sebagai indikator dalam pelaksanaan program pembangunan daerah; (2) mengalokasikan sebagian kegiatan dalam pertumbuhan ekonomi hijau untuk dibiayai dengan anggaran daerah; (3) melakukan pengawasan dan evaluasi ketercapaian yang terukur dan berjangka.

7.2 Strategi Komunikasi dan Kemitraan

Komunikasi dan kemitraan merupakan faktor kunci untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan ekonomi hijau. Dengan adanya komunikasi dan kemitraan strategis, keterlibatan multi-pihak dapat disinergikan dalam mencapai tujuan pembangunan hijau. Kemitraan untuk mencapai tujuan merupakan

tujuan nomor 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Beberapa isu yang menjadi fokus dalam tujuan ini antara lain adalah koherensi kebijakan dan institusional serta data, monitoring, dan akuntabilitas. Selaras dengan tujuan ini, strategi komunikasi dan kemitraan dalam mewujudkan tata kelola pertumbuhan ekonomi hijau akan dibangun sebagai sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bagian integral dari komunikasi strategis adalah penyampaian narasi yang akan mempengaruhi pihak lain dalam suatu interaksi. Penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau memiliki sensitivitas terhadap kondisi lokal wilayah sehingga lebih mudah untuk dikomunikasikan sebagai narasi kedaerahan yang selaras dengan kebijakan pemerintah maupun kondisi lingkungan dan masyarakat. Kondisi ini menghindari skema 'narasi besar' (*grand narratives*) yang membuat suatu program sulit untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan di skala lokal. Keterlibatan multi-pihak harus dimulai sedini mungkin. Salah satunya adalah interaksi dalam penyusunan dokumen ini yang sudah dibangun dengan OPD terkait, akademisi, LSM, pengusaha, maupun kelompok masyarakat.

Dengan pola komunikasi partisipatif melalui seminar, FGD, wawancara, dan konsultasi publik, keterlibatan aktif multi-pihak dapat mulai terbangun. Selain komunikasi lisan, terdapat pula komunikasi tulisan misalnya melalui penyusunan kebijakan yang mampu menjangkau dan mengikat berbagai aktor baik pemerintah maupun masyarakat yang terkait. Perlu menjadi catatan bahwa komunikasi bukanlah satu bagian yang kemudian dilewati ke tahap berikutnya namun cenderung membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjaga interaksi yang sinergis dan produktif antar pihak.

Setelah terbangun pemahaman melalui komunikasi, kemitraan dapat terbangun antar pihak. Konteks kemitraan yang dimaksud pada pembahasan ini adalah adanya kesamaan komitmen dan keterlibatan parapihak dalam setiap proses yang dilakukan. Sasaran kemitraan strategis sudah cukup terpetakan dengan jelas dalam dokumen ini melalui identifikasi multi-pihak yang terkait dengan pembangunan ekonomi hijau. Diharapkan dengan pemetaan yang telah dibangun, arah gerak kemitraan dapat mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi hijau. Kemitraan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kerjasama dengan mitra pembangunan dalam pendanaan baik *grant* maupun *soft loan*, kolaborasi antara perusahaan dan petani yang saling menguntungkan dalam produksi dan peningkatan produktivitas, atau skema pinjam-pakai lahan antara pemilik konsesi dengan masyarakat. Tujuan kemitraan yang dibangun haruslah bertumpu pada semangat pengembangan kapasitas aset sosial melalui pendampingan maupun penyuluhan sehingga transformasi dapat menyentuh aspek mendasar sosial dan budaya.

Komunikasi dan kemitraan juga merupakan sarana untuk perbaikan tata kelola secara aktif yaitu dengan adanya mekanisme umpan

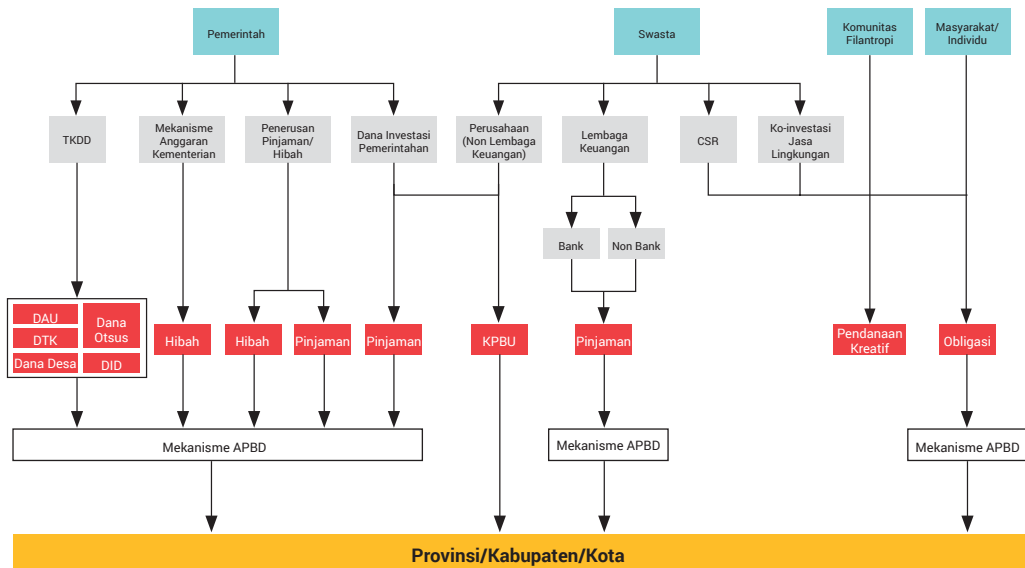
balik dalam kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi hijau. Umpan balik ini perlu dilakukan secara horizontal (dengan OPD terkait, swasta, masyarakat di tingkat provinsi) maupun vertikal (dengan kabupaten atau kota, nasional, maupun global). Sosialisasi ke kabupaten/daerah dilakukan untuk mengenalkan program pembangunan daerah pertumbuhan hijau dan memberikan arahan bagi proses perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Forum-forum pembelajaran dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif dalam rangka memperluas dampak dan meningkatkan pengakuan nasional maupun internasional mengenai capaian pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi.

7.3 Pendanaan dan Penganggaran

Pertumbuhan ekonomi hijau melibatkan interaksi multi-pihak dalam alokasi lahan untuk kepentingan publik dan investasi, rantai nilai komoditas dari produsen sampai konsumen, dan keterkaitan jasa lingkungan pada berbagai skala. Kompleksitas keterhubungan dan ketergantungan satu sama lain menjadi dasar bahwa pendanaan pertumbuhan ekonomi hijau selayaknya berasal dari berbagai sumber pendanaan baik dana pemerintah, swasta, maupun organisasi non-profit. Alur pembiayaan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota dijabarkan pada Gambar 7-1.

1. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.



Gambar 7-1. Skema pendanaan program di tingkat provinsi/kabupaten/kota

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

a. Dana Transfer Khusus (DTK)

DTK bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DTK terdiri dari DAK fisik dan DAK nonfisik. DAK yang terkait dengan kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau antara lain: DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan; DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; DAK Industri Kecil dan Menengah (IKM); DAK Pasar; DAK Pertanian; dan DAK Pariwisata.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

DID dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah,

pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

c. Dana Desa

Dana Desa dialokasikan secara langsung ke desa melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Peraturan mengenai dana desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Hibah Daerah

Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (PP Nomor 2 Tahun 2012). Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah (termasuk penerimaan dalam negeri, hibah luar

negeri, dan pinjaman luar negeri); badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

4. Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

KPBU berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara parapihak. Penyusunan skema KPBU difokuskan pada kerjasama pengembangan infrastruktur baik infrastruktur ekonomi maupun sosial. Tata cara pelaksanaan KPBU diatur lebih lanjut di Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015.

5. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (PP Nomor 30 Tahun 2011).

6. Pendanaan Inovatif

Skema pendanaan inovatif adalah skema yang menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN.

7. Pinjaman Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)

PINA adalah skema fasilitasi untuk mempercepat investasi swasta dalam membangun proyek strategis nasional dengan sumber pembiayaan dari anggaran non-pemerintah dan

didukung sepenuhnya melalui kebijakan pemerintah. Beberapa peraturan yang terkait dengan model pembiayaan ini adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015.

8. Obligasi

Obligasi daerah dapat menjadi instrumen alternatif bagi kepala daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Permenkeu Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Obligasi Daerah secara lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan OJK (POJK). Selain Obligasi Daerah, POJK yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi hijau adalah POJK mengenai *green bonds* atau Obligasi Hijau yaitu efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

9. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2017, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pendanaan lingkungan hidup yang terdiri dari dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan

lingkungan hidup, dan dana amanah/ bantuan konservasi.

10. Kerjasama dengan Swasta

Kerjasama dengan swasta dapat dilakukan melalui KPBU, pinjaman, maupun pendanaan kreatif. Skema kerjasama dapat berupa: (a) *public private partnership* dengan skenario *Build Operate Transfer (BOT)* atau skenario *project financing*; (b) skema investasi swasta yang difasilitasi oleh pemerintah daerah; (c) *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan (d) pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan. Skema pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan dapat diinternalisasikan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan yang dilakukan secara sukarela untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan.

7.4 Pemantauan dan Evaluasi

1. Perangkat Evaluasi pada Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pengukuran keberhasilan rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau membutuhkan tiga komponen utama yaitu: (1) rancangan indikator terhadap capaian yang diinginkan, (2) skema pemantauan dan evaluasi, dan (3) mekanisme pengumpulan data. Rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau telah merumuskan lima (5) capaian dan rancangan indikatornya (Tabel 7-1). Proyeksi dari indikator makro telah dianalisis berdasarkan skenario BAU dan rencana pertumbuhan ekonomi hijau pada Tabel 5-1 di Bab V. Indikator telah dijabarkan pada tingkat strategi dan intervensi untuk memastikan adanya susunan penilaian

pencapaian yang lebih rinci. Penyusunan capaian dan indikator yang dilakukan telah mempertimbangkan logika keterhubungan antara masukan (*input*), hasil (*result*), maksud (*purpose*) dan tujuan (*goal*).

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan skema pemantauan dan evaluasi adalah menekankan pentingnya *outcome* dalam pelaporan, tidak hanya *output*. Penerapan mekanisme penilaian yang efektif dan inovatif juga penting untuk mewujudkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Meskipun demikian, skema pemantauan dan evaluasi pertumbuhan ekonomi hijau sebaiknya terintegrasi dengan kebijakan pembuatan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencapai sinergi dan inklusivitas dalam keberjalanan rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau. Pemantauan dan evaluasi secara komprehensif perlu merujuk pada bagian pengarusutamaan yang dijelaskan pada sub bab 7.1, dimana indikator capaian pertumbuhan ekonomi hijau diselaraskan dengan indikator SDGs nasional serta kebijakan pemerintah provinsi.

2. Indikator Makro untuk Mengukur Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Indikator makro dan Indikator pada tingkat intervensi dan aktivitas pertumbuhan ekonomi hijau telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan parapihak di Provinsi Jambi. Indikator tersebut diharapkan akan menjadi alat ukur yang tepat untuk kinerja pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Tabel 7-1 memaparkan indikator makro yang telah disepakati pada tiap capaian yang diharapkan dari rencana pertumbuhan ekonomi hijau.

Tabel 7-1. Capaian dan indikator keberhasilan

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau	Indikator Makro
1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. PDRB 2. Pendapatan (upah/gaji) 3. Keuntungan usaha
2. Pertumbuhan inklusif dan merata	1. Serapan tenaga kerja 2. Rasio pendapatan terhadap keuntungan usaha
3. Ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan	1. Persentase luasan agroforestri 2. Intensitas emisi GRK
4. Ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan	1. Laju deforestasi 2. Tutupan pohon 3. Erosi 4. Aliran permukaan 5. Fragmentasi habitat 6. Risiko kebakaran
5. Pengurangan emisi GRK	1. Emisi sektor berbasis lahan 2. Emisi dekomposisi gambut 3. Laju sekuestrasi

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Aspek yang tidak kalah penting dalam pemantauan dan evaluasi adalah terkait data yang digunakan. Penggunaan data yang sah diperlukan untuk mengetahui persoalan yang terjadi dan menjadi dasar bagi perumusan masukan perbaikan kebijakan, program, maupun memantau keberjalanan suatu program. Persoalan ketersediaan dan reliabilitas data merupakan hal yang dapat menghambat proses evaluasi. Perbaikan data dapat dilakukan dengan memprioritaskan data disagregat, fokus pada indikator, serta standarisasi pada indikator penilaian.

Untuk mendapatkan data yang diharapkan diperlukan adanya kemampuan untuk melakukan analisis data yang memadai. Proses ini sering dianggap menyulitkan karena ketiadaan data yang memenuhi standar yang diharapkan. Untuk itu diperlukan upaya yang bersifat pemberian tugas kepada instansi terkait yang relevan terhadap masing-masing capaian indikator untuk melakukan hal tersebut.

4. Strategi Pemantauan dan Evaluasi

Strategi yang perlu diterapkan dalam pemantauan dan evaluasi adalah meningkatkan budaya organisasi yang kritis terhadap keberlangsungan suatu program atau kegiatan untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Pengambil keputusan perlu menempatkan komitmen untuk mendorong perencanaan yang lebih efektif melalui pemantauan dan evaluasi yang inklusif. Selain pemerintah, masyarakat dan swasta perlu dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari pemberdayaan dan memastikan akuntabilitas.

Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya konkret untuk memasukkan kegiatan pemantauan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam tata kelola masing-masing OPD di Provinsi Jambi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi tidak hanya memantau besaran serapan anggaran tetapi mengukur kinerja pembangunan hingga pada tingkatan *outcome*. Perlu dibuat SOP yang lebih

mengikat parapihak untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dalam proses pembangunan daerah yang komprehensif. Pelibatan unsur lain perlu diwadahi dalam kerangka aturan hukum yang memberikan ruang bagi partisipasi semua pihak dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.

7.5 Mitigasi Risiko

Upaya mitigasi dijabarkan berdasarkan perkiraan risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya. Masing-masing strategi pertumbuhan ekonomi hijau memiliki perkiraan risiko yang disusun berdasarkan karakteristik kegiatan yang menyertai strategi tersebut. Diharapkan mitigasi ini dapat menjadi panduan dalam tercapainya implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau secara lebih baik. Tabel 7-2 menjelaskan secara rinci terkait indikasi upaya mitigasi yang perlu dipersiapkan.

7.6 Keterbatasan

Secara keseluruhan terdapat beberapa keterbatasan utama yang tidak dapat dikontrol dalam kegiatan penyusunan dan penerapan rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Analisis dan Pengolahan Data

- Ketersediaan dan kualitas data untuk analisis masih terbatas. Beberapa data spasial tidak memiliki format *Geographisc Information System (GIS)* sehingga dibutuhkan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi bahan analisis.

- Simulasi pertumbuhan ekonomi hijau membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Informasi terkait pembangunan daerah yang dapat menjelaskan alokasi guna lahan baik provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat terbatas dalam hal ini terkait target capaian dari masing-masing sektor.

2. Proses Fasilitasi dan Kemitraan

- Sebagai sebuah inisiatif yang relatif baru, rencana pertumbuhan ekonomi hijau masih belum banyak dipahami oleh parapihak sehingga banyak sekali diskusi dan rapat-rapat yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat pemahaman yang sama diantara parapihak
- Adanya beberapa agenda daerah yang sangat penting bersamaan waktunya dengan agenda penyusunan rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau ini. Penyelarasan agenda dilakukan melalui koordinasi dengan parapihak secara intensif.
- Pembentukan kolaborasi dan kesepahaman (*common understanding*) antarpihak mengalami sedikit hambatan karena secara prinsip rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini perlu dilengkapi dengan beberapa komitmen dan kesepatan kemitraan di antara parapihak.

3. Pembahasan dan Rencana Implementasi

- Sebagai sebuah dokumen dalam bentuk *masterplan* dan *road map*, rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini akan mengatur aspek makro, tetapi pada sisi lain juga harus cukup jelas dalam memberikan arahan implementasi. Hal

ini mengakibatkan penggunaan tingkat kedetailan yang berbeda-beda pada beberapa kasus.

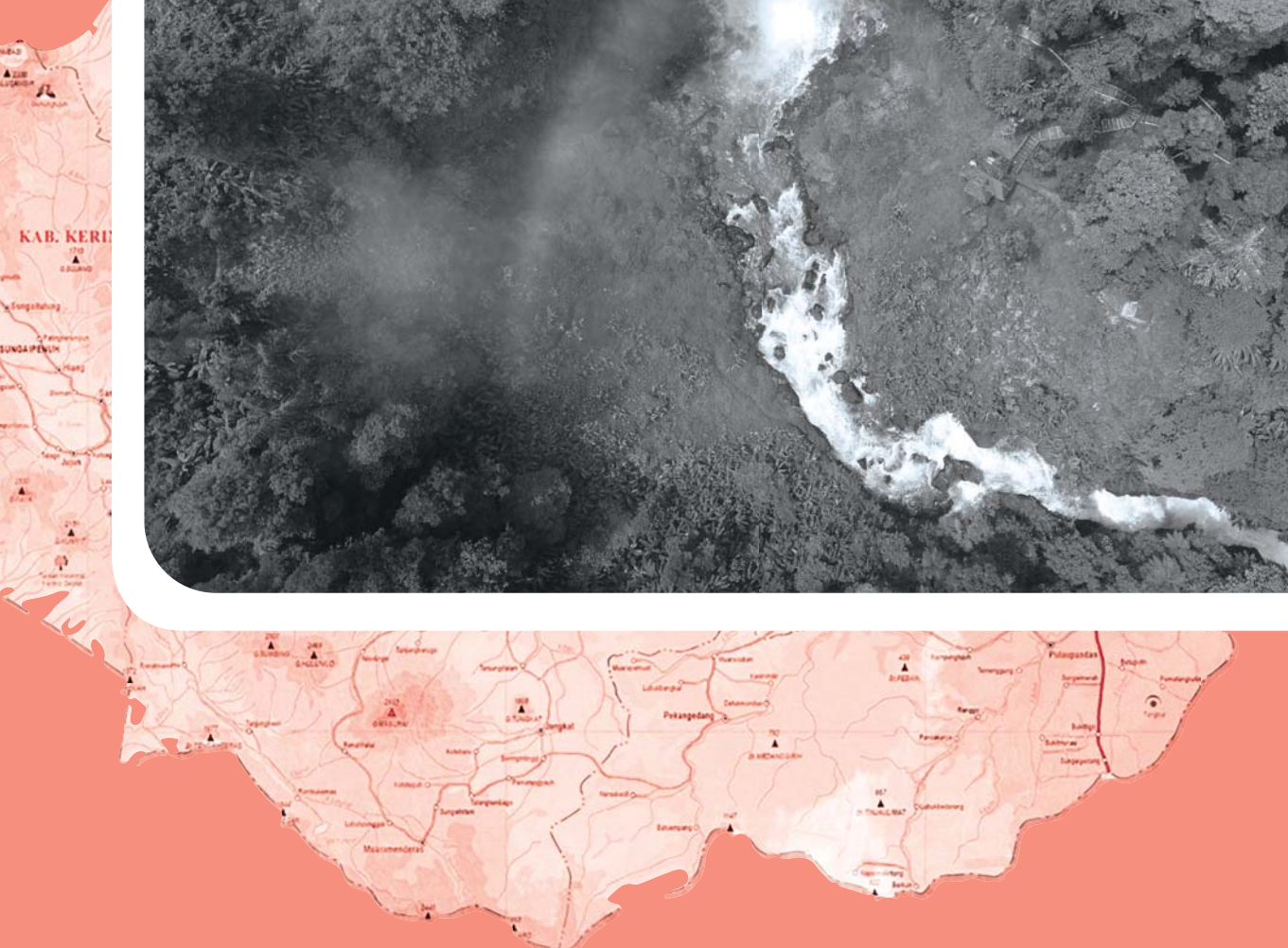
- Belum adanya rencana implementasi yang lahir pada saat penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini

yang memberikan contoh terkait proses implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Ke depannya diharapkan rencana implementasi dapat terwujud setelah rencana induk dan peta jalan diselesaikan.

Tabel 7-2. Identifikasi mitigasi berdasarkan potensi risiko

Strategi	Risiko	Kemungkinan terjadi	Upaya mitigasi
1. Tata guna, Pemulihan, dan Peningkatan Produktivitas Lahan Berkelanjutan	Ketidakmampuan menghimpun kemitraan antara perusahaan dan masyarakat	Sedang	• Pelibatan perusahaan sedini mungkin dalam penyusunan kegiatan • Penyusunan model kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak • Pengintegrasian dengan program yang sudah dilakukan oleh perusahaan misalnya CSR
	Fasilitasi konflik lahan terhambat oleh proses administrasi dan birokrasi	Sedang	• Penyederhanaan proses administratif dalam penyelesaian konflik lahan • Pendampingan secara formal maupun informal oleh pihak ketiga yang bermitra dengan pemerintah
	Perluasan kebun kelapa sawit terus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian	Tinggi	• Penegasan kembali moratorium lahan sawit melalui peraturan daerah
	Keterbatasan pendanaan untuk restorasi lahan	Sedang	• Opsi pendanaan melalui lembaga kemitraan internasional yang bergerak di isu lingkungan dan perubahan iklim
	Pembukaan lahan gambut terus terjadi karena regulasi yang tumpang tindih	Tinggi	• Harmonisasi regulasi yang tumpang tindih terkait gambut di skala nasional • Pengawasan lahan gambut yang dilindungi • Penegakan hukum bagi pembukaan lahan ilegal
	Budidaya padi alternatif terhambat keterlibatan petani	Rendah	• Penerapan sistem insentif dalam budidaya padi alternatif
	Petani tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan komoditas alternatif	Sedang	• Penerapan sistem insentif untuk pengembangan komoditas alternatif • Peningkatan kesadaran bersama melalui forum Gapoktan
	Petani karet tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi investor	Sedang	• Penilaian kapasitas sebelum pelatihan dan pembinaan agar tepat sasaran • Proyek percontohan pada beberapa kelompok petani karet

Strategi	Risiko	Kemungkinan terjadi	Upaya mitigasi
2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan melalui Peningkatam Akses terhadap Modal Pembangunan dan Penghidupan (livelihood capitals) serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Resolusi konflik tidak tercapai	Tinggi	Pendekatan sosial dan budaya dalam penyelesaian konflik Penyiapan opsi-opsi kompromi yang dimediasi oleh pihak netral
	Penyuluhan kurang menjawab kebutuhan petani di lapangan	Rendah	Penyusunan materi penyuluhan yang tepat guna dan tepat sasaran Penerapan mekanisme umpan balik dari petani untuk meninjau kembali materi penyuluhan Skema penyuluhan yang fleksibel dan berbasis lokasi (<i>place-based</i>)
	Ketidaksiapan kebijakan dan tata kelola dalam mengawal kompensasi atau imbal jasa lingkungan	Sedang	Penyusunan kebijakan daerah untuk mengawal implementasi praktik jasa lingkungan
	Kesulitan akses sertifikasi komoditas bagi petani kecil	Rendah	Kerja sama dengan swasta dalam pengurusan sertifikasi komoditas bagi petani kecil
3. Konektivitas dan Rantai Nilai Berkelanjutan	Pembangunan sarana pelabuhan, jalan, dan jembatan terhambat pendanaan	Sedang	Penerapan pendanaan infrastruktur inovatif dan kreatif
	Keterbatasan investasi industri hilir berbasis komoditas unggulan daerah	Rendah	Pendampingan perusahaan ke pengusaha kecil terkait hilirisasi
	Kesulitan bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro untuk memberikan pelatihan keuangan dengan petani	Rendah	Insentif untuk lembaga keuangan mikro





Simpulan dan Penutup

Rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini adalah inisiatif penting dan monumental Provinsi Jambi dalam memberi arah pembangunan jangka panjang sebagai acuan pembangunan jangka pendek dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana pertumbuhan ekonomi hijau merupakan penerjemahan dari cita-cita pertumbuhan ekonomi yang mengoptimalkan alokasi ruang, perbaikan akses sumber penghidupan, fungsi produksi, dengan memperbaiki rantai nilai, serta peningkatan nilai tambah hingga hilirisasi produk dan komoditas daerah.

Bab 8

Simpulan dan Penutup



Rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini adalah inisiatif penting dan monumental Provinsi Jambi dalam memberi arah pembangunan jangka panjang sebagai acuan pembangunan jangka pendek dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana pertumbuhan ekonomi hijau merupakan penerjemahan dari cita-cita pertumbuhan ekonomi yang mengoptimalkan alokasi ruang, perbaikan akses sumber penghidupan, fungsi produksi, dengan memperbaiki rantai nilai, serta peningkatan nilai tambah hingga hilirisasi produk dan komoditas daerah. Rencana pertumbuhan ekonomi hijau tidak menggantikan fungsi rencana pembangunan formal seperti RPJP, RPJMD maupun Renstra OPD, akan tetapi menempatkan rencana pertumbuhan hijau sebagai sumber rujukan atau dasar informasi dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena rencana pertumbuhan hijau dibuat untuk rencana jangka panjang dengan memperhatikan daya dukung wilayah untuk jangka panjang dengan memperhatikan capaian terhadap indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi hijau.

Rencana pertumbuhan ekonomi hijau berisikan berbagai pembahasan yang menghantarkan kepada rekomendasi peta jalan yang berisi program dan kegiatan untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Analisis kondisi masa lalu sebagai upaya untuk melihat proses yang telah berlangsung,

rumusan tujuan rencana pertumbuhan ekonomi hijau, skenario BAU dan kesepakatan skenario GGP, rumusan strategi rencana pertumbuhan ekonomi hijau, intervensi sebagai penterjemahan dari startegi, dan *ex-ante analysis* yang diukur dari kesepakatan indikator makro rencana pertumbuhan ekonomi hijau, rencana aktivitas, serta berbagai indikator terpilih untuk mengukur kinerja pada tingkat intervensi sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi.

Rencana pertumbuhan ekonomi hijau selanjutnya harus diacu oleh seluruh komponen pemerintah dalam pembuatan program-program pembangunan daerah, dan ditaati dan menjadi arahan prioritas bagi komponen masyarakat lain dalam melakukan kegiatan membangun daerah sesuai dengan fokus dan areanya masing-masing. Dengan proses ini diharapkan percepatan proses menuju tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi dapat tercapai.

Penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau menggunakan beberapa prinsip penting dan esensial dalam perencanaan pembangunan secara umum. Proses inklusif merupakan hal pertama yang diperhatikan dalam prosesnya. Proses inklusif ini menyangkut pelibatan parapihak dan tingkat akomodasi usulan dan masukan dari proses yang dilaksanakan sehingga diperolehnya hasil. Sebagai proses yang sangat independen jika dibandingkan dengan proses formal perencanaan pembangunan yang lain maka dalam hal ini sangat cukup dan memadai setiap pihak yang memiliki keinginan dan kemampuan terlibat dalam setiap proses pembahasan. Hal berikutnya adalah bahwa proses ini juga menjamin semua masukan yang disampaikan oleh parapihak dapat diakomodasi yang disebabkan tidak adanya rambu-rambu yang membatasi terhadap topik yang disampaikan.



Proses integratif merupakan proses yang dijalankan dalam penyusunan rencana pertumbuhan ekonomi hijau ini dimana sekat antar sektor, antar kewenangan, dan lingkup pembahasan dari tiap dokumen rencana pembangunan formal harapannya dapat dihilangkan. Proses mengintegrasikan rencana pembangunan sektoral kedalam rencana pembangunan komprehensif (rencana pertumbuhan ekonomi hijau) dilakukan melalui penelaahan RTRW, RPJP, RPJMD, Renstra OPD, *Masterplan* Pengembangan Komoditi, dan *Masterplan* beberapa kawasan strategis dan pertumbuhan provinsi. Proses lain yang dilakukan adalah menghubungkan antara informasi atau perencanaan yang berbasis spasial dan non-spasial yang saat ini ada.



Proses analisis dan hasil yang disajikan dalam rencana pertumbuhan ekonomi hijau menggunakan data dan informasi baru dan shahih yang saat ini ada. Beberapa data dikumpulkan dan dibuat untuk mendukung analisis yang diperlukan. Data biofisik, sosial, dan ekonomi, serta kebijakan dikumpulkan untuk dapat menggambarkan kondisi wilayah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam proses ini perhitungan dan pemodelan juga menggunakan metodologi yang sudah layak dan digunakan dalam dunia akademik dan ilmiah.

Sebagai suatu acuan pembangunan daerah, rencana pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi mengharuskan semua pihak mengambil peran dalam pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

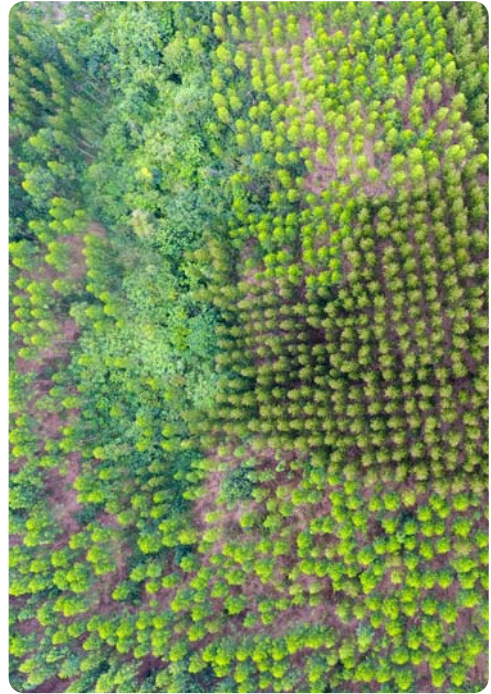
masing. Hal ini memerlukan upaya koordinasi dan membangun berbagai skema kemitraan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, termasuk donor/mitra pembangunan lain. Dengan berbagai kemitraan diharapkan keterbatasan dan kendala dapat dihadapi seperti dalam kemampuan kapasitas sistem, sumber daya, dan permodalan serta beberapa hal yang lain. Kemitraan merupakan salah satu unsur yang disarankan dalam rencana pertumbuhan ekonomi hijau dimana berbagai tujuan dan proses kemitraan dapat diharapkan dapat mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi.

Dalam proses implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau, rekomendasi diharapkan dapat masuk kedalam semua rencana pembangunan dan rencana implementasi kegiatan pemerintah dan non-pemerintah. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi atau diseminasi rencana kedalam pemahaman semua pihak secara lebih luas. Semakin banyak pemahaman ini diterima oleh parapihak maka akan semakin baik pula sinergi yang dapat diharapkan. Proses memasukkan rekomendasi dalam rencana lembaga, rencana keuangan, sektoral, dan rencana kegiatan lain merupakan proses pengarusutamaan yang disarankan sebagai bagian penting dalam rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Sepintas terlihat mudah, akan tetapi sebenarnya proses ini memerlukan kegiatan dengan tingkat kolaboratif tinggi mengingat adanya standar proses perencanaan dari setiap kelembagaan yang sudah dimiliki oleh masing-masing urusan.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana pertumbuhan ekonomi hijau. Hal ini diperlukan dalam mengukur kemajuan dan konsistensi dalam pencapaian tujuan, diharapkan juga menjadi bahan masukan dalam proses perencanaan berikutnya. Dalam prosesnya kegiatan

ini haruslah terintegrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dan melibatkan proses partisipatif parapihak. Untuk itu diperlukan *political will* dari pemerintah untuk menempatkan proses monitoring dan evaluasi dalam proses implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau.

Pada bagian akhir simpulan ini menitikberatkan kepada pentingnya kerangka kebijakan atau regulasi daerah yang mejadi payung hukum. Walaupun keberhasilan rencana pembangunan tidak selalu bergantung pada ada dan tidaknya peraturan detail, akan tetapi pada masa saat ini dimana segala sesuatunya memerlukan arahan dan pertanggung jawaban yang jelas, maka perlu diupayakan adanya bentuk nyata dari arahan dalam bentuk peraturan teknis dan peraturan penjelasan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.



Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2018. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Menurut Kab/Kota Tahun 2000-2018. <https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/02/01/811/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kab-kota-2002-2018.html>. (diakses 4 April 2019).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2018. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi Menurut Kab/Kota Tahun 2010-2018. <https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2018/04/03/362/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-menurut-kabupaten-kota-2010-2018.html>. (diakses 13 April 2019).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2018. PDRB ADHK Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2018. <https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/59/-seri-2010-pdrb-adhk-provinsi-jambi-menurut-lapangan-usaha-2010-2018.html>. (diakses 21 Mei 2019).
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Provinsi Jambi Dalam Angka 2017*. <http://jambiprov.go.id/v2/files/Provinsi%20Jambi%20Dalam%20Angka%202017.pdf> (diakses 16 September 2019).
- Kebakaran Hutan dan Lahan, 2018. Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>. (diakses 2 April 2019).
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
- Nawir, A. A., Santoso, L. & Mudhofar, I., 2003. Towards Mutually-Beneficial Company-Community Partnerships in Timber Plantation: Lessons learnt from Indonesia. *CIFOR Working Paper No. 26*.
- OECD, 2011. Towards Green Growth. OECD Publishing.
- Pemerintah Provinsi Jambi, 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.-L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A.K., Day, M., Garcia, C., 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110, 8349-8356.
- <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>
- United Nation Environment Programme (UNEP). 2010. Green Economy Report: A Preview. <https://unep.ch/etb/publications/Green%20Economy/GER%20Preview%20v2.0.pdf>. (diakses 5 Mei 2019).
- Witono, H., 2005. *Pengembangan Social Forestry pada Hutan Tanaman Melalui Pola Kemitraan Pengalaman PT. Wirakarya Sakti*. Bogor, IPB Scientific Repository.

Lampiran

Strategi 1: Tata guna lahan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikator
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur	OPD	
1.1	Alokasi dan tata guna lahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan dengan mempertimbangkan area lindung dan kesesuaian lahan melalui penerapan kebijakan satu peta	1.1.1	Penyusunan basis data sistem informasi satu peta	202xx1510	Penyusunan sistem informasi/data base hutan	BPKH-Planologi	
				201xx1602	Penyusunan data base potensi produk pangan	Dinas Tanaman Pangan	
				201xx1602	Penyusunan data base potensi produk pangan	Dinas Perkebunan	
				106xx1502	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Bappeda	
				103xx2204	Penyusunan sistem informasi/data base infrastruktur	PUPR	
				125xx1506	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kominfo	
				203xx1507	Penyusunan sistem informasi/data base pertambangan	Pertambangan	
				205xx2402	Penyusunan sistem informasi/data base wilayah pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		1.1.2	Peninjauan kembali dan sinkronisasi izin konsesi dan hak guna usaha melalui program satu peta	202xx1510	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan perizinan di kawasan hutan	BPKH-Planologi	
				201xx1632	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan perizinan untuk kawasan budidaya pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	
				201xx1602	Penyusunan data base potensi produk pangan	Dinas Pertanian	
		1.1.3	Pemetaan dan identifikasi komoditas eksisting	206xx1506	Penyusunan profil komoditas daerah	Bappeda	
				123xx1501	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	BPS	
				201xx1602	Penyusunan data base potensi produk pangan	Dinas Ketahanan Pangan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
				201xx1602	Penyusunan data base potensi produk pangan	Dinas Pertanian	
		1.1.4	Penataan batas sesuai RTRW melalui peraturan zonasi	105xx1505	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Bappeda	
				202xx2003	Penyusunan perencanaan zonasi hutan	BPKH-Planologi	
				201xx1632	Koordinasi penyusunan batas kawasan pertanian/perkebunan/ lumbung pangan	Dinas Pertanian	
		1.1.5	Penyelenggaran sistem pemantauan pemanfaatan ruang terutama pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan	202xx1508	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Dinas Kehutanan	NGO
1.2	Alokasi dan pemetaan akses kawasan hutan untuk penghidupan masyarakat dengan prioritas pada kantong-kantong kemiskina	1.2.1	Penambahan area Perhutanan Sosial pada lokasi desa tertinggal ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	202xx1506	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Dinas Kehutanan	
		1.2.2	Harmonisasi, konsultasi, dan pemutakhiran secara berkala Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (HTR, HKM dan HD) dengan RTRW dan peta lainnya yang dimiliki lembaga non-pemerintah.	106xx1604	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Bappeda	Swasta
		1.2.3	Kajian tipologi Perhutanan Sosial dan aktivitas penghidupan masyarakat setempat (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan)	102xx1504	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Dinas Kehutanan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi			
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur	OPD	
1.3	Alokasi akses-kepemilikan lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk penghidupan di desa miskin (Reforma Agraria)	1.2.4	Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan	202xx1506	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Dinas Kehutanan	Non-Pemerintah
		1.2.5	Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di tingkat provinsi yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial	122xx1701	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	NGO	
		1.2.6	Fasilitasi kemitraan perhutanan sosial yang melibatkan perusahaan	115xx1603	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas KUMKM	Pemerintah
		1.3.1	Kajian definisi dan kriteria desa miskin yang layak untuk diprioritaskan di sekitar kawasan hutan	122xx1702	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Bappeda	
		1.3.2	Identifikasi lahan yang sesuai (feasibility study) untuk pelepasan kawasan	109xx1601	Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Badan Pertanahan	
		1.3.3	Identifikasi kawasan hutan	108xx1903	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Dinas Kehutanan	Pemerintah
		1.3.4	Fasilitasi tim terpadu dalam membuat kajian mengenai perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi.	102xx1501	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi	Dinas Kehutanan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
1.4	Alokasi dan prioritas pemulihan bentang lahan terdegradasi	1.3.5	Penyusunan rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan	102xx1506	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Dinas Kehutanan	Swasta
		1.3.6	Revisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan sentra komoditas	106xx1502	Revisi RTRW Kabupaten untuk APL hasil perubahan peruntukan dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan sentra komoditas	Bappeda	
		1.3.7	Fasilitasi petani miskin untuk mendapat akses kepemilikan lahan	202xx1504	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Dinas Kehutanan	
		1.4.1	Penentuan prioritas lahan terdegradasi untuk direhabilitasi di tingkat desa	202xx1601	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan
		1.4.2	Survei wilayah terdegradasi	202xx1608	Survei wilayah terdegradasi	Dinas Kehutanan	
		1.4.3	Penyediaan bibit dan sarpras untuk pengkayaan dengan spesies lokal dan endemik	202xx1602	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Dinas Kehutanan	
1.4.4	Penanaman dan pemeliharaan	202xx1603	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan		
1.4.5	Pengawasan dan evaluasi wilayah terdegradasi	203xx1602	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat	Dinas Pertambangan			
1.4.6	Rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal mining dan drilling sesuai peruntukan lahan awal	108xx1617	Rehabilitasi lahan bekas tambang ilegal mining dan drilling sesuai peruntukan lahan awal	Dinas Lingkungan Hidup			

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif	
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah		
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur			OPD
1.5	Alokasi revitalisasi dan optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan	1.5.1	Pemetaan pengembangan/prioritas komoditas di tingkat kabupaten	201xx1632	Pemetaan pengembangan/prioritas komoditas di tingkat kabupaten	Dinas Perkebunan		
		1.5.2	Moratorium izin baru sawit	108xx1617	Moratorium izin baru sawit	Dinas Lingkungan Hidup		Swasta
		1.5.3	Penentuan daerah potensial budidaya sentra sentra komoditas	201xx1632	Penentuan daerah potensial budidaya sentra sentra komoditas	Dinas Perkebunan		
		1.5.4	Pemetaan distribusi kebun tua dan prioritas revitalisasi dan peremajaan 7 komoditas unggulan	201xx1632	Pemetaan distribusi kebun tua dan prioritas revitalisasi dan peremajaan 7 komoditas unggulan	Dinas Perkebunan		
1.6	Restorasi ekosistem gambut	1.6.1	Pemetaan dan perencanaan kawasan restorasi	108xx1906	Pemetaan dan perencanaan kawasan restorasi	Dinas Lingkungan Hidup		
		1.6.2	Survey lokasi untuk kesesuaian pelaksanaan restorasi	108xx1906	Survey lokasi untuk kesesuaian pelaksanaan restorasi	Dinas Lingkungan Hidup		
		1.6.3	Peningkatan kapasitas masyarakat (wilayah APL)	202xx1902	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	Dinas Kehutanan		
		1.6.4	Penyiapan bahan dan sarana prasarana	202xx1510	Penyiapan bahan dan sarana prasarana	Dinas Kehutanan		
		1.6.5	Pelaksanaan kegiatan (rewetting, revegetation, revitalization)	202xx1608	Pelaksanaan kegiatan (rewetting, revegetation, revitalization)	BRG		
		1.6.6	Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi	202xx1608	Pengawasan dan evaluasi kegiatan restorasi	BRG		

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
1.7	Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan terpadu	1.7.1	Sosialisasi dan pemasangan papan larangan	108xx2204	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.7.2	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla	108xx2201	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.7.3	Penyiapan SDM dan pembentukan tim satgas dan kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah	108xx2203	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.7.4	Patroli pencegahan karhutla	108xx2207	Patroli pencegahan karhutla	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.7.5	Pemetaan wilayah rawan karhutla	108xx2202	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.7.6	Penanganan pasca kebakaran, pemetaan, penghitungan kerugian, rekomendasi	108xx2207	Penanganan pasca kebakaran, pemetaan, penghitungan kerugian, rekomendasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.7.7	Ground check area atau titik hotspot	108xx2202	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
1.8	Pemetaan dan penanganan wilayah konflik	1.7.8	Penegakan hukum karhutla	108xx2207	Penegakan hukum karhutla	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.8.1	Sinkronisasi batas kawasan rawan konflik	109xx1601	Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Badan Pertanahan	
		1.8.2	Identifikasi tipologi, pemetaan, dan pembuatan rencana aksi penyelesaian rawan konflik	109xx1702	Identifikasi tipologi, pemetaan, dan pembuatan rencana aksi penyelesaian rawan konflik	Badan Pertanahan	
		1.8.3	Pembentukan dan penguatan tim penyelesaian konflik (di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Sektoral)	109xx1702	Pembentukan dan penguatan tim penyelesaian konflik (di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Sektoral)	Badan Pertanahan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
1.9	Budidaya padi (irigasi, non-irigasi, dan rawa/gambut) dengan memaksimalkan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik yang berlabel	1.8.4	Mediasi penyelesaian konflik antar pihak terkait	109xx1702	Mediasi penyelesaian konflik antar pihak terkait	Badan Pertanahan	
		1.8.5	Fasilitasi penyelesaian konflik melalui nota kesepakatan	109xx1701	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanian	Badan Pertanahan	
		1.8.6	Studi sosial ekonomi, tenurial, dan akses lahan masyarakat sekitar	106xx1506	Penyusunan dan analisis sosial ekonomi, tenurial, dan akses lahan masyarakat sekitar	Bappeda	
		1.8.7	Konsultasi dengan masyarakat sekitar untuk penentuan zonasi	106xx1606	Koordinasi dengan masyarakat sekitar untuk penentuan zonasi	Bappeda	
		1.9.1	Pengaktifan praktik padi rendah emisi pada kelompok tani	201xx1632	Pembentukan dan pengembangan kelompok kerja padi rendah emisi	Dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	
		1.9.2	Pembangunan demplot varietas padi rendah emisi dan metode System of Rice Intensification (SRI)		Pembangunan demplot varietas padi rendah emisi dan metode System of Rice Intensification (SRI)	Petani, kelompok tani, dan KUD	
		1.9.3	Sosialisasi untuk kelompok tani mengenai penggunaan bibit rendah emisi dan pupuk organik berlabel	201xx1808	Pelatihan dan penerapan demplot varietas padi irigasi rendah emisi dan ternak terpadu	Balai Penyuluhan	
		1.9.4	Pemberian subsidi bibit padi varietas unggul rendah emisi dan varietas lokal	201xx1903	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pertanian/Perkebunan/Ketahanan Pangan	
		1.9.5	Pemantauan kualitas air irigasi agar bebas polutan				

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikator
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
1.10	Aplikasi konsep Good Agricultural Practices (GAP), diversifikasi usaha tani dan teknologi pasca panen, serta pembangunan industri rakyat kelapa dalam	1.9.6	Penyuluhan melalui sekolah lapang untuk meningkatkan kualitas benih, cara seleksi, dan penanganan hama penyakit	103xx2410	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	NGO, swasta
		1.9.7	Pengelolaan dan pemanfaatan pupuk organik	201xx1907	Penyediaan sarana pupuk organik bersubsidi	Pertanian/Perkebunan/Ketahanan Pangan	
		1.9.8	Perencanaan partisipatif petani untuk meningkatkan nilai tukar petani (NTP)				
		1.10.1	Pelatihan dan penyuluhan kelompok tani kelapa dalam untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen petani	201xx1808	Pelatihan dan penyuluhan kelompok tani kelapa dalam untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen petani		Dinas Perkebunan
		1.10.2	Peremajaan perkebunan kelapa dalam	201xx1907	Peremajaan kebun kelapa dalam		
		1.10.3	Pengembangan tumpang sari kelapa dalam dengan pinang, kopi, dan cokelat	201xx1907	Pengembangan tumpang sari kelapa dalam dengan pinang, kopi, dan cokelat		
1.10.4	Pembangunan nurseri mandiri desa	201xx1907	Pembangunan nurseri mandiri desa		Dinas Perkebunan		
1.10.5	Pengelolaan kebun benih induk di tingkat kabupaten untuk pengembangan bibit berkualitas	201xx1907	Pengelolaan kebun benih induk di tingkat kabupaten untuk pengembangan bibit berkualitas				
		1.10.6	Penguatan kelembagaan kelompok tani kelapa dalam	201xx1907	Penguatan kelembagaan kelompok tani kelapa dalam	Dinas Perkebunan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
1.11	Revitalisasi, peremajaan, dan pengelolaan kebun karet menggunakan GAP	1.10.7	Penguatan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) kelapa dalam	201xx1907	Penguatan koperasi Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) kelapa dalam	Dinas Perkebunan	
		1.11.1	Kajian pengelolaan agroforestri karet dengan tanaman sela produktif	201xx1907	Kajian pengelolaan agroforestri karet dengan tanaman sela produktif	Dinas Perkebunan	
		1.11.2	Penyuluhan praktik pertanian yang baik (GAP) pada budidaya karet	201xx1907	Penyuluhan penerapan good agricultural practice (GAP)	Dinas Perkebunan	
		1.11.3	Distribusi bibit unggul karet dan tanaman sela (kopi, cokelat, dsb)	201xx1907	Distribusi bibit unggul karet dan tanaman sela (kopi, cokelat, dsb)	Dinas Perkebunan	
		1.11.4	Fasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat, termasuk dukungan peningkatan kualitas pembibitan lokal di penangkar	201xx1907	Fasilitasi proses sertifikasi kebun bibit karet rakyat, termasuk dukungan peningkatan kualitas pembibitan lokal di penangkar	Dinas Perkebunan	
		1.11.5	Penjaminan pasokan pupuk terjangkau dan informasi pemupukan berimbang	201xx1907	Penjaminan pasokan pupuk terjangkau dan informasi pemupukan berimbang	Dinas Perkebunan	
		1.11.6	Peremajaan perkebunan karet	201xx1907	Peremajaan perkebunan karet	Dinas Perkebunan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi			
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur	OPD	
1.12	Intensifikasi budidaya sawit berkualitas	1.12.1	Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sawit	201xx1907	Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani sawit	Dinas Perkebunan	Non-Pemerintah
		1.12.2	Penyediaan benih unggul bersertifikat kelapa sawit	201xx1907	Penyediaan benih unggul bersertifikat kelapa sawit	Dinas Perkebunan	
		1.12.3	Penguatan bisnis pembibitan kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan benih bersertifikat oleh masyarakat	201xx1907	Penguatan bisnis pembibitan kelapa sawit yang berkualitas tinggi dan benih bersertifikat oleh masyarakat	Dinas Perkebunan	
		1.12.4	Penerapan program replanting dan pembinaan kebun plasma dan kebun kelapa sawit rakyat untuk mencapai standar sertifikasi ISPO/RSPO	201xx1907	Penerapan program replanting dan pembinaan kebun plasma dan kebun kelapa sawit rakyat untuk mencapai standar sertifikasi ISPO/RSPO	Dinas Perkebunan Swasta	
		1.12.5	Pengembangan opsi agroforestri sawit dengan tanaman komoditas dan ternak (sapi) terutama untuk kebun di atas 8 tahun.	201xx1907	Pengembangan opsi agroforestri sawit dengan tanaman komoditas dan ternak (sapi) terutama untuk kebun di atas 8 tahun.	Pertanian/Perkebunan/Ketahanan Pangan	
		1.12.6	Pengembangan pola kemitraan antara inti dan plasma	201xx1907	Pengembangan pola kemitraan antara inti dan plasma	Pertanian/Perkebunan/Ketahanan Pangan	
		1.12.7	Peningkatan akses petani ke pendanaan usaha tani dan mempermudah persyaratan untuk KUR	201xx1907	Peningkatan akses petani ke pendanaan usaha tani dan mempermudah persyaratan untuk KUR	Pertanian/Perkebunan/Ketahanan Pangan	

Strategi 2: Kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan jasa lingkungan

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.1	Kelembagaan Pertanian dan Kehutanan yang solid	2.1.1	Penetapan kelembagaan dan pendampingan terhadap kelompok pertanian dan kehutanan	201xx1632	Penetapan kelembagaan dan pendampingan terhadap kelompok pertanian dan kehutanan	Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan	
		2.1.2	Sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan pertanian dan kehutanan oleh NGO dan pemerintah	201xx1632	Sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan pertanian dan kehutanan oleh NGO dan pemerintah	Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan	NGO
		2.1.3	Penguatan kapasitas Gabungan antar kelompok Tani (Gapoktan)	201xx1632	Penguatan Kapasitas Gabungan antar Kelompok Tani (Gapoktan)	Dinas Pertanian	
		2.1.4	Peningkatan partisipasi anggota kelompok tani termasuk petani wanita dan taruna tani	201xx1632	Peningkatan partisipasi anggota kelompok tani termasuk petani wanita dan taruna tani	Dinas Pertanian	
		2.1.5	Perencanaan dan pengelolaan KPH	102xx1501	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan	Dinas Kehutanan	
2.2	Pengembangan akses permodalan bagi masyarakat	2.2.1	Penumbuhan dan pengembangan KEP (Kelompok Ekonomi Petani), Koperasi, Badan Usaha Milik Petani	201xx1506	Penumbuhan dan pengembangan KEP (Kelompok Ekonomi Petani), Koperasi, Badan Usaha Milik Petani	Dinas Pertanian	
		2.2.2	Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	115xx1512	Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.3	Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	2.2.3	Kemitraan dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha (pertanian, perkebunan, perikanan)	115xx1712	Kemitraan dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha (pertanian, perkebunan, perikanan)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Swasta
		2.2.4	Sosialisasi sumber akses modal untuk masyarakat	115xx1810	Sosialisasi sumber akses modal untuk masyarakat	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Lembaga Keuangan
		2.2.5	Penguatan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam administrasi dan pengelolaan keuangan	115xx1810	Penguatan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam administrasi dan pengelolaan keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Swasta
		2.2.6	Revitalisasi koperasi	115xx1802	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Lembaga Keuangan
		2.2.7	Fasilitasi penyediaan asuransi bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan	201xx1506	Fasilitasi penyediaan asuransi bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan	Dinas Pertanian	Lembaga Keuangan
2.3	Penyuluhan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu	2.3.1	Penguatan balai penyuluhan (pertanian, kehutanan, dan lainnya)	201xx1506	Penguatan balai penyuluhan (pertanian, kehutanan, dan lainnya)	Dinas Pertanian	
		2.3.2	Standarisasi penyuluhan	201xx1506	Standarisasi penyuluhan	Dinas Pertanian	
		2.3.3	Peningkatan kompetensi penyuluhan	201xx1506	Peningkatan kompetensi penyuluhan	Dinas Pertanian	
		2.3.4	Peningkatan anggaran operasional penyuluhan dan penyuluhan	201xx1506	Peningkatan anggaran operasional penyuluhan dan penyuluhan	Dinas Pertanian	
		2.3.5	Peningkatan penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk penyuluhan	201xx1506	Peningkatan penggunaan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk penyuluhan	Dinas Pertanian	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.4	Pendanaan, kebijakan dan kemitraan yang mendukung program restorasi	2.3.6	Pemberdayaan penyuluh swadaya	201xx1506	Pemberdayaan penyuluh swadaya	Dinas Pertanian	Universitas
		2.3.7	Peningkatan pendampingan teknis kepada masyarakat oleh perusahaan	201xx1506	Peningkatan pendampingan teknis kepada masyarakat oleh perusahaan	Dinas Pertanian	
		2.3.8	Pembuatan demplot atau bioplot	201xx1506	Pembuatan demplot atau bioplot	Dinas Pertanian	
		2.3.9	Pembelajaran sukses dari tempat lain	201xx1506	Pembelajaran sukses dari tempat lain	Dinas Pertanian	
		2.3.10	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	201xx1506	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Dinas Pertanian	
		2.4.1	Penguatan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat (e.g.: Masyarakat Peduli Api, GAPOKTAN, masyarakat desa di daerah penyangga) dan pemerintah (provinsi, kabupaten, desa)	122xx1502	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.4.2	Alokasi dana untuk melakukan kegiatan restorasi lahan di luar kegiatan sosialisasi dan pencegahan	2.4.2	Alokasi dana untuk melakukan kegiatan restorasi lahan di luar kegiatan sosialisasi dan pencegahan	202xx1608	Alokasi dana untuk melakukan kegiatan restorasi lahan di luar kegiatan sosialisasi dan pencegahan	Dinas Kehutanan	
		2.4.3	Pembangunan kemitraan yang melibatkan multistakeholder	202xx1608	Pembangunan kemitraan yang melibatkan multistakeholder	Dinas Kehutanan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Pelaku				Budget Indikatif
			Pemerintah Provinsi			Non-Pemerintah	
			Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur	OPD		
2.4		2.4.4	Perencanaan penyuluhan tentang restorasi untuk masyarakat di sekitar kawasan gambut dan Taman Nasional (terutama dalam hal perluasan lahan menggunakan sistem bakar)	202xx1608	Perencanaan penyuluhan tentang restorasi untuk masyarakat di sekitar kawasan gambut dan Taman Nasional (terutama dalam hal perluasan lahan menggunakan sistem bakar)	Dinas Kehutanan	
		2.4.5	Optimalisasi fungsi TRGD untuk melaksanakan kegiatan kemitraan restorasi lahan gambut	202xx1608	Optimalisasi fungsi TRGD untuk melaksanakan kegiatan kemitraan restorasi lahan gambut	Dinas Kehutanan	
		2.4.6	Optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara transparan	202xx1608	Optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran secara transparan	Dinas Kehutanan	
		2.4.7	Inisiasi penganggaran restorasi dari dana non-pemerintah	202xx1608	Inisiasi penganggaran restorasi dari dana non-pemerintah	Dinas Kehutanan Swasta	
		2.5	Penyadartahuan, promosi, pembentukan institusi multipihak, serta penguatan regulasi untuk penyediaan jasa lingkungan dan peningkatan kesejahteraan, untuk sektor swasta dan masyarakat lokal	2.5.1	Penyadartahuan dan mempromosikan konsep jasa lingkungan dan penerapannya	108xx1717	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.6	Peningkatan skala ekonomi melalui penyediaan produk kredit usaha tani yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang ada	2.5.2	Pelatihan tentang jasa lingkungan, pembayaran dan co-investasi jasalingkungan, pembiayaan jasa jasalingkungan; target untuk pemerintah daerah, LSM dan sektor swasta	108xx1717	Pelatihan tentang jasa lingkungan, pembayaran dan co-investasi jasalingkungan, pembiayaan jasa lingkungan; target untuk pemerintah daerah, LSM dan sektor swasta	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.5.3	Fasilitasi dan pembentukan insitusi multipihak untuk penghimpunan, pemupukan, penyaluran dan pemantauan capaian pemakaian dana	108xx1717	Fasilitasi dan pembentukan insitusi multipihak untuk akukan penghimpunan, pemupukan, penyaluran dan pemantauan capaian pemakaian dana	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.5.4	Revisi regulasi terkait jasa lingkungan dan instrumen jasa lingkungan	108xx1717	Revisi regulasi terkait jasa lingkungan dan instrumen jasa lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.6.1	Penguatan kelembagaan dan keahlian koperasi masyarakat/BUMDES/ lembaga keuangan mikro	115xx1810	Penguatan kelembagaan dan keahlian koperasi masyarakat/ BUMDES/ lembaga keuangan mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.6.2	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	115xx1810	Penguatan pola kerjasama dengan perbankan daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.6.3	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	115xx1810	Pelatihan pengelolaan keuangan dan kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.6.4	Pengawasan pemanfaatan dana desa	115xx1810	Pengawasan pemanfaatan dana desa	115xx1810	Pengawasan pemanfaatan dana desa	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.7	Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk tata kelola DAS	2.7.1	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk tata kelola DAS	108xx1717	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk tata kelola DAS	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.7.2	Peningkatan kapasitas, kelengkapan dokumen dan membuat badan hukum bagi 'Kelompok Tani Jasa Lingkungan' yang berasal dari kelompok tani yang sudah ada atau lembaga/kelompok masyarakat desa lainnya	108xx1717	Peningkatan kapasitas, kelengkapan dokumen dan membuat badan hukum bagi 'Kelompok Tani Jasa Lingkungan' yang berasal dari kelompok tani yang sudah ada atau lembaga/kelompok masyarakat desa lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.7.3	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	108xx1717	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.7.4	Koordinasi monitoring, evaluasi, dan laporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi	108xx1717	Koordinasi monitoring, evaluasi, dan laporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.7.5	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL	108xx1717	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL	Dinas Lingkungan Hidup	NGO, swasta

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.8	Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah dan pembayaran jasa lingkungan (KIPJL) untuk keanekaragaman hayati	2.7.6	Sistem insentif dan disinsentif untuk kabupaten dan desa lokasi PETI: hulu (Merangin, Soralangun, Muara Panco, dll) terutama di skala sub-DAS.	108xx1717	Sistem insentif dan disinsentif untuk kabupaten dan desa lokasi PETI: hulu (Merangin, Soralangun, Mersam, Muara Panco, dll) terutama di skala sub-DAS.	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta
		2.8.1	Pelatihan dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk keanekaragaman hayati	108xx1717	Pelatihan dan Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi dan jasa lingkungan untuk keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.8.2	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	108xx1717	Fasilitasi negosiasi antara penyedia jasa lingkungan potensial dan penerima manfaat	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.8.3	Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi	108xx1717	Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang perkembangan kontrak jasa lingkungan dan indikator yang disepakati sebagai basis data provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.8.4	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL	108xx1717	Penguatan peran swasta dan stakeholder lainnya (NGO) dalam proses perencanaan pembangunan untuk KIPJL	Dinas Lingkungan Hidup	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.9	Pasar dan inisiatif karbon sukarela	2.9.1	Identifikasi gap kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi untuk memastikan efisiensi izin skema pasar dan inisiatif karbon sukarela, resolusi konflik,	108xx1717	Identifikasi gap kebijakan dan peraturan di tingkat provinsi untuk memastikan efisiensi ijin skema pasar dan inisiatif karbon sukarela, resolusi konflik,	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.9.2	Fasilitasi untuk partisipan pasar Karbon sukarela dan juga intermediaries, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	108xx1717	Fasilitasi untuk partisipan pasar Karbon sukarela dan juga intermediaries, serta insentif untuk perusahaan yang terlibat di dalam pasar karbon sukarela.	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.9.3	ToT untuk monitoring dan pengukuran karbon di tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat	108xx1717	ToT untuk monitoring dan pengukuran karbon di tingkat tapak untuk pemerintah daerah, LSM dan masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.9.4	Dukungan terhadap LSM untuk memfasilitasi pengukuran karbon, pelibatan masyarakat dan negosiasi pasar karbon sukarela	108xx1717	Dukungan terhadap LSM untuk memfasilitasi pengukuran karbon, pelibatan masyarakat dan negosiasi pasar karbon sukarela	Dinas Lingkungan Hidup	
2.10	Pasar komoditas air untuk suplai air berkelanjutan	2.10.1	Analisis praktik saat ini dan potensinya untuk pembagian manfaat, termasuk sumber dan tingkat dari dampak lingkungan, penghitungan kompensasi, dan target distribusi air bersih	108xx1717	Analisis praktik saat ini dan potensinya untuk pembagian manfaat, termasuk sumber dan tingkat dari dampak lingkungan, penghitungan kompensasi, dan target distribusi air bersih	Dinas Lingkungan Hidup	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.10		2.10.2	Pengecekan adanya kompensasi dan pembagian manfaat melalui semua OPD di bawah koordinasi di bawah koordinasi BAPPEDA, BPDAS, dan perusahaan	108xx1717	Pengecekan adanya kompensasi dan pembagian manfaat melalui semua OPD di bawah koordinasi BAPPEDA, BPDAS, dan perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.10.3	Penerapan sistem monitoring sebagai basis untuk negosiasi dan pembaruannya	108xx1717	Penerapan sistem monitoring sebagai basis untuk negosiasi dan pembaruannya	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.10.4	Penilaian dan peningkatan efisiensi kinerja PDAM, khususnya dalam menyediakan dan menyalurkan air bersih di daerah perkotaan	108xx1717	Penilaian dan peningkatan efisiensi kinerja PDAM, khususnya dalam menyediakan dan menyalurkan air bersih di daerah perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.10.5	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan	108xx1717	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas usaha yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta
		2.11	Pasar ekowisata dengan variasi alternatif tujuan wisata: wisata lanskap umum dan wisata minat khusus	2.11.1	Sosialisasi konsep ekowisata sebagai wisata minat khusus bukan wisata massal (mass tourism)	108xx1717	Sosialisasi konsep ekowisata sebagai wisata minat khusus bukan wisata massal (mass tourism)

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
			Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
			Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.11.2		Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENSTRA dalam mendukung wisata di Jambi	108xx1717	Pengembangan rencana ekowisata yang spesifik lokasi (misalnya: rencana infrastruktur, analisis lokasi) dan model bisnis untuk komunitas lokal sebagai tambahan untuk RENSTRA dalam mendukung wisata di Jambi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	
2.11.3		Identifikasi dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata	108xx1717	Identifikasi dampak lingkungan dan sosial dari ekowisata	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	
2.11.4		Pengembangan rencana partisipatif dengan komunitas lokal tentang bagaimana tempat ekowisata dan menyediakan nilai tambah dari ekowisata sebagai bagian dari program diversifikasi pendapatan	108xx1717	Pengembangan rencana partisipatif dengan komunitas lokal tentang bagaimana tempat ekowisata dan menyediakan nilai tambah dari ekowisata sebagai bagian dari program diversifikasi pendapatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	
2.11.5		Perbaikan sistem tiket untuk lokasi ekowisata, dan mengidentifikasi bagaimana membiayai konservasi dari pendapatan ekowisata	108xx1717	Perbaikan sistem tiket untuk lokasi ekowisata, dan mengidentifikasi bagaimana membiayai konservasi dari pendapatan ekowisata	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	
2.11.6		Identifikasi dan penilaian jasa lingkungan dari lokasi ekowisata	108xx1717	Identifikasi dan penilaian jasa lingkungan dari lokasi ekowisata	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
2.12	Sertifikasi lanskap dan jasa lingkungan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan	2.11.7	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di daerah wisata.	108xx1717	Pengembangan mekanisme disinsentif, misalnya pajak lingkungan dan retribusi, untuk aktivitas wisata yang mengancam kualitas dan kuantitas jasa lingkungan di daerah wisata.	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata	
		2.12.1	Integrasi program pembangunan pertanian pada area yang potensial untuk mendapatkan sertifikasi	108xx1717	Integrasi program pembangunan pertanian pada area yang potensial untuk mendapatkan sertifikasi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	
		2.12.2	Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari database provinsi untuk program sertifikasi (lingkungan, ekonomi dan sosial).	108xx1717	Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari database provinsi untuk program sertifikasi (lingkungan, ekonomi dan sosial).	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.12.3	Pengawasan indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian dari database provinsi	108xx1717	Pengawasan indikator lingkungan, ekonomi dan sosial untuk program sertifikasi sebagai bagian dari database provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.12.4	Penyederhanaan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi, misalnya agroforestri.	108xx1717	Penyederhanaan administrasi untuk sertifikasi lahan dan status legal untuk perkebunan kopi yang mendukung fungsi ekologi, misalnya agroforestri	Dinas Lingkungan Hidup	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi			
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur	OPD	
2.12.5		2.12.5	Aplikasi sistem insentif (pengurangan pajak) untuk perusahaan berkelanjutan dan sistem disinsentif (denda) untuk perusahaan pelanggar.	108xx1717	Aplikasi sistem insentif (pengurangan pajak) untuk perusahaan berkelanjutan dan sistem disinsentif (denda) untuk perusahaan pelanggar.	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta
				108xx1717	Pengembangan dan integrasi indikator hijau untuk sistem finansial agribisnis	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian	
				202xx1906	Penyederhanaan perizinan HTI sebagai sistem insentif jika perusahaan sudah mengaplikasikan sertifikasi berkelanjutan seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT), dan Forest Stewardship Council (FSC), sesuai dengan tuntutan konsumen global, dengan bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah (LSM)	Dinas Kehutanan	Swasta
2.12.8		2.12.8	Analisis sistem perizinan dan sertifikasi kayu yang tumpang tindih, dan mengaplikasikannya di tingkat provinsi serta memberikan rekomendasi di tingkat nasional	202xx1906	Analisis sistem perizinan dan sertifikasi kayu yang tumpang tindih, dan mengaplikasikannya di tingkat provinsi serta memberikan rekomendasi di tingkat nasional	Dinas Kehutanan	NGO

Strategi 3: Konektivitas dan rantai nilai yang berkeadilan

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikator	
				Pemerintah Provinsi				
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur	OPD		
3.1	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri	4.1.1	Pembebasan lahan pembangunan pelabuhan	107xx1509	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda	Non-Pemerintah	
		4.1.2	Pembangunan akses jalan menuju pelabuhan	103xx1503	Pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum		
		4.1.3	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri	103xx15009	Pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan industri	Dinas Pekerjaan Umum		Swasta
		4.1.4	Pembangunan sarana pergudangan	103xx15009	Pembangunan sarana pergudangan	Dinas Pekerjaan Umum		Swasta
3.2	Peningkatan moda transportasi di area sentra produksi ke fasilitas pengelolaan atau pasar	4.2.1	Pengembangan moda transportasi sungai	103xx15009	Pengembangan moda transportasi sungai	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
		4.2.2	Pembangunan jaringan kereta api	103xx15009	Pembangunan jaringan kereta api	Dinas Pekerjaan Umum		
		4.2.3	Pembangunan terminal tipe C (Angdes dan Angkot)	103xx15009	Pembangunan terminal tipe C (Angdes dan Angkot)	Dinas Pekerjaan Umum		
		4.2.4	Penyediaan alat angkut komoditas	103xx15009	Penyediaan alat angkut komoditas	Dinas Pekerjaan Umum		
3.3	Pengembangan kapasitas jalan dan jembatan penghubung antar pusat-pusat kegiatan	4.3.1	Penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan strategis guna menunjang pusat-pusat kegiatan antar wilayah	103xx15009	Penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan strategis guna menunjang pusat-pusat kegiatan antar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
		4.3.2	Pemeliharaan jalan dan jembatan	103xx1503	Pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum		
		4.3.3	Peningkatan status jalan	103xx15009	Peningkatan status jalan	Dinas Pekerjaan Umum		

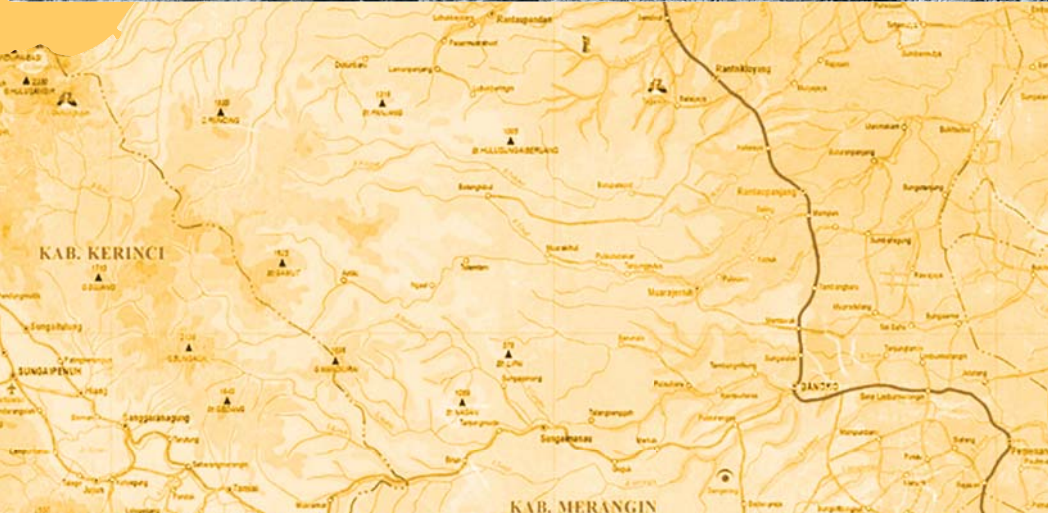
No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
3.4	Peningkatan kemudahan dalam akses informasi pasar yang menguntungkan petani	4.4.1	Pembuatan basis data harga komoditas	201xx1714	Pembuatan basis data harga komoditas	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan	Swasta
		4.4.2	Sosialisasi harga komoditas hingga tingkat desa	201xx1714	Sosialisasi harga komoditas hingga tingkat desa	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan	
3.5	Pembentukan industri turunan kelapa dalam terpadu untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani	4.5.1	Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk turunan kelapa dalam	201xx1502	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Dinas Perkebunan	Swasta
		4.5.2	Pengembangan industri pengolahan kelapa dalam (contoh: batok untuk briket arang, minyak VCO, nata de coco)	201xx1632	Pengembangan industri pengolahan kelapa dalam (contoh: batok untuk briket arang, minyak VCO, nata de coco)	Dinas Industri dan Perdagangan	
3.6	Usaha produk turunan karet melibatkan petani karet sebagai investor	4.5.3	Fasilitasi investasi industri pengolahan dengan menjamin penyediaan bahan baku kelapa dalam	201xx1632	Fasilitasi investasi industri pengolahan dengan menjamin penyediaan bahan baku kelapa dalam	Dinas Industri dan Perdagangan	Dinas Perkebunan
		4.5.4	Pengembangan sistem insentif untuk industri kelapa dalam	108xx1615	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Dinas Perkebunan	
3.6		4.6.1	Studi kelayakan dan teknologi pengelolaan karet tepat guna untuk pembangunan produk hilir karet, termasuk industri berbasis lateks, crumb rubber mini, scraper rubber mini dan pengolahan karet pekat	201xx1632	Studi kelayakan dan teknologi pengelolaan karet tepat guna untuk pembangunan produk hilir karet, termasuk industri berbasis lateks, crumb rubber mini dan pengolahan karet pekat	Dinas Perkebunan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
3.7	Optimalisasi pasar lelang karet (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bokar – UPPB) sebagai simpul suplai karet bersih	4.6.2	Fasilitasi kemitraan sektor swasta dan pelaku usaha, termasuk dengan perbankan untuk modal usaha	201xx1632	Fasilitasi kemitraan sektor swasta dan pelaku usaha, termasuk dengan perbankan untuk modal usaha	Dinas Perkebunan	Swasta
		4.6.3	Fasilitasi pendirian pabrik produk turunan karet	201xx1632	Fasilitasi pendirian pabrik produk turunan karet sesuai dengan kajian pada bagian sebelumnya	Dinas Perkebunan	Swasta
		4.6.4	Pengembangan skema investasi dengan melibatkan petani karet sebagai investor	201xx1632	Pengembangan skema investasi dengan melibatkan petani karet sebagai investor	Dinas Perkebunan	Swasta
		4.6.5	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru yaitu minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	201xx1632	Penentuan syarat-syarat investasi industri remah karet baru yaitu minimal 20% dipenuhi dari kebun sendiri	Dinas Perkebunan	Swasta
		4.6.6	Penjaminan konsistensi kualitas pasca panen karet siap jual	201xx1632	Penjaminan konsistensi kualitas pasca panen karet siap jual	Dinas Perkebunan	
		4.6.7	Pembangunan industri pengolahan produk turunan karet terpadu untuk meningkatkan nilai tambah (contoh: aspal karet, sarung tangan, aksesoris motor, balon, ban, vulkanisir)	201xx1632	Pembangunan industri pengolahan produk turunan karet terpadu untuk meningkatkan nilai tambah (contoh: aspal karet, sarung tangan, aksesoris motor, balon, ban, vulkanisir)	Dinas Perkebunan	
		4.7.1	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	201xx1632	Peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas UPPB sesuai dengan kebutuhan setempat	Dinas Perkebunan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
4.7.2			Peningkatan peran kelompok tani di mekanisme pasar UPBB dengan peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak dan juknis kelompok, terutama mengenai proses panen yang baik dan pengenalan mutu karet	201xx1632	Peningkatan peran kelompok tani di mekanisme pasar UPBB dengan peningkatan kapasitas dan kejelasan juklak dan juknis kelompok, terutama mengenai proses panen yang baik dan pengenalan mutu karet	Dinas Perkebunan	
4.7.3			Perbaikan sistem manajemen UPBB dengan menerbitkan sertifikat pengumpul sesuai dengan lokasi UPBB	201xx1632	Perbaikan sistem manajemen UPBB dengan menerbitkan sertifikat pengumpul sesuai dengan lokasi UPBB	Dinas Perkebunan	
4.7.4			Pengawasan di pasar lelang untuk menghindari praktek ilegal, oknum monopoli harga, dan menjamin mekanisme pasar	201xx1632	Pengawasan di pasar lelang untuk menghindari praktek ilegal, oknum monopoli harga, dan menjamin mekanisme pasar	Dinas Perkebunan	
4.7.5			Penegakan hukum dan penguatan regulasi agar sistem insentif dan disinsentif berjalan untuk memperbaiki mutu karet bersih melalui UPBB	201xx1632	Penegakan hukum dan penguatan regulasi agar sistem insentif dan disinsentif berjalan untuk memperbaiki mutu karet bersih melalui UPBB	Dinas Perkebunan	
4.7.6			Pengembangan diversifikasi pemasaran dengan pembeli bokar baru	201xx1632	Pengembangan diversifikasi pemasaran dengan pembeli bokar baru	Dinas Perkebunan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah	
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur		
3.8	Diversifikasi usaha tani dengan agroforestri komoditas bernilai ekonomi tinggi, serta peningkatan teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis	4.8.1	Kerjasama dengan KPH program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan budidaya dan produk kayumanis di dalam kawasan melibatkan masyarakat	201xx1632	Kerjasama dengan KPH program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan budidaya dan produk kayumanis di dalam kawasan melibatkan masyarakat	Dinas Perkebunan	
		4.8.2	Penjaminan ketersediaan benih kayu manis	201xx1632	Penjaminan ketersediaan benih kayu manis	Dinas Perkebunan	
		4.8.3	Pembangunan pembibitan mandiri desa dan kebun benih induk di tingkat kabupaten (sentral produksi) untuk pengembangan bibit berkualitas kayu manis dan tanaman agroforestri lainnya	201xx1632	Pembangunan pembibitan mandiri desa dan kebun benih induk di tingkat kabupaten (sentral produksi) untuk pengembangan bibit berkualitas kayu manis dan tanaman agroforestri lainnya	Dinas Perkebunan	
		4.8.4	Pembangunan demplot agroforestri dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi (kopi, cabe, hortikultur bawah naungan)	201xx1632	Pembangunan demplot agroforestri dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi (kopi, cabe, hortikultur bawah naungan)	Dinas Perkebunan	
		4.8.5	Pelatihan diversifikasi usaha dengan sistem agroforestri dan agrowisata di area perkebunan rakyat kayu manis	201xx1632	Pelatihan diversifikasi usaha dengan sistem agroforestri dan agrowisata di area perkebunan rakyat kayu manis	Dinas Perkebunan	
		4.8.6	Peningkatan mutu dan nilai tambah produk turunan kayu manis	201xx1632	Peningkatan mutu dan nilai tambah produk turunan kayu manis	Dinas Perkebunan	
		4.8.7	Optimalisasi Indikasi Geografis produk kayumanis	201xx1632	Optimalisasi Indikasi Geografis produk kayumanis	Dinas Perkebunan	

No. Intervensi	Intervensi	No. Aktivitas	Aktivitas	Pelaku			Budget Indikatif	
				Pemerintah Provinsi		Non-Pemerintah		
				Kode	Program/Aktivitas Nomenklatur			OPD
4.8.8			Peningkatan kualitas teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis berindikasi geografis.	201xx1632	Peningkatan kualitas teknologi pasca panen dan pemasaran kayu manis berindikasi geografis.	Dinas Perkebunan	Universitas	
4.8.9			Fasilitasi pemasaran produk kayu manis dan produk agroforestri dengan kualitas tinggi	201xx1632	Fasilitasi pemasaran produk kayu manis dan produk agroforestri dengan kualitas tinggi	Dinas Perkebunan		
4.8.10			Pelibatan BEKRAF dalam melakukan peningkatan branding produk kayu manis asal Jambi	201xx1632	Pelibatan BEKRAF dalam melakukan peningkatan branding produk kayu manis asal Jambi	BEKRAF	Swasta	



Rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi adalah sebuah inisiatif daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya terbarukan secara berkelanjutan. Rencana induk ini disusun dan dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan semua pihak.